

Editor:

Dr. Adi Wijayanto, S.Or., S.Kom., M.Pd., AIFO.

Eka Rizki Meilani, S.Psi., M.Psi. | Dr. Rahmadina, M.Pd.

Ahmad Syaifuddin, S.Pd., M.Pd. | Triana Rahmawati, S.Sos., M.Sos.



Telaah Holistik **ILMU SOSIAL DAN ILMU ALAM**

dalam Dunia Pendidikan serta Kemasyarakatan



Supsioloani | I Wayan Utama | Moh. Imron Rosidi | Damiasih | Yosef Adityanto Aji | Samuel Bora Lero | Inayah
Aris Widodo | Izuddinsyah Siregar | Zahrotun Satriawati | Rohmad Eko Priyono | Endang Tri Wahyurini
Sofia Dhengi | Septian Aditya Kolompo | Maria Yohanista | Murdaningsih | Sjakir Lobud | Noneng Nurhayani
Annisa Sri Sugiarti | Aqodiah | Anita Lisdiana | Neneng Fauziah | Isna Nurul Inayati | Nurkadri
Firmimus Konstantinus Bhara | Aneke Rahmawati | Wisnu Dermawan | Daniel Manek
Agustina Purnami Setiawi | Mohamad Rizal | Nur Kholis | Yustiana Arie Suwanto
Bewa Dangu Wole | Ahadiah Agustin

TELAAH HOLISTIK ILMU SOSIAL DAN ILMU ALAM DALAM DUNIA PENDIDIKAN SERTA KEMASYARAKATAN

Supsiloe	I Wayan Utama	Moh. Imron Rosidi	Damiasih
Yosef Adityanto Aji	Samuel Bora Lero	Inayah	Aris Widodo
Izuddinsyah Siregar	Zahrotun Satriawati	Rohmad Eko Priyono	
Endang Tri Wahyurini	Sofia Dhengi	Septian Aditya Kolompo	
Maria Yohanista	Murdaningsih	Sjakir Lobud	
Noneng Nurhayani	Annisa Sri Sugiarti	Aqodiah	Anita Lisdiana
Neneng Fauziah	Isna Nurul Inayati	Nurkadri	
Firnimus Konstantinus Bhara	Aneke Rahmawati		
Wisnu Dermawan	Daniel Manek	Agustina Purnami Setiawi	
Mohamad Rizal	Nur Kholis	Yustiana Arie Suwanto	
Bewa Dangu Wole	Ahadiyah Agustina		

Editor:

Dr. Adi Wijayanto, S.Or., S.Kom., M.Pd., AIFO.

Eka Rizki Meilani, S.Psi., M.Psi.

Dr. Rahmadina, M.Pd.

Ahmad Syaifuddin, S.Pd., M.Pd.

Triana Rahmawati, S.Sos., M.Sos.

Pengantar:

Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.

Direktur Pascasarjana UIN SATU

(Universitas Islam Negeri

Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)



**AKADEMIA
PUSTAKA**

Telaah Holistik Ilmu Sosial dan Ilmu Alam dalam Dunia Pendidikan serta Kemasyarakatan

Copyright © Supsilani, *dkk.* 2026.
Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Penulis : Supsilani, *dkk.*
Editor : Adi Wijayanto, *dkk.*
Penyelarasan akhir: Saiful Mustofa
Layout : Kowim Sabilillah
Desain cover : Diki M. Fauzi
x + 219 hlm : 14 x 20,5 cm
ISBN : 978-623-157-249-3
Cetakan Pertama, April, 2026

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

Akademia Pustaka

Jl. Raya Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung

Telp: 081807413208

Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

Website: www.akademiapustaka.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, karya kolaboratif berjudul ***"Telaah Holistik Ilmu Sosial dan Ilmu Alam dalam Dunia Pendidikan Serta Kemasyarakatan"*** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini lahir dari sebuah kesadaran bersama bahwa fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dan dunia pendidikan saat ini tidak lagi dapat dipandang dari satu sudut pandang yang sempit. Kompleksitas tantangan zaman menuntut kita untuk menjembatani jurang antara ilmu sosial yang mengkaji dinamika kemanusiaan dan ilmu alam yang menelaah hukum-hukum semesta. Integrasi keduanya menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang komprehensif, berkelanjutan, dan tepat guna.

Dalam setiap babnya, para penulis mencoba membedah bagaimana sinergi antara logika saintifik dan empati sosial dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan, kebijakan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Kami percaya bahwa pendidikan bukan sekadar transfer informasi, melainkan upaya membentuk manusia yang mampu memahami ekosistem alam sekaligus menjaga harmoni sosial.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh rekan penulis dan kontributor yang telah mencurahkan pemikiran, data, serta dedikasinya dalam penyusunan buku ini. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami tujukan kepada para akademisi, praktisi pendidikan, dan tokoh masyarakat yang telah memberikan inspirasi serta dukungan moral selama proses kreatif berlangsung.

Kami menyadari bahwa karya ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga gagasan-gagasan yang tertuang dalam buku ini dapat memberikan wawasan baru bagi para pendidik, mahasiswa, dan masyarakat luas dalam memandang dunia secara lebih utuh dan bijaksana.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi kontribusi bermakna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan bangsa.

Tulungagung, 9 Maret 2026

Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.

Direktur Pascasarjana UIN SATU

(Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
---------------------	-----

- Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag

DAFTAR ISI	v
------------------	---

BAB I

DEDIKASI ILMU SOSIAL DALAM PENDIDIKAN, BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: ANTARA IDEALISME DAN REALITAS PENDIDIKAN.....	2
--	---

- Dr. Supsiloani, S.Sos., M.Si.

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS BANJAR DAN PENINGKATAN KESADARAN LINGKUNGAN MELALUI STORYTELLING DI DESA BUWUN SEJATI- LOMBOK BARAT	9
---	---

- Dr. I Wayan Utama, M.I.Kom. 9

SOSIALISASI BIJAK BERMEDIA SOSIAL ERA DIGITAL DI SMP NEGERI 7 GORONTALO	16
--	----

- Dr. Moh. Imron Rosidi, S.Pd., M.Pd.

MENYIKAPI <i>OVERTOURISM</i> BAGI PENGELOLA PARIWISATA.....	23
--	----

- Dr. Damiasih, MM., M.Par.

KEARIFAN LOKAL DALAM SENI PERTUNJUKAN SEBAGAI ASET PARIWISATA BUDAYA LOMBOK TIMUR	30
--	----

- Dr. Yosef Adityanto Aji, S.Sn., MA.

TIRANI KULTURAL.....	36
----------------------	----

- Samuel Bora Lero, S.IP.,M.I.P.

FLIPPED CLASSROOM DALAM PRAKTIK PEMBELAJARAN ILMU BAHASA (PRAKTIK KELAS BAHASA ARAB UIN WALISONGO).....	43
--	-----------

- Inayah, M.Pd.

MAHASISWA TUMBUH BERSAMA DALAM MENJAGA KEKOMPAKAN DAN KEBERSAMAAN DI LOKASI KULIAH KERJA NYATA.....	50
--	-----------

- Aris Widodo, SE, M.Si, M.M.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI RUANG DIGITAL.....	56
---	-----------

- Izuddinsyah Siregar, M.Pd.

PARIWISATA REGENERATIF SEBAGAI PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN PARIWISATA DI INDONESIA.....	61
---	-----------

- Zahrotun Satriawati, S.Par., M.Par.

REKAYASA TEKNIK MESIN PADA PROSES PEMBUATAN DRUM PENYAMAKAN KULIT UNTUK INDUSTRI WAYANG KULIT.....	68
---	-----------

- Rohmad Eko Priyono, A.Md TK., S.Pd., M.Sn.

BAB II

OPTIMALISASI SUMBER DAYA ALAM DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

WORLD CLEAN UP DAY (WCDI) SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN MITIGASI BENCANA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN TLANAKAN PAMEKASAN	74
---	-----------

- Dr. Endang Tri Wahyurini, S.Pi., M.Agr.

DAMPAK PROSES PENGASAPAN TERHADAP NILAI GIZI DAN KEAMANAN IKAN CAKALANG (KATSUWONUS PELAMIS) DI PT. KCBS KELURAHAN WAILITI, KABUPATEN SIKKA.....	81
---	-----------

- Sofia Dhengi, S.Pi., M.Si.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KELE'I MELALUI AGROINDUSTRI.....	88
---	-----------

- Septian Aditya Kolompo, S. Agr., M.P.

BAHAN PAKAN LOKAL SEBAGAI ALTERNATIF PAKAN TERNAK NON RUMINANSIA	94
---	-----------

- Maria Yohanista, S.Pt., MP.

OPTIMALISASI PENANAMAN JAHE UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELOMPOK PETANI WEO BARU WONGA	100
--	------------

- Murdaningsih, SP., MP.

BAB III PERAN PENDIDIKAN DAN PROGRAM SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENGAPA ADMINISTRASI PENDIDIKAN MENENTUKAN MUTU SEKOLAH.....	108
---	------------

- Dr. Sjakir Lobud, S.Ag. M.Pd.

PENGOLAHAN LIMBAH PADAT WAFER DI PT X	115
--	------------

- Ir. Noneng Nurhayani, M.M.Pd.

DINAMIKA PENDIDIKAN PASCA-BENCANA: DARI TEORI KE PRAKTIK	122
---	------------

- Annisa Sri Sugiarti, S.Si.,M.Si.

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM OBE (OUTCOME-ORIENTED EDUCATION) BAGI GURU MADRASAH IBTIDAIYAH.....	126
--	------------

- Aqodiah, M.Pd.I.

INTERNALISASI NILAI EMPATI DAN TOLERANSI DALAM PENDIDIKAN IPS MELALUI WORKSHOP ANTI-BULLYING PADA SISWA MTSN 1 LAMPUNG TIMUR	133
---	------------

- Anita Lisdiana, M.Pd.

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI INDONESIA, FOKUS PADA TANTANGAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI (SLHS).....	139
---	------------

- Neneng Fauziah, S.Sos., MM.

KAMPUS MENGAJAR SEBAGAI MOTOR PENGGERAK LITERASI NUMERASI DI SEKOLAH	146
---	------------

- Isna Nurul Inayati, M.Pd.I.

REDEFINISI MASKULINITAS DAN FEMINITAS DALAM OLAHRAGA DI SEKOLAH: STUDI KASUS PERSEPSI SISWA TERHADAP CABANG OLAHRAGA NON-TRADISIONAL	153
---	------------

- Prof. Dr. Nurkadri, S.Pd., M.Pd.

BAB IV PERSPEKTIF MULTIDISIPLINER DAN DEDIKASI UNTUK MASYARAKAT PENGAWASAN PEMBANGUNAN MENARA DAN RENOVASI GEREJA ST. MARTINUS BOLA	160
--	------------

- Dr. Ir. Firnimus Konstantinus Bhara, ST., MT.

DINAMIKA PELATIHAN KULINER KREATIF DALAM PERSPEKTIF WISATA KULINER DAN GASTRONOMI ANAK USIA DINI.....	166
--	------------

- Aneke Rahmawati, S.Pd., M.Sc.

PERKEMBANGAN TARI KREASI BARU DI INDONESIA TAHUN 1945-AN.....	172
--	------------

- Wisnu Dermawan, M.Sn.

ACCOUNTING FOR MANAGER.....	176
------------------------------------	------------

- Daniel Manek S.Fil., SE., M.Si.

INOVASI TEKNOLOGI DAUR ULANG: PENDAMPINGAN BANK SAMPAH DENGAN ANALISIS MATEMATIKA UNTUK EFISIENSI DAN EKONOMI Sirkular	182
---	------------

- Agustina Purnami Setiawi, M.Pd.

WAKTU TEMPUH KENDARAAN AKIBAT U-TURN PADA RUAS JALAN MT. HARYONO DI KOTA LUWUK.....	188
--	------------

- Mohammad Rizal.

PENDIDIKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN MODERN	195
---	------------

- Nur Kholis, S.Pd.I.

EVALUASI DAN PENGUATAN GERAKAN CUCI TANGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT DI SEKOLAH.....	200
---	------------

- dr. Yustiana Arie Suwanto, M.Biomed., Sp.MK.

MELAYANI: MENYERUAKKAN IDEALISME PADA PEKERJAAN.....	206
---	------------

- Bewa Dangu Wole, S.Kep., Ns., M.A.P.

MODEL PENGABDIAN BERBASIS EKOSISTEM HALAL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	212
---	------------

- Ahadiyah Agustina, SE.Sy.M.E.

BAB I

DEDIKASI ILMU SOSIAL DALAM PENDIDIKAN, BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: ANTARA IDEALISME DAN REALITAS PENDIDIKAN

Dr. Supsilalani, S.Sos., M.Si.¹

Universitas Negeri Medan

“Pendidikan multikultural menuntut integrasi kebijakan dan praktik sekolah agar idealisme keadilan dan inklusi terwujud nyata dalam sistem Pendidikan”

Pendidikan multikultural berkembang sebagai respons terhadap realitas masyarakat yang semakin majemuk. Globalisasi, mobilitas penduduk, serta perkembangan teknologi informasi telah mempercepat perjumpaan individu dengan latar belakang budaya, agama, bahasa, dan identitas sosial yang beragam. Dalam kondisi tersebut, pendidikan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai proses transfer

¹ Penulis lahir di Medan, pada 30 April 1971, merupakan Dosen di Prodi Magister Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Menyelesaikan Studi S1 di Jurusan Sosiologi Fisip Universitas Sumatera Utara tahun 1995, menyelesaikan studi S2 di Perencanaan Wilayah Dan Pedesaan konsentrasi Perkotaan di Sekolah PascaSarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2008, dan menyelesaikan studi S3 di Program Studi, Studi Pembangunan Fisip Universitas Sumatera Utara tahun 2022.

pengetahuan akademik, melainkan sebagai ruang strategis untuk membentuk kesadaran hidup bersama dalam perbedaan. Pendidikan multikultural membawa idealisme besar, yaitu menjadikan pendidikan sebagai instrumen keadilan sosial, inklusi, dan penguatan demokrasi. Namun, dalam praktiknya, idealisme tersebut sering kali berhadapan dengan realitas pendidikan yang kompleks, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun praktik di tingkat sekolah.

Secara konseptual, pendidikan multikultural berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan. Banks (2015) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai proses reformasi pendidikan yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang etnis, ras, budaya, agama, atau kelas sosial. Pendidikan multikultural tidak hanya menyangkut konten kurikulum, tetapi juga mencakup struktur institusi pendidikan, relasi kekuasaan, serta praktik pedagogis yang berlangsung di dalamnya. Dengan demikian, pendidikan multikultural menuntut perubahan paradigma yang bersifat sistemik dan berkelanjutan, bukan sekadar penambahan materi atau kegiatan simbolik. Idealisme pendidikan multikultural menempatkan sekolah sebagai ruang publik yang aman dan inklusif bagi semua identitas. Pendidikan diposisikan sebagai sarana pembentukan kesadaran sosial dan moral, di mana peserta didik tidak hanya mengenal perbedaan, tetapi juga mampu memahami dan mengelola perbedaan tersebut secara adil dan manusiawi.

Dalam kerangka ini, pendidikan multikultural memiliki keterkaitan yang erat dengan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Peserta didik diharapkan tumbuh menjadi individu yang memiliki empati sosial, sikap toleran, serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang hidup dalam konteks plural. Dalam praktik idealnya, pendidikan multikultural menuntut kurikulum yang inklusif dan

representatif terhadap keberagaman pengalaman sosial peserta didik. Proses pembelajaran diarahkan pada dialog, refleksi kritis, dan partisipasi aktif siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong interaksi lintas budaya dan pemikiran kritis, bukan sebagai otoritas tunggal pengetahuan. Freire (2005) menekankan bahwa pendidikan harus menjadi praktik pembebasan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam memahami realitas sosialnya. Perspektif ini memperkuat posisi pendidikan multikultural sebagai pendekatan pedagogis yang bersifat transformatif.

Namun, realitas implementasi pendidikan multikultural di sekolah-sekolah Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara idealisme dan praktik. Pendidikan multikultural sering kali dipahami secara reduktif sebagai aktivitas seremonial, seperti perayaan hari besar keagamaan atau penggunaan simbol budaya tertentu. Pendekatan semacam ini memang memiliki nilai pengenalan, tetapi belum menyentuh dimensi substantif pendidikan multikultural, yaitu perubahan sikap, relasi sosial, dan struktur pembelajaran. Akibatnya, pendidikan multikultural kerap berhenti pada tataran wacana normatif. Kesiapan pendidik menjadi faktor krusial dalam kesenjangan tersebut. Gay (2018) menegaskan pentingnya *culturally responsive teaching*, yaitu kemampuan guru memahami latar belakang budaya peserta didik dan meresponsnya secara pedagogis. Dalam praktiknya, tidak semua guru memiliki kompetensi ini. Bias kultural dan prasangka sosial, baik yang disadari maupun tidak, masih memengaruhi interaksi guru dengan peserta didik serta ekspektasi akademik yang diberikan. Kondisi ini berpotensi melanggengkan ketimpangan dan eksklusi di ruang kelas.

Dari sisi kebijakan, pendidikan multikultural di Indonesia sebenarnya telah memperoleh legitimasi normatif. Kurikulum Merdeka menekankan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila yang mencakup nilai kebinekaan global,

gotong royong, dan keadilan sosial. Secara konseptual, kebijakan ini sejalan dengan prinsip pendidikan multikultural karena mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan partisipasi aktif dalam masyarakat plural (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Namun, dalam implementasinya, nilai-nilai tersebut sering kali belum terintegrasi secara konsisten dalam perencanaan pembelajaran, asesmen, dan budaya sekolah. Orientasi kebijakan pendidikan nasional yang masih kuat pada capaian akademik dan hasil asesmen numerik sering menyisakan ruang terbatas bagi pengembangan nilai multikultural secara mendalam. Pendidikan multikultural membutuhkan proses reflektif dan dialogis jangka panjang yang sulit diukur secara kuantitatif. Akibatnya, sekolah sering memandang pendidikan multikultural sebagai pelengkap, bukan sebagai inti dari tujuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan yang lebih operasional dan kontekstual agar pendidikan multikultural tidak berhenti pada tataran normatif.

Pada tingkat praktik sekolah, pendidikan multikultural perlu diterjemahkan secara konkret sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan. Pada jenjang sekolah dasar, pendidikan multikultural difokuskan pada pengenalan keberagaman dan pembentukan sikap dasar menghargai perbedaan. Peserta didik usia dini masih berada pada tahap berpikir konkret, sehingga pendekatan pembelajaran perlu berbasis pengalaman langsung. Praktik implementatif dapat dilakukan melalui pembelajaran tematik yang mengangkat cerita rakyat dari berbagai daerah, pengenalan ragam budaya lokal, serta kerja kelompok heterogen yang mendorong interaksi antarsiswa. Guru berperan sebagai teladan dalam menunjukkan sikap adil dan empatik. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural untuk membangun kesadaran awal bahwa perbedaan merupakan realitas sosial yang wajar dan bernilai positif (Banks, 2015).

Pada jenjang sekolah menengah pertama, pendidikan multikultural diarahkan pada penguatan pemahaman dan sikap reflektif terhadap perbedaan. Peserta didik mulai mampu melihat perspektif orang lain dan memahami konteks sosial yang lebih luas. Praktik pendidikan multikultural dapat diwujudkan melalui diskusi kelas tentang isu sosial sederhana, studi kasus dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Ilmu Pengetahuan Sosial, serta proyek kolaboratif yang melibatkan lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan semacam ini membantu peserta didik memahami bahwa keberagaman bukan sekadar konsep, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang menuntut sikap adil dan dialogis.

Pada jenjang sekolah menengah atas, pendidikan multikultural perlu diperkuat melalui pengembangan kesadaran kritis. Peserta didik SMA memiliki kemampuan kognitif untuk menganalisis isu sosial yang lebih kompleks. Praktik implementatif dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah yang mengangkat isu intoleransi, diskriminasi, atau ketimpangan sosial dalam konteks lokal dan nasional. Diskusi terbimbing, debat akademik, serta penulisan esai reflektif dapat digunakan untuk mendorong siswa memahami berbagai sudut pandang secara argumentatif dan etis. Kegiatan organisasi siswa dan ekstrakurikuler juga menjadi ruang strategis untuk membangun budaya inklusif melalui kepemimpinan partisipatif, sejalan dengan pandangan Freire (2005) tentang pendidikan sebagai proses pembentukan kesadaran kritis. Di tingkat perguruan tinggi, pendidikan multikultural memiliki ruang yang lebih luas untuk dikembangkan secara sistematis. Mahasiswa sebagai calon intelektual dan pemimpin masa depan perlu dibekali kemampuan analisis kritis terhadap pluralitas dan ketidakadilan sosial. Pendidikan multikultural dapat diintegrasikan melalui kurikulum berbasis isu sosial, pembelajaran lintas disiplin, penelitian kolaboratif, serta program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan

komunitas multikultural. Selain itu, kebijakan kampus yang menjamin ruang aman, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta mekanisme penanganan diskriminasi menjadi elemen penting dalam membangun budaya multikultural di perguruan tinggi (Niето, 2010). Integrasi praktik pendidikan multikultural di semua jenjang tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap jenjang memiliki karakteristik perkembangan peserta didik yang berbeda dan membutuhkan pendekatan pedagogis yang kontekstual. Namun, benang merahnya adalah penanaman nilai keadilan, penghargaan terhadap perbedaan, dan dialog sebagai bagian integral dari proses pendidikan.

Sebagai penutup, pendidikan multikultural merupakan proyek sosial jangka panjang yang menuntut konsistensi kebijakan dan praktik pendidikan. Idealisme pendidikan multikultural memberikan arah normatif tentang pendidikan yang adil, inklusif, dan manusiawi. Realitas pendidikan Indonesia menunjukkan adanya kemajuan kebijakan secara konseptual, namun masih memerlukan penguatan implementasi di tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Tantangan tersebut seharusnya menjadi dasar refleksi kritis dan pembenahan berkelanjutan. Dengan integrasi kebijakan yang lebih operasional serta praktik pendidikan yang kontekstual di setiap jenjang, pendidikan multikultural dapat bergerak dari sekadar wacana ideal menuju praktik nyata yang berkontribusi pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang inklusif dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Banks, J. A. (2015). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (6th ed.). Routledge.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila*. Kemendikbudristek.
- Nieto, S. (2010). *The light in their eyes: Creating multicultural learning communities*. Teachers College Press.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif*. Rineka Cipta



PEMBERDAYAAN KOMUNITAS BANJAR DAN PENINGKATAN KESADARAN LINGKUNGAN MELALUI STORYTELLING DI DESA BUWUN SEJATI-LOMBOK BARAT

Dr. I Wayan Sutama, M.I.Kom.²

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

*“Memerankan “Banjar” dan memanfaatkan storytelling
untuk menghidupkan kearifan lokal menjadi narasi kolektif
yang mendorong aksi nyata pelestarian lingkungan”*

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan biodiversitas dan pluralitas budaya yang luar biasa. Kekayaan tersebut menjadi modal pertumbuhan menuju negara modern. Namun kenyataannya, pertumbuhan yang digadang kerap mengorbankan keberlanjutan ekologis. Kondisi ekologis

² Penulis lahir di Karangasem, 12 Maret 1983, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu, Fakultas Dharma Duta, Brahma Widya dan Dharma Sastra, IAHN Gde Pudja Mataram, menyelesaikan studi S1 di Prodi Penerangan Agama Hindu tahun 2010 dan S2 di Prodi Ilmu Komunikasi Hindu tahun 2016 pada STAHN Gde Pudja Mataram, dan menyelesaikan S3 Prodi Ilmu Komunikasi di Fisip-UNS Surakarta tahun 2025.

tersebut tercermin dari berbagai tantangan pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan sampah, deforestasi, pencemaran air, dan degradasi lingkungan hidup yang kian mengkhawatirkan. Di komunitas lokal tersimpan modal sosial dan kearifan tradisional yang terbukti selama berabad-abad mampu mengelola sumber daya lingkungan secara arif dan kolektif. Isu lingkungan tidak hanya persoalan teknis atau regulasi, namun masalah komunikasi, nilai, dan konstruksi sosial.

Pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan melalui penyuluhan dan kampanye belum maksimal menjangkau dimensi afektif dan nilai-nilai yang dipegang masyarakat. Cara ini cenderung transaksional dan mengabaikan konteks sosio-kultural lokal, sehingga pesan lingkungan tidak terinternalisasi. Salah satu tradisi lisan yang ada *storytelling* atau seni bercerita, sebagai praktik komunikasi tradisional manusia. Bercerita merupakan suatu proses pembangunan makna, penguatan nilai, dan pendorong aksi kolektif.

Realitas komunitas Banjar di Bali dan Banjar dalam masyarakat Sasak di Lombok menjadi laboratorium sosial yang mengeksplorasi integrasi antara pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Pada masyarakat Sasak di Lombok, “Banjar” merujuk pada kelompok sosial yang dibentuk untuk saling membantu dalam acara adat (*begawé*) serta dalam acara-acara penting lainnya seperti pernikahan dan kematian (Hamzani, 2024). Meski berbeda, tetapi sama-sama merepresentasikan modal sosial berupa jaringan kepercayaan, norma timbal balik, dan tindakan kolektif sebagai sebuah pondasi sosial yang kokoh untuk gerakan pemberdayaan dan perubahan perilaku.

Dalam arus globalisasi dan tekanan ekonomi, nilai-nilai kolektif beserta kearifan lokal dalam menjaga lingkungan menghadapi dilema. Masyarakat dihadapkan antara mempertahankan tradisi dan memenuhi kebutuhan ekonomi

sering berujung pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang menghidupkan kembali dan mengkontekstualisasikan kearifan lokal dalam narasi yang relevan. Melalui *storytelling*, pengetahuan ekologis tradisional dapat dihubungkan dengan kesadaran lingkungan kontemporer. Eksperimen ini diterapkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di desa Buwun Sejati, Lombok Barat yang lokasinya berada di kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung.

Komunikasi Pemberdayaan, Storytelling, dan Konstruksi Sosial Realitas

Pemberdayaan komunitas seperti Banjar dalam perspektif komunikasi melibatkan proses dialogis dan partisipatif dengan tujuan bersama terutama meningkatkan kapasitas komunitas untuk mengidentifikasi masalah, mengelola sumber daya, dan mengambil tindakan kolektif (Hamzani, 2024). Komunikasi pemberdayaan bersifat transaksional dan interaktif, dimana komunitas tradisional tidak hanya objek penerima pesan, tetapi subjek aktif yang terlibat dalam memproduksi pengetahuan dan makna. Teori konstruksi realitas sosial dari Berger dan Luckmann (1966) menyatakan realitas, termasuk pemahaman tentang lingkungan dan kewajiban untuk menjaganya, dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang terus-menerus dipelihara melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. *Storytelling* adalah instrumen komunikasi dalam proses objektivasi dan internalisasi. Cerita-cerita, mitos, legenda, dan narasi kolektif yang hidup dalam sebuah komunitas (seperti Banjar) merupakan wahana yang mengobjektifikasi nilai-nilai, norma, dan pengetahuan. Ketika diceritakan kembali, diadaptasi, dan dihidupkan dalam konteks baru seperti isu sampah atau konservasi air, narasi-narasi tersebut menginternalisasikan pemahaman baru ke dalam

kesadaran anggota komunitas. Walter Fisher dalam (Satriya et al., 2021) dengan paradigma naratif-nya menyatakan manusia pada hakikatnya adalah *homo narrans*, makhluk pencerita yang membuat keputusan dan meyakini sesuatu berdasarkan koherensi dan kebenaran naratif suatu cerita.

Dalam ranah pemasaran dan manajemen destinasi, konsep bercerita dikembangkan sebagai alat membangun reputasi, identitas, dan keterikatan emosional sebagai kesatuan wilayah (Hagen, 2008). Aktivitas pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Buwun Sejati Lombok Barat melalui *storytelling* mengadopsi kerangka *manajemen place storytelling* (Bassano et al., 2019) yang terdiri dari tiga tahap: (1) *Storybuilding* (membangun cerita berbasis keunikan, nilai, dan autobiografi tempat), (2) *Storytelling* (menyebarkan cerita melalui saluran media yang tepat, terutama digital), dan (3) *Storylistening* (mendengarkan umpan balik dan melibatkan audiens dalam *co-creation*). Model ini digunakan untuk mengintegrasikan komunikasi, pemasaran, dan pemberdayaan, dimana cerita yang dibangun bukan hanya tentang produk, tetapi tentang transformasi komunitas, revitalisasi nilai lokal, dan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan (Satriya et al., 2021).

Aspek emosional dalam *storytelling* berpeluang membuka keterlibatan masyarakat secara kolektif dimana konten berbasis emosi (seperti kegembiraan, harapan, kebanggaan) mampu membangkitkan minat dan keterlibatan (Kemp et al., 2018; Barry & Gironde, 2018). Cerita yang mampu menyentuh hati, seperti kebanggaan akan desa yang hijau, keprihatinan pada sungai yang tercemar, atau kegembiraan akan hasil gotong royong, lebih efektif memotivasi tindakan kolektif masyarakat daripada berbagai peraturan formal. Namun demikian, terdapat keterbatasan seperti: (1) Belum banyak penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji eksplorasi dan pemanfaatan *storytelling*, baik tradisional lisan

maupun digital sebagai strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, (2) Belum banyak model integratif yang menyatukan kerangka teoretis *digital place storytelling* sebagai modal sosial untuk tujuan advokasi lingkungan.

“Banjar” di Lombok, berperan dalam kehidupan sosial terutama dalam acara adat. Tradisi *begawé* dibangun di atas nilai gotong royong, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, yang membentuk jaringan sosial yang kuat. Nilai-nilai serupa *tat twam asi*, *menyama-braya* (persaudaraan), dan *tri hita karana* (harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam) telah terinternalisasi dan dipraktikkan. Namun, dalam konteks modern, narasi-narasi sakral ini seringkali teralienasi dari masalah lingkungan praktis sehari-hari. Tantangannya adalah menghidupkan kembali dan merekontekstualisasi kearifan ini menjadi narasi yang relevan, dimana struktur sosial Banjar dapat menjadi kendaraan yang ideal.

Storytelling berkontribusi pada motif fundamental manusia dalam memahami, mengorganisasi, dan menyampaikan realitas (Fisher, 1984). Lebih lanjut Fisher menegaskan manusia lebih mudah diyakinkan oleh kebenaran naratif daripada kebenaran logis-argumentatif. Model *manajemen place storytelling* yang diadaptasi dari *corporate storytelling*, potensial diadopsi melalui tiga tahap iteratif: (1) *Storybuilding* yaitu tahap awal dimana cerita dibangun dengan menggali narasi-narasi kolektif banjar—sejarah terbentuknya, peristiwa heroik masa lalu, nilai inti, dan kearifan lokal terkait alam. (2) *Storytelling* yaitu tahap distribusi dan penyampaian narasi melalui saluran yang tepat. Pendekatan multimodal dan multigenerasi melalui saluran lisan yaitu cerita disampaikan dalam *paruman*, upacara (*sangkep*), atau melalui seni pertunjukan seperti *wayang kulit* atau *gending* dengan tema lingkungan. Cerita melalui media digital untuk *visual storytelling* juga potensial dilakukan (Kartimin et al., 2025).

Konten berupa video pendek dokumenter proses bersih-bersih, infografis tentang pemilahan sampah atau testimoni dari anggota Banjar, menciptakan memori kolektif baru. (3) *Storylistening* yakni mendengarkan umpan balik dan melibatkan komunitas dalam kreasi bersama merupakan manifestasi dari komunikasi partisipatif yang dilakukan melalui keterlibatan di grup media sosial, forum refleksi pasca-kegiatan, serta mendorong *user-generated content* (UGC) dengan membagikan foto/video aksi lingkungan mereka sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut, integrasi antara modal sosial berupa Banjar, strategi storytelling, dan komunikasi pemberdayaan menjadi kerangka potensial dan aplikatif untuk mendorong peningkatan kesadaran dan aksi lingkungan yang berkelanjutan. Struktur sosial Banjar yang kohesif merupakan media sosiokultural untuk mobilisasi kolektif. Komunikasi lingkungan berbasis storytelling yang meliputi *storybuilding*, *storytelling*, dan *storylistening* efektif dilakukan daripada metode instruktif karena menyentuh dimensi emosional, mengonstruksi makna secara kolektif, dan membangun identitas baru yang pro-lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital berperan sebagai pendorong dan perekam kemajuan yang mendorong lahirnya kreasi baru.

Daftar Pustaka

- Bassano, C., Barile, S., Piciocchi, P., Spohrer, J. C., Iandolo, F., & Fisk, R. (2019). *Storytelling about places: Tourism marketing in the digital age. Cities*, 87, 10–20.
- Hagen, O. (2008). *Driving environmental innovation with corporate storytelling: is radical innovation possible without incoherence? International Journal of Innovation and Sustainable Development*, 3(3/4), 217.
- Hamzani, Y. (2024). Community Economic Empowerment Through the Implementation of Banjar Traditional Values. *Jurnal Manajemen Dan Budaya*, 4(2), 81–101. <https://doi.org/10.51700/manajemen.v4i2.691>
- Kartimin, W., Adnantara, I. G. K. F., Wiantara, N., Sulastri, P., Sunata, I. M., Yudana, Made, N., Junipisa, E., Putri, K., & Nainggolan, P. (2025). *Optimalisasi Potensi Desa Berbasis Kearifan Lokal Kelurahan Abianbase Bali Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Riset Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 2.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon und Schuster, 2001. ISBN. *Policy Analysis*
- Satriya, C. Y., Indrayani, H., Agustia, M., & Putri, N. (2021). *Membedah Strategi Komunikasi Pemberdayaan Pasar Papringan Melalui Digital Place Storytelling. In Dynamic Media, Communications, and Culture: Conference Proceedings*.



SOSIALISASI BIJAK BERMEDIA SOSIAL ERA DIGITAL DI SMP NEGERI 7 GORONTALO

Dr. Moh. Imron Rosidi, S.Pd., M.Pd.³

Universitas Negeri Gorontalo

“Sosialisasi bijak bermedia sosial meningkatkan literasi digital, etika, keamanan, dan tanggung jawab digital peserta didik”

Karakteristik Era digital ditandai oleh kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dunia pendidikan. Pada saat ini media sosial merupakan teknologi digital yang paling banyak digunakan oleh peserta didik di sekolah menengah pertama, melalui kegiatan bermedia sosial peserta didik dapat berinteraksi, mengumpulkan informasi, dan mengembangkan kompetensi diri (Marini et al., 2023). Akan tetapi, penggunaan media sosial

³ Penulis lahir di Banyuwangi, 21 Mei 1987, merupakan Dosen Tetap di Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, menyelesaikan studi S1 di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember tahun 2013, menyelesaikan S2 di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret tahun 2015, dan menyelesaikan studi S3 di Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2024.

di kalangan peserta didik tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang mendalam mengenai etika bermedia sosial. Contohnya, penyebaran informasi palsu (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), *cyber bullying*, serta kecanduan media sosial menjadi permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Keadaan ini menunjukkan bahwa literasi digital peserta didik masih perlu ditingkatkan terutama dalam cara bijak bermedia sosial (Arifina et al., 2024; Randyantokho et al., 2024).

Sebagai lembaga pendidikan SMP Negeri 7 Gorontalo berperan penting dalam membentuk karakter dan sikap peserta didik di era digital. Oleh karenanya, kegiatan sosialisasi bijak bermedia sosial menjadi strategi yang efektif dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada peserta didik mengenai penggunaan media sosial yang aman, nyaman, dan beretika. Kegiatan sosialisasi bijak bermedia sosial di SMP Negeri 7 Gorontalo sebagai upaya meningkatkan literasi digital dan membentuk perilaku bermedia sosial yang efektif di kalangan peserta didik.

Konsep Bijak Bermedia Sosial di Lingkungan Peserta Didik

Bijak bermedia sosial merupakan kemampuan peserta didik dalam menggunakan media sosial secara sadar, etis, dan bertanggung jawab. Sikap bijak bermedia sosial mencakup kemampuan peserta didik dalam memilih informasi, beretika komunikasi, serta menyadari dampak dari setiap aktivitas dalam bermedia sosial. Bijak bermedia sosial di era digital menjadi bagian penting dari literasi digital yang harus dimiliki oleh peserta didik (Sihotang et al., 2024; Neite, 2024). Bijak bermedia sosial dalam konteks pendidikan merupakan bagian dari literasi digital yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Peserta didik harus memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menerima dan membagikan informasi agar tidak

mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau hoaks. Selanjutnya, peserta didik juga perlu memiliki pengetahuan tentang pentingnya menjaga privasi dan menghormati hak-hak orang lain ketika berinteraksi di media sosial (Haryadi et al., 2023; Halawa et al., 2025).

Etika bermedia sosial menjadi bagian penting yang harus diajarkan sejak dini. Penggunaan tutur kata yang sopan dan santun, sikap saling menghormati serta menghargai pendapat orang lain, dan kesadaran akan dampak sosial dari unggahan dan komentar di media sosial merupakan bagian dari etika digital. Setelah memahami konsep bijak bermedia sosial, peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan media sosial sebagai media yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta didik (Hanifah et al., 2024; Bate'e et al., 2025).

Pelaksanaan Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial di SMP Negeri 7 Gorontalo

Sosialisasi bijak bermedia sosial di SMP Negeri 7 Gorontalo dilaksanakan sebagai bentuk pembimbingan dan pendampingan kepada peserta didik dalam menghadapi tantangan era digital. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai keuntungan dan kerugian penggunaan media sosial, serta membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang etika bermedia sosial (Srg, 2024).

Materi yang disajikan pada kegiatan sosialisasi ini meliputi pengenalan media sosial, dampak positif dan negatif penggunaannya, cara mengenali hoaks, pencegahan perundungan di dunia maya, serta pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi.

Penyampaian materi dilakukan dengan metode interaktif, seperti diskusi, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus yang terdapat di lingkungan sekitar peserta didik (Sari et al., 2025).

Gambar 1. Foto Kegiatan Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial Era Digital di SMP Negeri 7 Gorontalo



Sumber: (Dokumentasi Pengabdian, 2023)

Kegiatan sosialisasi ini berjalan secara optimal dan menunjukkan hasil bahwa peserta didik mulai menyadari pentingnya bersikap bijak dalam bermedia sosial. Peserta didik menjadi lebih mengerti akan dampak positif dan negatif dari aktivitas di media sosial ataupun ruang digital dan terdorong untuk menggunakan media sosial secara lebih bijak. Sosialisasi ini juga mendorong para pendidik untuk berperan aktif dalam mendidik dan memantau penggunaan media sosial peserta didik di lingkungan sekolah (Yudha et al., 2023).

Kegiatan sosialisasi bijak bermedia sosial era digital di SMP Negeri 7 Gorontalo merupakan usaha dalam peningkatan literasi digital dan membentuk karakter peserta didik yang bijak dalam bermedia sosial. Bila penggunaan media sosial dilakukan secara tepat, maka akan menjadi sarana yang menunjang proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta didik (Sari et al., 2024). Melalui kegiatan sosialisasi yang terprogram dengan baik, peserta didik

diharapkan dapat memahami etika bermedia sosial serta dampak dari penggunaan media sosial tersebut. Oleh karena itu, sekolah seharusnya berperan aktif dalam menciptakan peserta didik yang cakap beretika, dan dapat menggunakan teknologi secara bijak di era digital.

Daftar Pustaka

- Arifina, A. S., Astuti, D. D., Dinata, C. N. F., Prasetyaningrum, W., & Santosa, E. P. L. A. (2024). Sosialisasi Netiket Guna Meningkatkan Pemahaman Bijak Bermedia Sosial. *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 271–284.
- Bate'e, M. M., Wijaya, A., Lafau, E., Lawolo, J., Lawolo, M. J., Anugrah, P. R., Gulo, S., & Laia, S. (2025). Bijak Bermedia Sosial untuk Membangun Karakter Positif di Era Digital di SMP Swasta Kristen Tomosa 1 di Desa Saewe Kecamatan Gido Kabupaten Nias. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 1123–1127.
- Halawa, L. J., Hulu, P. H., & Halawa, O. Z. (2025). Generasi Bijak Bermedia Sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 830–833.
- Hanifah, R., Fuadi, F., Zahiroh, N. W., & Ardiyansa, M. (2024). Sosialisasi Bina Medsos (Bijak Gunakan Media Sosial) Pada Siswa SMK. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(2), 1810–1816.
- Haryadi, Rakhmawati, D., Kusniati Retno, Bustanuddin, & Priskap, R. (2023). Sosialisasi Cara Bijak Menggunakan Media Sosial di Era Digitalisasi Elektronik kepada Siswa SMK N 1 Muaro Jambi. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(2), 25–33.

- Marini, M., Yanti, H. A., & Salas, H. J. (2023). Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial di Era Digital Pada Remaja di MTSN 1 Lampung Utara. *Jurnal Abdimas*, 2(1), 45–50.
- Neite, F. (2024). Sosialisasi Generasi Digital Bijak Bermedia Sosial Pada Remaja Sektor Elim di Desa Rambatu. *Pattimura Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 350–354.
- Randyantokho, R., Meita Anindya Safitri, Sukmawati Waluyo Putri, Lia Oktavya Susilo Putri, Rizal Adiyatma, Lailatul Fitria, Kartika Damayanti, Laelatul Aina Fadhillah, Aulia Ines Mubiarto, M Fadhil Zaeruki, & Muhammad Fachrie. (2024). Literasi Digital Bijak Bermedia Sosial Di Desa Kaliangkrik. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1), 96–106.
- Sari, N. I., Septiani, E., & Masruroh, A. (2025). Bijak dalam Menggunakan Sosial Media pada Kalangan Remaja di SMAN 80 Jakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3755–3759.
- Sari, R. Y., Markus, S. N., Nurhayati, S., Ari, N. I., & Sinaga, M. R. (2024). Sosialisasi Bijak Dalam Bermedia Sosial bagi Siswa Kelas V di SDN Krebet. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(9), 1181–1185.
- Sihotang, H. N. J., Yunistita, Sitepu, F. N., Tarigan, M. P., & Tarigan, A. S. (2024). Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial Tanpa Melanggar UU ITE Pada Anak-Anak Di SD Negeri 040459 Berastagi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11), 3097–3101.
- Srg, R. R. (2024). Membangun Keterampilan Internet Cerdas dan Bijak Bermedia Sosial Bagi Anak dan Remaja Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi dan Pencegahan Kejahatan Siber. *Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika Volume.*, 6(6), 101–109.

Yudha, E. P., Nurislaminingsih, R., & Fatmawati, F. U. (2023).
Sosialisasi Cara Bijak Bermedia Sosial. *Abdimas Galuh*,
5(2), 1113–1121.



MENYIKAPI *OVERTOURISM* BAGI PENGELOLA PARIWISATA

Dr. Damiasih, MM., M.Par.⁴

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

“Kegiatan berwisata semakin dibutuhkan Masyarakat seiring dengan tuntutan masyarakat namun diperlukan antisipasi overtourism (kelebihan kapasitas jumlah pengunjung) bagi pengelola usaha pariwisata”

Arti *Overtourism*

Berwisata saat ini merupakan kebutuhan manusia sebagai penyeimbang dari segala kesibukan sehari-hari. Kegiatan yang bertujuan untuk menyegarkan pikiran ini memiliki beragam jenis: wisata kuliner, wisata alam, wisata buatan, atau wisata bencana. Dengan masifnya pertumbuhan wisata di Indonesia, maka akan membawa keuntungan bagi para pengelola usaha pariwisata khususnya dari sisi ekonomi, namun disisi yang lain, pertumbuhan bisnis pariwisata dapat

⁴ Damiasih, sebagai dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, lahir di Nganjuk, Jawa Timur. Pendidikan S1 Bahasa Perancis di FBS Universitas Negeri Yogyakarta, S2 Manajemen di STIE Mitra Indonesia, S2 Pariwisata di STIEPARI Semarang, dan S3 Manajemen di UKSW Salatiga. Penulis aktif dalam menulis baik artikel di media cetak, jurnal, atau buku baik cetak maupun *e-book*.

melahirkan beberapa permasalahan yang mengancam kelestarian lingkungan, infrastruktur, dan kenyamanan warga sekitar, yang lebih dikenal dengan istilah *overtourism*. Gejala terjadinya fenomena *overtourism* ini terjadi di destinasi wisata yang padat pengunjung dan mempunyai ancaman serius untuk masa depan bangsa. Secara global *Overtourism* dapat diartikan sebagai suatu fenomena di mana jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi melebihi kapasitas tempat tersebut untuk menampungnya dengan nyaman (Traveloka Blog, 2024). Artinya dalam membangun pariwisata harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Penyebab *Overtourism*

Fenomena *overtourism* akan terjadi suatu saat pada destinasi-destinasi yang cukup terkenal dan hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal: Pertama, adanya peningkatan jumlah wisatawan yang meningkat secara signifikan dalam kurun waktu yang terus-menerus karena faktor kemudahan transportasi atau teknologi informasi. Kedua, kurangnya perencanaan yang terstruktur dalam mengelola jumlah wisatawan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal juga memicu munculnya *overtourism*. Ketiga, keterbatasan infrastruktur (transportasi, akomodasi, dan fasilitas lain yang terkait tidak dapat menampung semua kepentingan wisatawan). Keempat, promosi yang tidak terkendali dan tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan juga akan memicu lahirnya fenomena *overtourism*. Kelima, kurangnya kesadaran wisatawan tentang dampak negatif *overtourism* dan pentingnya menjaga lingkungan dan masyarakat lokal. Keenam, kebijakan pariwisata yang tidak efektif dan tidak mempertimbangkan dampak *overtourism*. Ketujuh, perubahan gaya hidup masyarakat lokal yang dipengaruhi oleh pariwisata (perubahan gaya hidup).

Kedelapan, keterlibatan sektor swasta yang tidak terkendali dalam pengembangan pariwisata juga dapat memicu terjadinya *overtourism*.

Dampak *Overtourism*

Indonesia yang memiliki banyak daerah tujuan wisata harus benar-benar memperhatikan dampak dari *overtourism* karena akan merugikan bangsa dan generasi yang akan datang. Salah satu contoh *overtourism* di Indonesia terjadi di Bali yang dapat dikenali dengan banyaknya wisatawan nusantara dan mancanegara. Dengan banyaknya pengunjung, maka kesibukan masyarakat juga meningkat. Dan bila tidak dikelola dengan baik, akan menjadi ancaman kerusakan lingkungan karena akan muncul polusi, lingkungan yang tidak sehat dan kesulitan masyarakat sekitar dalam beraktifitas. Fenomena ini tidak selamanya membawa keburukan, akan tetapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat karena perekonomian akan meningkat, namun bahaya juga mengancam bila tidak disadari oleh para pengelola usaha pariwisata ini.

Beberapa contoh dampak buruk dengan adanya fenomena *Overtourism*: 1) Kerusakan Lingkungan: Peningkatan jumlah wisatawan dapat menyebabkan polusi, kerusakan habitat, dan kehilangan aneka ragam hayati. 2) Kepadatan dan Kemacetan: Jumlah wisatawan yang terlalu banyak dapat memicu kemacetan di destinasi wisata sehingga pengunjung menjadi kurang nyaman dan dapat mengurangi kualitas pengalaman berwisata. 3) Dampak pada Masyarakat Lokal: *Overtourism* ini dapat menyebabkan kenaikan harga properti (rumah, lahan), kesulitan akses ke fasilitas umum, dan memicu perubahan gaya hidup masyarakat lokal. 4) Kehilangan Identitas Budaya: Destinasi Pariwisata yang terlalu komersial dapat memicu kehilangan identitas budaya dan keaslian lokal.

Antisipasi *Overtourism*

Untuk mengantisipasi fenomena *Overtourism* perlu dilakukan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang berbasis pada lingkungan dan melibatkan masyarakat, maka kerusakan lingkungan dapat dicegah dan secara otomatis dapat menyelamatkan anak cucu kita.

Langkah yang dapat dilakukan pemerintah khususnya pengelola usaha wisata antara lain: 1) Membatasi jumlah pengunjung (menggunakan sistem kuota atau pembatasan jumlah tiket masuk) sehingga pengunjung / wisatawan dapat dikelola dengan baik. 2) Mengembangkan pariwisata berkelanjutan (mendorong pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan lebih mengedepankan pelestarian lingkungan dan keaslian budaya. 3) Meningkatkan kesadaran wisatawan (mengedukasi para wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan budaya lokal). Fenomena *Overtourism* menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengelola pariwisata dan masyarakat. Tanpa adanya kesinambungan dan sinergitas di antara pilar-pilar tersebut, maka pariwisata justru akan menjadi ancaman kelestarian lingkungan untuk masa yang akan datang.

Upaya untuk memberikan edukasi kepada para pengelola usaha pariwisata sebelum terjadi bencana adalah: 1) Mengadakan pelatihan dan *workshop* tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan pelatihan ini para pengelola, masyarakat, dan pengunjung / wisatawan dapat diedukasi secara benar, sehingga lingkungan yang sehat dapat terselamatkan. 2) Menyediakan informasi dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan dampak negatif dari kerusakan lingkungan. 3) Mengembangkan program pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan secara komprehensif (program pengelolaan sampah, program konservasi air, dan program

pengelolaan energi). 4) Mengadakan audit lingkungan untuk mengetahui dampak lingkungan dari usaha pariwisata dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. 5) Mengembangkan kebijakan lingkungan yang jelas dan efektif untuk mengatur pengelolaan lingkungan pada usaha pariwisata. 6) Mengadakan kerjasama dengan lembaga lingkungan dan organisasi yang peduli dengan lingkungan untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dalam pengelolaan lingkungan. 7) Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan (sistem pengelolaan sampah, sistem pengelolaan air, dan sistem pengelolaan energi). 8) Mengadakan pelatihan untuk karyawan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan cara-cara mengelola lingkungan yang efektif. 9) Mengembangkan program edukasi untuk wisatawan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan cara-cara mengelola lingkungan yang efektif. 10) Mengadakan *monitoring* dan evaluasi secara teratur untuk mengetahui efektivitas program pengelolaan lingkungan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Dengan langkah-langkah tersebut, para pengelola pariwisata dapat lebih nyaman dalam menjalankan usahanya dan semua komponen dapat teredukasi dengan baik sehingga kerusakan lingkungan dapat diantisipasi.

Pengaruh Negatif *Overtourism*

Indonesia sangat terkenal dengan budaya khas yang adi luhung dan dihormati. Dengan adanya perkembangan teknologi yang masif dan pengaruh budaya asing yang terus-menerus, maka bukan hal yang tidak mungkin suatu saat budaya lokal akan tergerus oleh budaya asing. Pengaruh negatif adanya *overtourism* terhadap budaya lokal juga dapat terjadi karena adanya komersialisasi budaya (menjual budaya

lokal sebagai komoditi kepada wisatawan sehingga keaslian budaya akan hilang). Perubahan Gaya Hidup (masyarakat lokal dapat merubah gaya hidup mereka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan sehingga identitas budaya lokal akan tergerus). Kehilangan Tradisi (tradisi dan kebiasaan lokal dapat menghilang karena sudah tidak diterapkan lagi dalam kesehariannya). Pengaruh Budaya Asing (pengaruh budaya asing yang masif akan memengaruhi budaya lokal dan lama kelamaan identitas budaya lokal akan hilang). Kehilangan Bahasa (bahasa lokal masyarakat akan hilang karena tidak lagi digunakan dalam komunikasi sehari-hari karena menyesuaikan kebutuhan wisatawan). Perubahan Arsitektur (arsitektur asli masyarakat yang mengandung nilai tinggi dan penuh makna akan menghilang dan diganti sesuai kebutuhan wisatawan). Kehilangan Identitas (masyarakat lokal akan kehilangan identitas budaya karena pengaruh budaya asing dan komersialisasi budaya). Konflik Budaya (*overtourism* dapat memicu konflik budaya antara masyarakat lokal dan wisatawan sehingga berakibat hilangnya harmoni).

Kesimpulan

Fenomena *overtourism* memiliki dampak yang buruk terhadap keberlangsungan pariwisata khususnya pariwisata di Indonesia. Sebagai salah satu negara tujuan wisata di dunia, Indonesia yang kaya akan aset dan budaya yang sangat tinggi nilainya, sudah sepatutnya pariwisata dikelola dengan memperhatikan dampak buruk yang akan timbul kedepan. Kolaborasi secara komprehensif antara pemerintah, para pengelola, dan masyarakat dapat mengurangi resiko kerusakan lingkungan, sehingga pariwisata Indonesia akan terus terjaga dan tidak khawatir akan terjadinya fenomena *overtourism*.

Daftar Pustaka

Kemenparekraf, 2025, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029

Traveloka, 2024

Tourismforus.com, 2024.



KEARIFAN LOKAL DALAM SENI PERTUNJUKAN SEBAGAI ASET PARIWISATA BUDAYA LOMBOK TIMUR

Dr. Yosef Adityanto Aji, S.Sn., MA.⁵

Institut Seni Indonesia Yogyakarta

“Keberadaan seniman tidak hanya berperan sebagai penerus kehidupan seni pertunjukan tradisi, tetapi turut menyangga kehidupan ekonomi masyarakat di Lombok Timur”

Pulau Lombok merupakan salah satu di antara pulau-pulau yang termasuk di dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu wilayah yang mempunyai potensi khusus dalam beberapa aspek. Di antara aspek-aspek yang memiliki potensi khusus adalah

⁵ Penulis lahir di Yogyakarta, 3 Mei 1982, merupakan dosen di Prodi Teater Musikal dan Jurusan Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Penulis juga menjadi dosen di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Penulis menyelesaikan studi S1 di Jurusan Tari, ISI Yogyakarta tahun 2007, menyelesaikan S2 di Pasca Sarjana Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, UGM Yogyakarta tahun 2010, menyelesaikan S3 di Program Doktor Pengkajian Seni, ISI Yogyakarta tahun 2020.

budaya serta lingkungan alam. Berbagai macam suku tinggal berdampingan dan ada pula yang membaaur bersama di wilayah tersebut. Suku Sasak merupakan kelompok etnis terbanyak yang berada di Lombok Timur, seperti juga di seluruh Pulau Lombok. Masyarakat Sasak tersebar baik di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, maupun Lombok Timur. Bentuk seni pertunjukan yang berkembang dan sering dijumpai di kalangan masyarakat Lombok antara lain *Gendang Beleg*, *Qasidah Rebana*, *Jangger*, *Wayang Sasak*, *Memaos*, *Cilokak*, *Rudak*, *Kecimol*, dan *Peresean*.

Berbagai bentuk seni pertunjukan tersebut mengalami kontinuitas dan perubahan. Kontinuitas dan perubahan atau perkembangannya, antara lain dimungkinkan karena dampak arus globalisasi termasuk juga dampak pariwisata. Bentuk-bentuk seni pertunjukan yang berkembang sebagai sajian wisatawan, terutama wisatawan mancanegara disebut sebagai *art by metamorphosis*. Seni yang telah mengalami metamorfose tidak serupa dengan seni yang diciptakan untuk kepentingan masyarakat setempat yang disebut sebagai *art by destination*. Seni yang sudah mengalami metamorfose karena untuk kepentingan wisatawan ini juga disebut seni akulturasi atau seni pseudo-tradisional. R.M. Soedarsono (1999) menyatakan bahwa seni pertunjukan yang sudah mendapat dampak dan dikemas sebagai seni pertunjukan pariwisata bukan lagi sajian untuk masyarakat setempat (yang seringkali masih bernilai sakral dan magis). Akan tetapi seni pertunjukan tersebut memang dimaksudkan sebagai komoditas bagi masyarakat yang tinggal di tempat pertunjukan itu sebagai wisatawan.

Dampak pariwisata yang menyentuh wilayah Pulau Lombok sudah terasa setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir. Lombok Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki tidak sedikit seni pertunjukan. Berbagai macam seni pertunjukan bernaung di bawah sanggar-sanggar seni

yang tumbuh menjamur di bagian timur pulau tersebut. Salah satu wilayah ini, yaitu Desa Lenek Tengah Kecamatan Aikmel merupakan lahan pertumbuhan yang subur bagi seni pertunjukan dan juga seni kerajinan. Desa ini seringkali juga disebut-sebut sebagai desa budaya, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh masyarakat di luar Kabupaten Lombok Timur. Hampir setiap kecamatan di Lombok Timur memiliki potensi seni pertunjukan dengan keunikan masing-masing. Misalnya, sembilan belas dari dua puluh kecamatan melangsungkan musik tradisi yang disebut *Gendang Beleg*. Seni pertunjukan yang juga banyak diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur adalah *Cilokak* dan *Qasidah Rebana*. Selain seni pertunjukan, seni kerajinan tradisional juga terdapat di beberapa desa. Di samping itu, alam yang indah, seperti pantai dan pegunungan juga merupakan kekayaan yang sering dikunjungi wisatawan seiring dengan seni pertunjukan dan kerajinan.

Sanggar seni yang cukup aktif menyajikan pertunjukan wisata di Lombok Timur, khususnya di Desa Lenek Tengah Kecamatan Aikmel adalah yang bernama *Bao Daya*. Anggota sanggar seni *Bao Daya* adalah kerabat dekat dalam keluarga. Sanggar yang dipimpin oleh Mamiq Atun ini adalah sanggar seni yang melatih dan mengelola bentuk-bentuk seni pertunjukan. Seni pertunjukan yang dilatihkan dan dikelola dimaksudkan untuk bermacam-macam kepentingan. Dapat dibedakan dua kepentingan yang ditangani, yaitu untuk memeriahkan hajatan tertentu dan untuk ditampilkan di hadapan wisatawan. Sanggar seni *Bao Daya* sering mengadakan pementasan dilakukan untuk kepentingan wisatawan dan biasanya dibicarakan dengan pemandunya. Hal-hal yang dibicarakan antara lain meliputi tempat dan waktu pementasan, bentuk seni pertunjukan, durasi pementasan, dan yang tidak kalah penting adalah biaya yang diperlukan untuk pementasan. Permintaan pentas datang dari beberapa pemandu wisata yang singgah ke Pulau Lombok dan mengajak

wisatawan untuk menyaksikan bermacam-macam kesenian setempat, termasuk seni pertunjukan. Melalui pemandu wisata inilah wisatawan mengenal bermacam-macam seni pertunjukan yang ditampilkan oleh sanggar seni *Bao Daya*.

Penampilannya bisa dilaksanakan di kediaman pimpinan sanggar, yaitu di tempat Mamiq Atun yang juga berfungsi sebagai sanggar atau dapat juga dilaksanakan di tempat tertentu yang dipilihkan oleh pemandu wisata. Wisatawan yang menyaksikan penampilannya datang dari luar maupun dalam negeri. Dalam kesempatan demikian, beberapa perajin turut menjajakan barang-barang kerajinan hasil industri rumah tangga. Mula-mula hanya tetangga sekitar yang menjajakannya, tetapi kadang-kadang datang pula perajin dari desa-desa lain. Sanggar seni *Bao Daya* juga banyak melaksanakan pementasan yang ditujukan untuk kepentingan mengisi acara-acara resmi di berbagai tempat yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan swasta. Kelompok ini misalnya diminta berpentas untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan, Maulud Nabi, dan lain-lainnya. Sanggar seni ini mempresentasikan seni dan budaya Lombok Timur juga ke luar wilayah Lombok Timur. Bahkan pada tahun 1987 Mamiq Atun bersama-sama dengan beberapa orang anggota kelompoknya pernah mengikuti misi kesenian ke Jepang. Dalam rentang tujuh tahun menjelang tahun 2000an, yaitu antara 1991—1998, beberapa hotel dan penginapan di Pantai Senggigi, Lombok Barat mengundang secara rutin sanggar seni *Bao Daya*.

Sejak tahun 1998 kelompok kesenian ini sudah tidak lagi mengadakan pementasan secara rutin di hotel-hotel di pantai Senggigi. Alasan yang disampaikan oleh pihak hotel adalah kehadiran wisatawan yang tidak lagi sebanyak sebelumnya. Tampak bahwa keberlanjutan kehidupan seni pertunjukan ini juga tergantung dari keberlanjutan pendukungnya. Barangkali beberapa di antara pendukung seni pertunjukan tersebut yang

mulai meninggalkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Brandon, yaitu bahwa pada masanya di Asia Tenggara seni pertunjukan bukan hanya didukung oleh komunitasnya tetapi juga mendapat dukungan dari pemerintah, dukungan komersial, dan dukungan komunal. Kalaupun komunitasnya masih mendukung, tetapi mungkin dukungan pemerintah dan komersial mulai berkurang. Meskipun demikian, kelompok *Bao Daya* masih melanjutkan pementasan untuk bermacam-macam kepentingan, termasuk juga untuk wisatawan yang akhir-akhir ini mulai berkunjung ke desa mereka lagi.

Keberadaan sanggar seni *Bao Daya* di tengah masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerus kehidupan seni pertunjukan tradisi, tetapi turut menyangga kehidupan ekonomi masyarakat. Akan tetapi sayang imbalan yang diterima yang seharusnya masih dapat ditingkatkan, saat ini masih kurang memadai. Barangkali dengan pengelolaan yang lebih baik, maka dapat diharapkan peningkatan kualitas seni pertunjukan yang ditampilkan. Dengan pembenahan pengelolannya dimungkinkan juga peningkatan pendapatan bagi anggotanya.

Daftar Pustaka

- Dana, I Wayan, “*Studi Eksploratif Seni Pertunjukan Lombok Timur*”, laporan penelitian Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2002.
- Hadi, Y., Sumandiyo, *Kajian Tari Teks dan Konteks*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.

Kusmayati, A.M. Hermien, “Studi Eksploratif Seni Pertunjukan Lombok Tengah”, laporan penelitian Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2002.

Negara, A.A. Putra dan Mardjijo, “Studi Eksploratif Seni Pertunjukan Lombok Barat”, laporan penelitian Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2002.

Santoso, ed., *Mencermati Seni Pertunjukan II: Perspektif Pariwisata, Lingkungan, dan Kajian Seni Pertunjukan*, Surakarta: Kerjasama The Ford Foundation & Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta, 2004.

Soedarsono, R.M., *Seni Pertunjukan dan Pariwisata*, Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 1999.

Supratno, Haris, “Wayang Sasak Lakon Dewi Rengganis dalam Konteks Perubahan Masyarakat di Lombok: Kajian Sosiologi Kesenian”, disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1996.

Suwadi, Lalu, dkk., “Deskripsi Tari Gendang Beleg Daerah Nusa Tenggara Barat”, Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, 1991.



TIRANI KULTURAL

Samuel Bora Lero, S.IP.,M.I.P.⁶

Universitas Stella Maris Sumba

*“Manusia lahir dari budaya hidup dalam budaya
dan meninggalpun dalam keadaan berbudaya”*

Adat, Kekuasaan Simbolik, dan Reproduksi Ketimpangan Sosial

Sumba Barat Daya merupakan wilayah di Indonesia Timur yang hingga kini memperlihatkan kuatnya dominasi struktur adat dalam kehidupan sosial masyarakat. Sistem kepercayaan lokal, organisasi sosial berbasis kabissu/kabihi, serta praktik-praktik adat seperti belis, ritus kematian, dan mekanisme penyelesaian konflik adat menjadi fondasi utama dalam mengatur relasi sosial. Dalam konteks ini, budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas kolektif, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan. Sejumlah pengamat sosial Indonesia menegaskan bahwa budaya adat sering kali tidak berdiri netral, melainkan sarat dengan relasi kuasa yang timpang (Koentjaraningrat, 2009; Sairin, 2002). Ketika adat diposisikan

⁶ Penulis lahir di Sumba, 18 Maret 1990, merupakan Dosen di Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik UNMARIS Sumba, menyelesaikan studi S1 di FISIP Universitas Warmadewa Bali Tahun 2017 dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana STPMMD 'APMD' Jogjakarta Program Studi Ilmu Pemerintahan tahun 2019.

sebagai kebenaran absolut yang tidak dapat dipertanyakan, maka budaya berpotensi berubah menjadi alat dominasi. Fenomena inilah yang dapat dipahami sebagai tirani kultural, yaitu kondisi ketika norma dan nilai budaya digunakan secara hegemonik untuk mengontrol masyarakat serta melanggengkan ketidakadilan sosial.

Tulisan ini bertujuan menganalisis tirani kultural di Sumba Barat Daya dengan menempatkan adat sebagai arena kekuasaan simbolik. Analisis difokuskan pada bagaimana praktik budaya direproduksi, siapa yang diuntungkan, serta dampaknya terhadap kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan generasi muda.

Budaya sebagai Struktur Sosial dan Kekuasaan

Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dipelajari serta diwariskan secara sosial. Dalam masyarakat adat, budaya berfungsi sebagai pedoman hidup sekaligus alat pengendali sosial. Namun, ketika budaya dilembagakan secara kaku, ia dapat berubah menjadi mekanisme penindasan yang tidak disadari. Sairin (2002) menjelaskan bahwa perubahan sosial di masyarakat tradisional sering terhambat oleh kuatnya otoritas adat. Otoritas ini tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menentukan distribusi status dan sumber daya. Dalam konteks Sumba Barat Daya, elit adat memiliki legitimasi budaya untuk mengatur kehidupan sosial, sehingga relasi kuasa menjadi tidak seimbang. Budaya dalam posisi ini bekerja sebagai kekuasaan simbolik, yakni kekuasaan yang diterima secara sukarela karena dianggap sebagai kewajiban sosial (Syamsuddin, 2017).

Dengan demikian, masyarakat yang dirugikan oleh adat sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami penindasan.

Struktur Sosial Adat di Sumba Barat Daya

Masyarakat Sumba Barat Daya secara tradisional tersusun dalam struktur sosial hierarkis yang ditentukan oleh asal-usul genealogis dan keanggotaan kabissu/kabihu. Status sosial memiliki pengaruh besar terhadap posisi seseorang dalam pengambilan keputusan adat, akses terhadap tanah, serta legitimasi sosial.

Penelitian tentang politik lokal di Indonesia Timur menunjukkan bahwa elit adat sering berperan ganda sebagai pemimpin budaya dan aktor politik lokal (Widjojo, 2013). Dalam konteks ini, adat menjadi sumber legitimasi kekuasaan yang sangat efektif. Kritik terhadap adat tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran norma sosial, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan kosmis dan kehormatan leluhur. Kondisi ini menciptakan situasi di mana budaya tidak lagi menjadi ruang dialog, melainkan mekanisme kontrol yang membungkam perbedaan pendapat.

Bentuk-Bentuk Tirani Kultural di Sumba Barat Daya

1. Tirani Belis dan Kemiskinan Struktural

Belis merupakan praktik adat yang sangat dominan dalam masyarakat Sumba Barat Daya. Secara normatif, belis dimaknai sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dan ikatan antar keluarga. Namun, dalam praktik sosial-ekonomi, belis sering menjadi beban berat yang memiskinkan.

Budiman (2002) menekankan bahwa kemiskinan di masyarakat tradisional sering bersifat struktural, diproduksi oleh sistem sosial yang tidak adil. Dalam konteks belis, tuntutan adat yang tinggi memaksa keluarga menjual aset produktif atau berhutang dalam jangka panjang. Penolakan terhadap belis berujung pada sanksi sosial, sehingga individu tidak memiliki ruang negosiasi. Belis dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai instrumen tirani kultural yang mereproduksi ketimpangan ekonomi.

2. Tirani Gender dalam Budaya Adat

Ketimpangan gender merupakan manifestasi utama tirani kultural di Sumba Barat Daya. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan adat, sementara perempuan berada pada posisi subordinat. Nuhamara (2015) menunjukkan bahwa ketidakadilan gender di Indonesia Timur sering kali dilegitimasi oleh narasi budaya dan agama. Perempuan dalam sistem adat sering diposisikan sebagai objek pertukaran simbolik antar keluarga melalui belis. Hak atas pendidikan, pilihan hidup, dan kepemilikan sumber daya dibatasi oleh norma adat. Karena ketimpangan ini dibungkus dalam bahasa kehormatan dan tradisi, maka praktik diskriminatif sulit dikritisi secara terbuka.

3. Tirani terhadap Generasi Muda

Generasi muda di Sumba Barat Daya menghadapi tekanan budaya yang kuat untuk mematuhi adat, meskipun realitas sosial mereka telah berubah. Pendidikan formal dan arus modernisasi membuka wawasan baru, namun pilihan hidup tetap dibatasi oleh struktur adat. Setiawan (2018) mencatat bahwa adat sering digunakan untuk menormalisasi kepatuhan generasi muda, sehingga setiap

upaya perubahan dianggap sebagai ancaman terhadap identitas kolektif. Akibatnya, kreativitas dan daya kritis generasi muda terhambat, dan perubahan sosial berjalan sangat lambat.

Dampak Tirani Kultural

Tirani kultural berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya. Secara ekonomi, beban adat memperkuat kemiskinan struktural. Secara sosial, ketimpangan kelas dan gender terus direproduksi. Secara psikologis, tekanan adat menciptakan rasa takut, ketergantungan, dan kepasrahan. Dalam konteks pembangunan, tirani kultural sering menjadi hambatan serius. Program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerap tidak efektif karena berbenturan dengan norma adat yang kaku (BPS Sumba Barat Daya, 2022).

Budaya antara Legitimasi dan Transformasi

Penting untuk ditegaskan bahwa kritik terhadap tirani kultural tidak berarti penolakan terhadap budaya Sumba Barat Daya secara keseluruhan. Budaya merupakan sumber identitas dan solidaritas sosial. Namun, seperti ditegaskan Koentjaraningrat (2009), budaya bersifat dinamis dan dapat ditafsirkan ulang. Transformasi budaya diperlukan agar adat tidak lagi berfungsi sebagai alat dominasi, melainkan sebagai sarana emansipasi sosial. Pendidikan kritis dan dialog antar generasi menjadi kunci dalam membangun kesadaran reflektif terhadap budaya.

Penutup

Tirani kultural di Sumba Barat Daya merupakan fenomena struktural yang lahir dari relasi kuasa dalam sistem adat. Melalui legitimasi simbolik, adat berfungsi sebagai mekanisme dominasi yang membatasi kebebasan individu dan mereproduksi ketimpangan sosial. Analisis para pengamat Indonesia menunjukkan bahwa tanpa kritik budaya, pembangunan dan demokratisasi akan selalu berhadapan dengan hambatan struktural. Tantangan ke depan adalah menempatkan budaya sebagai ruang refleksi dan pembebasan, bukan sebagai tirani sosial.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya. (2022). *Sumba Barat Daya dalam Angka*. Tambolaka: BPS.
- Budiman, A. (2002). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haba, J. (2010). *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Sosial*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuhamara, D. (2015). Budaya, agama, dan ketidakadilan gender di Indonesia Timur. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 17(2), 145–160.
- Sairin, S. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan, B. (2018). Adat, kekuasaan, dan politik lokal di Indonesia Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 1–15.

Syamsuddin, M. (2017). Hegemoni budaya dan ketimpangan sosial dalam masyarakat adat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(2), 203–220.

Widjojo, M. S. (2013). *Politik Lokal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia



FLIPPED CLASSROOM DALAM PRAKTIK PEMBELAJARAN ILMU BAHASA (PRAKTIK KELAS BAHASA ARAB UIN WALISONGO)

Inayah, M.Pd.⁷

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*“Flipped classroom, model pedagogy, active learning,
pembelajaran luar kelas, pembelajaran bahasa Arab,
Perguruan tinggi, teknologi pembelajaran”*

⁷ Penulis lahir di Pati, 23 Desember 1985, Dosen Rumpun Keilmuan Pembelajaran Bahasa Arab pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Saat ini sedang menempuh S3 Pendidikan Bahasa Arab pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang & Awardee BIB LPDP Kemenag RI tahun 2023. Scholar penulis: <https://scholar.google.com/citations?user=baHGYBAAAAAJ&hl=id>, dengan ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6736-5301>. ID Sinta: 6811667. ID Peneliti: 20101022121226. ID Garuda: 6877672. Menyelesaikan studi S1 di PBA IAIN Walisongo tahun 2009, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011.

Secara historis, *flipped classroom* tidak lahir secara tiba-tiba sebagai inovasi teknologi, melainkan merupakan kelanjutan logis dari tradisi pedagogi aktif (*active learning*). Sejak awal abad ke-20, pemikir pendidikan seperti *John Dewey* telah menekankan bahwa belajar yang bermakna terjadi ketika peserta didik aktif membangun pengetahuan, bukan sekadar menerima informasi secara pasif. Dalam konteks ini, *flipped classroom* dapat dipahami sebagai reposisi aktivitas belajar, bukan sekadar pemindahan media. Ceramah (*lecture*) yang sebelumnya mendominasi ruang kelas dipindahkan ke luar kelas, sementara ruang kelas difungsikan untuk aktivitas bernalar tingkat tinggi seperti diskusi, analisis, dan pemecahan masalah.

Tahapan *flipped classroom* dimulai pada fase awal eksperimen *inverted classroom* (1990-an), Istilah *inverted classroom* mulai muncul pada akhir 1990-an di lingkungan pendidikan tinggi, terutama dalam pendidikan sains dan teknik. Pada fase ini, *flipped classroom* masih dipandang sebagai eksperimen metodologis, bukan model pedagogis mapan. Kemudian titik baliknya adalah *Bergmann & Sams* (2007–2012). Perkembangan *flipped classroom* memasuki fase penting ketika *Jonathan Bergmann* dan *Aaron Sams*, dua guru kimia di Amerika Serikat, mulai merekam materi pembelajaran untuk siswa yang tidak dapat hadir di kelas (sekitar 2007). Pada tahap ini, istilah *flipped classroom* dikenal luas dan digunakan secara konsisten dalam literatur pendidikan, dan bukan model berbasis teknologi, melainkan model pedagogis yang kebetulan didukung teknologi.

Dilanjutkan tahap institusionalisasi akademik (2012–2018). *Flipped classroom* mulai diposisikan sebagai model pembelajaran, bukan sekadar strategi. Kemudian integrasi dengan teknologi digital & LMS (2018–sekarang). Memasuki era LMS matang, video pembelajaran singkat, dan pembelajaran daring, *flipped classroom* mengalami

transformasi konseptual. Dalam konteks pembelajaran bahasa (termasuk bahasa Arab), *flipped classroom* mulai dipahami sebagai model yang memungkinkan input bahasa terjadi sebelum kelas, sementara kelas digunakan untuk produksi bahasa dan analisis kesalahan. Ini menjadikannya sangat relevan untuk pengajaran bahasa di perguruan tinggi.

Dalam dekade terakhir model *flipped classroom* (kelas terbalik) telah menjadi salah satu inovasi pedagogis yang paling banyak ditelaah di pendidikan tinggi, termasuk di ranah pembelajaran bahasa. Inti model ini adalah memindahkan pemberian materi dasar ke aktivitas pra-kelas (misalnya video singkat, bacaan terstruktur) dan memfokuskan waktu tatap muka pada aktivitas berinteraksi, berlatih, berdiskusi, dan refleksi yang lebih kompleks. Untuk pengajaran ilmu bahasa, dan khususnya pembelajaran bahasa Arab di lingkungan perguruan tinggi Islam seperti UIN Walisongo, pendekatan ini menyimpan potensi untuk menjembatani kebutuhan kognitif (penerimaan aturan) dengan kebutuhan afektif-praktik (produksi bahasa dan wacana akademik). Bukti meta-analitik pada konteks pembelajaran bahasa Inggris dan disiplin lain menunjukkan efek positif sedang sampai besar pada pencapaian pembelajaran dan keterlibatan mahasiswa; ini memberikan landasan empiris untuk mengadaptasi *flipped classroom* pada pengajaran bahasa Arab di tingkat perguruan tinggi.

Flipped classroom mendasarkan diri pada teori konstruktivis, bahwa pembelajaran kuat terjadi ketika peserta aktif membangun makna melalui interaksi bermakna, dan pada prinsip *cognitive load* serta *multimedia learning*, yang menekankan perancangan materi pra-kelas agar mengoptimalkan beban kognitif. Dalam praktik bahasa, pra-kelas efektif apabila materi bersifat klarifikasi struktur (morfologi, sintaksis), pengantar kosakata, atau demonstrasi model wacana; waktu kelas kemudian diarahkan pada latihan

produktif (*speaking/writing*), koreksi kolektif, dan penguatan strategi komunikatif.

Literatur sistematis dan meta-analitik modern (2019–2024) menyimpulkan bahwa *flipped classroom* menawarkan efek positif pada hasil belajar bahasa (*writing, speaking, grammar*), motivasi, dan partisipasi, namun kualitas hasil sangat tergantung pada desain *pre-class materials, scaffolding in-class activities*, dan kesiapan teknologi/instruktur. Tinjauan terkini mengenai *flipped learning* di konteks pembelajaran bahasa inggris, menyoroti pentingnya desain *pre-class* yang ringkas, aktif, dan disertai tugas-pemandu serta perencanaan kelas tatap muka yang kolaboratif dan terstruktur (Qi et al., 2024).

Di ranah khusus bahasa Arab, kajian kecenderungan penggunaan *flipped classroom* masih berkembang tetapi menjanjikan. Beberapa studi kasus dan kajian sistematis menyatakan bahwa *flipped classroom* membantu penguatan pola morfologi (*ṣarf*), pengenalan struktur *naḥwu*, serta menyediakan ruang aman bagi mahasiswa untuk latihan membaca dan pengucapan sebelum praktik lisan di kelas. Hal ini penting mengingat kompleksitas sistem tulisan Arab (*harakat/diakritik*) dan variasi dialektal (Zainuddin et al., 2022). Tahapan *flipped classroom* dalam kelas bahasa Arab dideskripsikan pada Gambar 1.



Gambar 1.
Tahapan Flipped Classroom dalam Kelas Bahasa Arab

Argumentasi pedagogis tentang *flipped classroom* untuk ilmu bahasa Arab adalah, *pertama*, mampu menangani heterogenitas kemampuan, Program Pendidikan Bahasa Arab di UIN Walisongo sering menghadapi kelompok mahasiswa heterogeny (lulusan madrasah, pesantren, maupun non-formal). *Flipped classroom* memungkinkan materi dasar (pengenalan huruf, *harakat*, pola fi'il) dipelajari mandiri sesuai tempo masing-masing, sedangkan kelas digunakan untuk diagnosa miskonsepsi dan penguatan terarah. *Kedua*, mempercepat *Noticing* dan *practice* yang terarah. Menurut *noticing hypothesis*, pembelajar meningkatkan akuisisi saat mereka sadar terhadap fitur bahasa. Video pra-kelas yang terencana (seperti menyoroti pola akhir kata dan kasus *i'rāb*) dapat meningkatkan *noticing*, lalu kelas menjadi arena praktek dan pemecahan masalah didaktis. *Ketiga*, Efisiensi pemanfaatan waktu dosen. Dosen dapat mengevaluasi hasil pra-kelas (quiz otomatis, tugas singkat) dan memusatkan waktu tatap muka pada umpan balik mendalam, diskusi teks keagamaan/ilmiah, atau produksi akademik (membuat ringkasan/*argument*), yang lebih bernilai pedagogis di level perguruan tinggi. *Keempat*, kombinasi dengan teknologi pembelajaran (NLP/*Feedback* otomatis). Paduan *flipped classroom* dengan alat analitik (seperti quiz adaptif, sistem koreksi tulisan berbasis NLP) bisa mempercepat diagnosis kesalahan umum dan menyajikan remedial yang relevan, namun tetap memerlukan validasi dosen.

Model Operasional yang Direkomendasikan untuk UIN Walisongo

Langkah pertama, desain kurikulum mikro (unit berorientasi kompetensi). Pecah mata kuliah menjadi *micro-units* (Unit 1: Penguasaan huruf & *harakat*; Unit 2: *Fi'il* dasar; Unit 3: Struktur kalimat; Unit 4: Teks akademik sederhana), Untuk tiap unit sediakan Pra-kelas, In-class, dan Pasca-kelas

activities. Langkah kedua, Pra-kelas (10–20 menit) dengan materi yang terstruktur. Video pendek (3–7 menit) yang memvisualkan pola morfologi atau mencontohkan struktur kalimat. Lembar panduan (*one-page*) berisi tujuan pembelajaran unit dan 3 pertanyaan panduan (*scaffold*). Kuiz singkat otomatis (*Moodle/H5P*) memeriksa *factual understanding* (identifikasi *fi'il*). Model operasional yang direkomendasikan untuk UIN Walisongo sebagaimana yang tergambar pada Gambar 2.

Langkah ketiga, kelas tatap muka (fokus pada kinerja tinggi). Aktivitas kolaboratifnya *jigsaw reading* teks Arab akademik, *peer correction exercise* menulis ringkasan, debat singkat tentang topik keilmuan. Dosen berperan sebagai *facilitator* dan *diagnostician* dengan memantau miskonsepsi yang muncul dari kuiz pra-kelas dan memimpin remedial. Alokasi waktunya 20% review & diagnosis, 60% aplikasi/produksi, 20% refleksi & perencanaan tindak lanjut.

Gambar 2. Model Operasional Tahapan Flipped Classroom yang Direkomendasikan untuk UIN Walisongo



Langkah keempat, pasca-kelas (remedial & portofolio). Mahasiswa merevisi tugas menulis berdasarkan umpan balik dosen/otomatis, menyusun portofolio reflektif, dan Dosen dapat memberikan *targeted assignments* untuk kelompok yang menunjukkan kelemahan spesifik (pola *fi'il* tertentu). Keberhasilan implementasi *flipped classroom* sangat

bergantung pada desain pra-kelas yang berkualitas, perencanaan aktivitas tatap muka yang intensif, kesiapan teknologi, dan keterlibatan serius dosen sebagai fasilitator serta evaluator akademik.

Daftar Pustaka

- Qi, P., Jumaat, N. F. B., Abuhassna, H., & Ting, L. (2024). A Systematic Review of Flipped Classroom Approaches in Language Learning. *Contemporary Educational Technology*, 16(4), 529. <https://doi.org/10.30935/cedtech/15146>
- Zainuddin, N., Isman, A., & Amiruddin, A. Z. (2022). Flipped Classroom in Arabic Language Teaching: A Systematic Review. *International Journal of Language and Education*, 1(1), 82–91. <https://doi.org/10.33102/alazkiyaa.v1i1.11>



MAHASISWA TUMBUH BERSAMA DALAM MENJAGA KEKOMPAKAN DAN KEBERSAMAAN DI LOKASI KULIAH KERJA NYATA

Aris Widodo, SE, M.Si, M.M.⁸

Universitas Satya Wiyata Mandala

“Kekompakan dan kebersamaan membentuk mahasiswa lebih peduli dan bertanggung jawab dalam kelompok dan kehidupan sehari-hari”

Kuliah Kerja Nyata atau disingkat KKN merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa, dimana Universitas Satya Wiyata Mandala melaksanakan KKN sebanyak 2 (dua) tahap yakni pada semester Ganjil dan Genap. Pelaksanaan KKN diikuti oleh seluruh mahasiswa pada masing-masing program studi dan memenuhi persyaratan administrasi serta mendapatkan rekomendasi dari Ketua Program Studi.

⁸ Penulis lahir tanggal 14 Desember 1980 di Kabupaten Nabire Propinsi Papua Tengah, menyelesaikan Sarjana S1 tahun 2003 di Universitas Cenderawasih pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, menyelesaikan Magister S2 tahun 2010 di Universitas Hasanuddin pada Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, tahun 2024 menyelesaikan S2 di Universitas Kristen Indonesia Paulus pada Jurusan Magister Manajemen, aktif mengajar sebagai Dosen di Universitas Satya Wiyata Mandala

Sebelum mahasiswa ditempatkan di lokasi KKN, dimana peserta yang sudah terdaftar diberikan pembekalan oleh lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai penanggung jawab. Pembekalan yang diberikan untuk membekali mahasiswa dalam kesiapannya ketika berada di lokasi KKN dengan memberikan gambaran umum tentang kondisi daerah, melatih membuat program kerja yang terarah, realitis dan bermanfaat, teknik menyusun laporan KKN dan mentaati aturan akademik serta menjaga nama baik alamamater Universitas Satya Wiyata Mandala.

Kuliah Kerja Nyata sebagai program akademik yang diikuti mahasiswa dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, tentunya memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa, sebab Kuliah Kerja Nyata mempertemukan mahasiswa dalam satu kelompok, yang belum saling mengenal, karena berbeda Program Studi, sehingga antara satu dengan yang lain belum saling mengenal latar belakang dan kepribadian, karena nantinya akan menjadi satu tim yang kompak dalam kehidupan sehari-hari, ketika melakukan pengabdian bersama di lokasi KKN. Dari sinilah mahasiswa mulai diproses untuk tumbuh bersama dan menjaga hubungan tali persaudaraan dan komitmen bersama selama kegiatan KKN.

Perbedaan pendapat dan perselisihan merupakan bagian yang sering terjadi, hal ini tercipta untuk saling mengenal dalam aktivitas sehari-hari, karena selama menjalankan KKN, mahasiswa belajar untuk saling memahami perbedaan pendapat, kebiasaan dan cara berpikir. Kebersamaan dan saling mengenal dalam menjalani rutinitas keseharian, dapat membentuk saling memahami mahasiswa, sehingga mampu menumbuhkan rasa saling percaya dan menghargai. Selain itu kekompakan mahasiswa selama di berada di lokasi KKN, menunjukkan adanya suasana kebersamaan, sehingga untuk melaksanakan program kerja, mahasiswa memperoleh pembagian tugas yang adil, agar setiap mahasiswa dapat

bertanggung jawab dan aktif menjalankan tugasnya. Selama KKN mahasiswa mengalami proses pembelajaran sosial yang intens. Sehingga dapat membantu mahasiswa secara emosional, sosial dan mental, mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan, kehidupan dan budaya masyarakat setempat dan kehidupan sesama rekan-rekan tim.

Untuk tumbuh bersama dalam kekompakan dan kebersamaan di lokasi KKN, dimana mahasiswa mulai dari saling mengenal dan akhirnya meninggalkan tempat lokasi KKN. Adapun awal tumbuh bersama mahasiswa di lokasi KKN sebagai berikut:

1. Pengenalan

Awal mahasiswa berada pada fase saling mengenal, sebab mahasiswa ada yang belum mengenal dan memahami pribadi anggota kelompoknya, penenalan mulai dari saat pembekalan hingga mahasiswa berada di lokasi KKN, proses pengenalan ini menjadi dasar terbentuknya kekompakan dan kebersamaan melalui komunikasi yang dibangun.

2. Adaptasi Lingkungan

Selain saling mengenal dengan anggota kelompoknya, mahasiswa KKN harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka mengabdikan, hal ini dapat menjalin hubungan yang baik, rukun dan harmonis, sehingga kegiatan KKN dapat berjalan dengan baik.

3. Kerjasama

Kerjasama mampu membentuk mahasiswa tumbuh bersama di lokasi KKN, dimana setiap mahasiswa memiliki peran dalam melaksanakan tugas sesuai dengan program yang dijalankan, sehingga setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan melakukan kerjasama untuk saling membutuhkan dan melengkapi, karena hal ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan.

4. Tanggung Jawab

Rasa tanggung jawab menjadi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap tugas- tugas yang dikerjakan selama masa KKN berlangsung. Tanggung jawab menjadi bentuk kemampuan dari mahasiswa dalam menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan yang dilakukan sesuai program kegiatan. Tanggung jawab dilakukan dengan penuh kesadaran, agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan komitmen bersama. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan dan memberikan rasa saling percaya, sehingga dapat memperkuat kekompakan mahasiswa di lokasi KKN.

5. Menjaga solidaritas

Selama berada di lokasi KKN mahasiswa harus dapat menjaga solidaritas, karena ini menunjukkan kekompakan dan kebersamaan yang dibangun oleh mahasiswa dalam pengandiannya di lokasi KKN, sehingga aktivitas kegiatan berjalan dengan lancar, nyaman dan harmonis. Solidaritas yang terbentuk, diantaranya saling membantu dan peduli terhadap sesama anggota, membangun komunikasi yang harmonis, saling bekerjasama, saling menghargai dan kompak dalam kebersamaan.

6. Saling Koordinasi

Saling koordinasi membentuk adanya rasa kebersamaan bagi mahasiswa di lokasi KKN, karena setiap kegiatan dilakukan secara terarah. Koordinasi memberikan hal yang baik, agar dapat terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan antara anggota dari berbeda pendapat sehingga saling berkoordinasi dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekompakan serta terbentuk kerjasama dan rasa tanggung jawab bersama.

7. Saling Curhat dan Berbagi

Bentuk rasa kekeluargaan selama berada di lokasi KKN dimana mahasiswa mengungkapkan isi hatinya melalui cerita dan ungkapan perasaan yang ada dihatinya, karena menemukan tempat untuk berbagi, merasakan dan menyatakan perasaan yang diungkapkan dan selain itu juga anggota KKN mampu merasakan kebersamaan, dengan saling berbagi yang dimiliki, sebab selama berada di lokasi KKN, mahasiswa menjadi keluarga yang mampu dijadikan tempat curhat, namun ada juga mahasiswa yang suka menghibur menciptakan suasana tawa dan canda yang harmonis.

8. Perpisahan

Akhir dari pelaksanaan KKN tentunya mahasiswa kembali ke kampus dan meninggalkan kisah-kisah serta pengalaman selama berada di lokasi KKN, mahasiswa kemudian membuat dan menyelesaikan laporan hasil kegiatan KKN untuk dipresentasikan, setelah itu keharmonisan dan keakraban di lokasi KKN tinggal kenangan manis yang dapat diingat melalui foto-foto, namun meskipun berpisah, tapi kekompakan dan kebersamaan tetap terjalin harmonis.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKN perlu adanya kekompakan dan kebersamaan dalam kelompok, karena dengan membangun hubungan yang baik melalui kerjasama, rasa tanggung jawab, saling peduli dan saling menghargai, dapat menciptakan keharmonisan dan membangun komitmen bersama mencapai tujuan KKN. Melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), memberikan motivasi mahasiswa belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, belajar memahami adanya perbedaan pendapat, belajar untuk bekerjasama dengan anggota, belajar bertanggung jawab dengan beban tugas yang diberikan, belajar menyelesaikan masalah dalam mengambil suatu keputusan dan mampu mandiri serta dewasa dalam menjaga sikap, emosi dan etika.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi.

Aris Widodo, 2025, Pentingnya kebersamaan mahasiswa dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kabupaten Nabire, Sosial Science dalam menatap Indonesia Emas, Tulungagung, Akademia Pustaka.



PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI RUANG DIGITAL

Izuddinsyah Siregar, M.Pd.⁹

Universitas Negeri Medan

“Dalam konteks pendidikan, ruang digital membuka peluang besar bagi penguatan nilai-nilai multikultural”

Pendidikan multikultural di ruang digital menempatkan teknologi sebagai ruang perjumpaan berbagai identitas, budaya, dan nilai. Melalui platform digital, siswa dapat berinteraksi lintas daerah dan bangsa, memperluas perspektif serta menumbuhkan toleransi. Namun, ruang digital juga menyimpan risiko seperti stereotip, ujaran kebencian, dan polarisasi. Karena itu, sekolah dan guru perlu membekali siswa dengan literasi digital dan budaya agar mampu berinteraksi secara etis, kritis, dan inklusif.

⁹ Penulis lahir di Padangsidempuan 07 April 1987, penulis merupakan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Program Studi Pendidikan Antropologi. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan pd tahun 2011, gelar Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial diselesaikan di Universitas Negeri Padang (2014), dan saat ini sedang menempuh study S3 di Universitas Sumatera Utara.

Dalam konteks pendidikan, ruang digital membuka peluang besar bagi penguatan nilai-nilai multikultural. Siswa dapat mengakses beragam perspektif, narasi budaya, dan pengalaman hidup dari berbagai daerah dan negara. Hal ini membantu menumbuhkan sikap toleran, empati, dan kesadaran global, yang merupakan tujuan utama pendidikan multikultural. Namun, ruang digital juga membawa tantangan bagi pendidikan, seperti penyebaran stereotip, ujaran kebencian, hoaks, dan polarisasi identitas. Jika tidak dibimbing, siswa dapat terjebak dalam budaya digital yang tidak sehat dan eksklusif. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting untuk membekali siswa dengan literasi digital dan literasi budaya agar mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan berinteraksi secara etis. Hal tersebut dapat tersaji dalam peta konsep yang terangkum dalam:

Keberagaman dan Identitas di Ruang Digital

Ruang digital telah menjadi arena sosial baru tempat individu dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, agama, dan kelas sosial saling berinteraksi. Dalam konteks pendidikan, ruang ini bukan sekadar media komunikasi, melainkan ruang produksi identitas dan makna. Siswa tidak hanya hadir sebagai pelajar, tetapi juga sebagai subjek budaya yang menampilkan, menegosiasikan, dan membangun identitas diri melalui berbagai platform digital. Keberagaman di ruang digital bersifat paradoksal. Di satu sisi, teknologi memungkinkan keterbukaan dan perjumpaan lintas budaya yang sebelumnya sulit terjadi. Siswa dapat mengakses narasi budaya yang beragam, berinteraksi dengan komunitas global, serta mengekspresikan identitas lokal maupun personal. Di sisi lain, ruang digital juga memperkuat hierarki budaya tertentu melalui algoritma, viralitas, dan dominasi bahasa serta nilai global, sehingga tidak semua identitas memperoleh visibilitas dan pengakuan yang setara.

Identitas digital bersifat performatif dan dinamis. Melalui unggahan, komentar, dan partisipasi daring, siswa membangun citra diri yang terus dinegosiasikan dengan respons sosial. Proses ini dapat memperkuat rasa percaya diri dan afiliasi budaya, tetapi juga dapat memunculkan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma dominan. Dalam konteks ini, keberagaman tidak selalu berarti kesetaraan, karena relasi kuasa tetap bekerja dalam bentuk simbolik dan algoritmik. Oleh karena itu, memahami ruang digital sebagai ruang budaya menjadi penting bagi pendidikan. Keberagaman dan identitas di dunia digital tidak hanya menyangkut representasi, tetapi juga menyangkut siapa yang didengar, siapa yang disisihkan, dan bagaimana makna tentang “kita” dan “yang lain” dibentuk. Pendidikan memiliki peran strategis untuk membantu peserta didik membaca dan mengelola dinamika ini secara kritis, sehingga ruang digital dapat menjadi ruang yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh identitas.

Literasi Digital dan Etika Multikultural

Literasi digital tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai kemampuan menggunakan perangkat teknologi, melainkan sebagai kecakapan untuk mengakses, menilai, memproduksi, dan merefleksikan informasi secara kritis dalam ruang digital. Dalam konteks masyarakat multikultural, literasi digital memiliki dimensi etis dan kultural yang sangat penting, karena ruang digital menjadi arena utama pertukaran makna, identitas, dan nilai antarindividu dari latar belakang yang beragam. Ruang digital mempercepat sirkulasi wacana, tetapi juga mempermudah penyebaran stereotip, ujaran kebencian, dan disinformasi. Tanpa literasi digital yang kritis, peserta didik rentan mengonsumsi dan mereproduksi konten yang memperkuat prasangka dan eksklusi sosial.

Oleh karena itu, literasi digital harus mencakup kemampuan membaca bias, mengenali kepentingan di balik produksi konten, serta memahami dampak sosial dari praktik komunikasi digital.

Etika multikultural menjadi landasan normatif dalam penggunaan ruang digital. Etika ini menekankan penghormatan terhadap perbedaan, kesetaraan dalam representasi, dan tanggung jawab sosial dalam berkomunikasi. Dalam lingkungan digital, etika multikultural menuntut kesadaran bahwa setiap unggahan, komentar, dan berbagi informasi memiliki implikasi terhadap martabat dan identitas kelompok lain. Literasi digital dan etika multikultural harus dipandang sebagai kompetensi inti dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan tidak hanya bertugas mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk warga digital yang mampu berpartisipasi secara kritis, adil, dan beradab dalam masyarakat yang semakin terhubung dan beragam.

Peran Pendidikan sebagai Mediator Budaya dan Norma dalam Ruang Digital

Dalam masyarakat digital yang ditandai oleh keberagaman identitas dan derasnya arus informasi, pendidikan memiliki peran strategis sebagai mediator budaya dan norma. Ruang digital bukanlah ruang netral, melainkan arena sosial yang sarat dengan nilai, ideologi, dan relasi kuasa. Di tengah kompleksitas tersebut, pendidikan berfungsi sebagai kekuatan yang menuntun peserta didik agar mampu berinteraksi secara bermakna, adil, dan bertanggung jawab. Sebagai mediator budaya, pendidikan membantu peserta didik memahami dan menghargai keberagaman yang hadir di ruang digital. Melalui kurikulum, dialog kelas, dan praktik pembelajaran, sekolah membekali siswa dengan kemampuan untuk membaca perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Pendidikan

mendorong siswa untuk mengaitkan identitas lokal dengan perspektif global sehingga mereka dapat membangun jati diri yang terbuka dan inklusif.

Dalam aspek normatif, pendidikan berperan membentuk etika digital. Siswa tidak hanya diajarkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara teknis, tetapi juga mengapa sikap hormat, empati, dan tanggung jawab penting dalam komunikasi daring. Dengan demikian, pendidikan berkontribusi pada pembentukan warga digital yang mampu menahan diri dari ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan kekerasan simbolik. Melalui fungsi mediasi ini, pendidikan menjadi kekuatan transformatif yang mengarahkan ruang digital menuju praktik sosial yang lebih manusiawi. Alih-alih menjadi sumber konflik dan polarisasi, ruang digital dapat berkembang sebagai ruang dialog, kolaborasi, dan pembelajaran lintas budaya ketika dimediasi secara positif oleh pendidikan.



PARIWISATA REGENERATIF SEBAGAI PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN PARIWISATA DI INDONESIA

Zahrotun Satriawati, S.Par., M.Par.¹⁰

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

“Pariwisata Regeneratif menuntut perubahan cara pandang dalam membangun masa depan pariwisata yang beradaptasi, memulihkan, dan memberdayakan”

Paradigma Pembangunan Pariwisata

Indonesia mempunyai sumber daya alam dan budaya yang menjadi modal utama dalam pembangunan pariwisata. Potensi ini menjadikan pariwisata sebagai salah satu bidang penting yang memiliki kapasitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia. Pembangunan pariwisata dikatakan berhasil ketika terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan karena dapat menumbuhkan ekonomi nasional. Hasil ini

¹⁰ Penulis lahir di Klaten, 12 Maret 1990, merupakan Dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (STIPRAM), menyelesaikan studi S1-Pariwisata (S.Par.) di STIPRAM tahun 2012, dan menyelesaikan Program S2 Magister Pariwisata (M.Par.) di STP Trisakti Jakarta tahun 2018.

cenderung masih dalam jangka pendek, karena seringkali mengabaikan daya dukung lingkungan, *over capacity* yang menimbulkan fenomena *overtourism* atau pengunjung berlebihan sehingga berpotensi dapat merusak. Hal tersebut sangat disayangkan apabila dalam pertumbuhan pariwisata yang bersifat masif dapat menimbulkan kontradiksi, di satu sisi pariwisata dapat memberi manfaat sosial dan ekonomi tapi di sisi lain pariwisata dapat memberi masalah besar terhadap kelestarian lingkungan, komodifikasi budaya yang berpotensi menggerus nilai kearifan lokal.

Pendekatan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) kemudian digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Konsep ini mulai mendapatkan perhatian luas mulai akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, sejalan dengan munculnya konsep pembangunan berkelanjutan secara umum (Kesuma et al., 2025). *Sustainable tourism* dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata memenuhi kebutuhan saat ini sambil mempertahankan kemampuan generasi mendatang (Guo et al., 2019). *Sustainable tourism* awalnya diposisikan sebagai konsep pembangunan industri pariwisata menjadi lebih baik dan bertanggungjawab karena dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, pariwisata berkelanjutan kerap dimaknai sebagai upaya meminimalkan dampak negatif, tetapi dalam pelaksanaannya belum secara aktif memulihkan kerusakan yang terjadi akibat aktivitas pariwisata, maka perlu konsep kebijakan yang kuat dalam pemulihannya (Guo et al., 2019). Pertanyaan yang muncul tentang pembangunan pariwisata di Indonesia bukan hanya tentang hal bagaimana industri pariwisata dapat dipertahankan, melainkan bagaimana industri pariwisata itu dapat berkontribusi secara aktif dalam memperbaiki, memulihkan, dan memperkuat sistem industri pariwisata.

Konsep Dasar Pariwisata Regeneratif

Perkembangan industri pariwisata mengalami banyak perubahan, salah satunya adalah pergeseran dari wisata konvensional atau massal yang berfokus pada jumlah pengunjung ke arah wisata alternatif yang menawarkan pariwisata ramah lingkungan, bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkualitas.

Fokus pendekatan pariwisata berkelanjutan adalah untuk mengurangi dampak negatif melalui konservasi dan menjaga keseimbangan. Hal penting pada pembangunan pariwisata saat ini adalah bagaimana dampak yang dihasilkan oleh pariwisata terhadap kehidupan di destinasi wisata, bukan sekedar berapa jumlah wisatawan yang datang berkunjung. Berangkat dari pertanyaan tersebut, pariwisata regeneratif muncul sebagai paradigma baru yang lebih berfokus pada pemulihan, perbaikan, dan peningkatan kualitas dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia dan memiliki efek positif yang berkelanjutan (Bellato et al., 2023) (Radyahadi & Nurfara, 2024).

Mengapa perlu pendekatan pariwisata regeneratif? Hal ini perlu diungkap antara perbedaan pada perubahan paradigma pembangunan pariwisata dari pariwisata konvensional, pariwisata keberlanjutan, dan pariwisata regeneratif. Ini terlihat dari tujuan dan cara kerja yang diusung diantara ketiganya yaitu: Pertama, *Pariwisata konvensional*: dimana industri pariwisata bekerja untuk memperbanyak jumlah kunjungan wisatawan dengan mengeksploitasi sumber daya dalam menumbuhkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya. Kedua, *Pariwisata Berkelanjutan*: memiliki potensi untuk mengurangi kerusakan dan menjaga kualitas sumber daya tetap stabil. Sedangkan yang Ketiga, *Pariwisata Regeneratif*: dengan melakukan tindakan yang proaktif untuk memulihkan, merevitalisasi, dan meningkatkan kapasitas ekosistem wisata, dan komunitas lokal untuk berkembang

lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, pariwisata bukan hanya berkaitan dengan mempertahankan, tetapi juga dapat menghasilkan nilai tambah dan berkembang secara terus menerus.

Menurut beberapa penelitian, Regenerasi adalah proses restoratif yang lebih dari sekadar konservasi, di mana tindakan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekayaan sumber daya alam. Konsep ini berasal dari prinsip regeneratif dalam ilmu alam (*regenerative agriculture*) yang menekankan hubungan saling terintegrasi antara manusia dan ekosistemnya (Hussain & Haley, 2022).

Regenerasi merupakan kemampuan sistem untuk memperbaiki, menyesuaikan diri, dan berkembang menuju lingkungan yang lebih sehat. Regenerasi dalam pariwisata membutuhkan partisipasi aktif semua pihak dalam pemulihan hubungan antara manusia, alam, dan budaya. Dalam kenyataannya, pertumbuhan pariwisata regeneratif memerlukan komitmen untuk melakukan perbaikan nyata, seperti yang diperlukan untuk pariwisata berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan. Masa depan industri pariwisata akan ditentukan oleh siapa yang dapat menerapkan prinsip regeneratif dengan menyatukan manusia dan alam untuk membangun kembali hubungan yang saling menghidupi dan menguntungkan satu sama lain (Aditya & Sari, 2024) (Kesuma et al., 2025). Pendekatan pariwisata regeneratif dapat membantu ekonomi lokal dengan mendukung pemberdayaan komunitas lokal, mengurangi jejak karbon (*low carbon*), melestarikan lingkungan, alam, dan sosial-budaya, serta menyeimbangkan keberlanjutan ekosistem pariwisata (Radyahadi & Nurfara, 2024). Pariwisata regeneratif menganggap destinasi sebagai sistem kehidupan (*living system*) yang terdiri dari komponen ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berinteraksi satu sama lain (Bellato et al., 2022). Interaksi positif antara wisatawan dan lingkungan

dapat meningkatkan kesadaran bahwa manusia (wisatawan, masyarakat, pemerintah) adalah bagian dari ekosistem pariwisata dan terlibat secara aktif didalamnya. Akibatnya, pariwisata menjadi suatu hal yang dibutuhkan dan juga membutuhkan.

Faktor-faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan dalam pembangunan pariwisata melalui pendekatan pariwisata regeneratif adalah: 1) Faktor Regenerasi Ekologis. Pariwisata memastikan bahwa penggunaan dan konservasi energi terbarukan serta praktik ramah lingkungan dapat membantu pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan. 2) Faktor Pemberdayaan Komunitas. Memberdayakan masyarakat lokal untuk lebih banyak berpartisipasi dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan destinasi wisata dengan meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, pendampingan, dan edukasi. 3) Faktor Pelestarian Budaya. Pariwisata membantu memperkuat identitas dan nilai budaya lokal melalui melibatkan tokoh adat dan regenerasi pelaku budaya (komunitas pemuda). 4) Faktor Pengalaman Wisatawan. Pengalaman wisatawan memengaruhi kesadaran dan perilaku wisatawan, karena wisatawan bukan konsumen pasif tetapi sebagai agen perubahan. 5) Faktor Tata Kelola. Mewujudkan sistem pengelolaan destinasi yang adaptif, kolaboratif, dan berjangka panjang, serta transparansi dalam pengelolaannya.

Refleksi Kritis Pembangunan Pariwisata

Pariwisata regeneratif sebagai komitmen moral melalui pendekatan yang sistemik dalam menciptakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Metode ini menekankan bahwa pariwisata harus dilihat sebagai alat peradaban untuk menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan, bukan hanya sebagai sektor ekonomi. Kebijakan pariwisata harus berfokus

pada pemulihan ekosistem, pemerataan keuntungan ekonomi, dan ketahanan destinasi terhadap krisis lingkungan dan perubahan iklim agar masa depan pariwisata lebih sukses dan berkembang. Untuk tata kelola yang lebih inklusif, maka semua pihak diantaranya pemerintah, swasta, komunitas, dan akademisi harus aktif berkolaborasi dan berkontribusi. Pembangunan pariwisata masa depan harus berorientasi pada nilai, bukan pada angka, pertumbuhan kualitas bukan kuantitas, dan menjadi tanggung jawab dalam perkembangan jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Aditya, I. W. P., & Sari, R. J. (2024). STUDI REGENERATIVE TOURISM: PERSPEKTIF INDUSTRI PARIWISATA DAN MASYARAKAT LOKAL DI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) I GUSTI NGURAH RAI, BALI. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 13(2), 327–336. <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/view/3729/2862>
- Bellato, L., Frantzeskaki, N., Briceño Fiebig, C., Pollock, A., Dens, E., & Reed, B. (2022). Transformative roles in tourism: Adopting living systems' thinking for regenerative futures. *Journal of Tourism Futures*, 8(3), 312–329.
- Bellato, L., Frantzeskaki, N., & Nygaard, C. A. (2023). Regenerative tourism: A conceptual framework leveraging theory and practice. *Tourism Geographies*, 25(4), 1026–1046.
- Guo, Y., Jiang, J., & Li, S. (2019). A Sustainable Tourism Policy Research Review. *Sustainability*, 11(11), 3187. <https://doi.org/10.3390/su11113187>

Hussain, A., & Haley, M. (2022). Regenerative Tourism Model: Challenges of Adapting Concepts from Natural Science to Tourism Industry. *Journal of Sustainability and Resilience*, 2(1), 1–14.

<https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=jsr>

Kesuma, T. M., Yunus, M., Tabrani, M., & Djalil, M. A. (2025). *Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia*. USK Press.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pOK5EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pariwisata+regeneratif+di+indonesia&ots=Cd3Lp-udq4&sig=pMpJ1YfmkC_gMKIpTQ_BGKKb6pA&redir_esc=y#v=onepage&q=pariwisata%20regeneratif%20di%20indonesia&f=false

Radyahadi, F., & Nurfara, N. A. (2024). Implementation of Regenerative Tourism in the Development of Tourism Destinations in Indonesia. *International Journal of Sustainable Competitiveness on Tourism*, 3(01), 1–10.



REKAYASA TEKNIK MESIN PADA PROSES PEMBUATAN DRUM PENYAMAKAN KULIT UNTUK INDUSTRI WAYANG KULIT

Rohmad Eko Priyono, A.Md TK., S.Pd., M.Sn.¹¹

Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta

*“Pembuatan Drum Penyamakan kulit Perkamen mendukung
keberlanjutan industri wayang kulit tradisional modern”*

Proses pembuatan drum penyamakan kulit ditinjau dari perspektif ilmu mesin sebagai sebuah sistem mekanis rotasional yang bekerja dalam lingkungan basah, korosif, dan berbeban tinggi. Drum penyamakan kulit tidak hanya dipahami sebagai alat bantu produksi, melainkan sebagai mesin proses yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh ketepatan perancangan, pemilihan material, metode fabrikasi, serta integrasi elemen-elemen mesin yang bekerja secara simultan.

¹¹ Penulis Lahir di Ponorogo, 06 Juli 1990, Merupakan Dosen di Progam Studi Kriya Kulit Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, Menyelesaikan D3 Desain Teknologi Produk Kulit Di Politeknik ATK Yogyakarta tahun 2011, menyelesaikan S1 Pendidikan Seni Rupa di UST Yogyakarta, Menyelesaikan S2 di Pascasarjana ISI Yogyakarta Prodi Penciptaan Kriya Kulit.

Drum penyamakan kulit pada prinsipnya merupakan bejana silindris berputar yang dirancang untuk menciptakan interaksi mekanis yang homogen antara kulit mentah, media cair, dan bahan kimia penyamak. Dari sudut pandang teknik mesin, drum ini dapat diklasifikasikan sebagai mesin proses berkecepatan rendah dengan torsi tinggi, yang menuntut kestabilan struktural dan ketahanan jangka panjang terhadap beban siklik. Oleh karena itu, perancangan drum harus diawali dengan pemahaman menyeluruh terhadap fungsi kerja, kondisi operasi, serta karakteristik material yang terlibat.

Tahap awal dalam proses pembuatan drum adalah penentuan spesifikasi teknis. Spesifikasi ini meliputi kapasitas volume drum, massa maksimum muatan basah, kecepatan putar operasional, serta lama waktu kerja dalam satu siklus produksi. Kapasitas drum biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram kulit basah atau volume liter larutan penyamak. Parameter ini menjadi dasar bagi perhitungan beban total yang akan bekerja pada struktur drum dan sistem pendukungnya.

Dari sisi mekanika teknik, beban yang bekerja pada drum dapat dibedakan menjadi beban statis dan beban dinamis. Beban statis berasal dari berat sendiri drum dan muatan kulit serta cairan ketika drum berada dalam kondisi diam. Sementara itu, beban dinamis muncul akibat rotasi drum yang menghasilkan gaya sentrifugal, gaya geser internal, serta fluktuasi distribusi massa selama proses pengadukan. Kombinasi beban ini menuntut faktor keamanan yang memadai dalam desain struktur.

Pemilihan material merupakan tahap krusial berikutnya. Secara tradisional, drum penyamakan kulit dibuat dari kayu keras seperti jati atau mahoni karena sifatnya yang relatif tahan terhadap air dan bahan kimia tertentu. Namun, dari perspektif ilmu mesin modern, penggunaan material logam seperti baja karbon rendah atau baja tahan karat menawarkan keunggulan dalam hal kekuatan mekanik, konsistensi dimensi,

dan umur pakai. Material logam juga memungkinkan penerapan metode fabrikasi presisi seperti pengelasan dan pembubutan. Dalam menentukan material, pembuat mesin harus mempertimbangkan sifat mekanik seperti kekuatan tarik, kekuatan luluh, ketahanan kelelahan, serta ketahanan terhadap korosi. Lingkungan kerja drum yang lembab dan mengandung bahan kimia agresif menuntut adanya perlakuan permukaan tambahan, seperti pelapisan antikorosi atau penggunaan liner pelindung di bagian dalam drum. Pertimbangan ini bertujuan untuk mencegah degradasi material yang dapat mengurangi integritas struktural.

Proses fabrikasi badan drum dimulai dengan pembentukan struktur silinder. Untuk drum berbahan logam, tahap ini melibatkan proses rolling plat baja hingga membentuk silinder dengan diameter yang telah ditentukan. Sambungan longitudinal dan transversal dilakukan menggunakan teknik pengelasan yang memenuhi standar kekuatan sambungan. Kualitas sambungan las menjadi aspek penting karena daerah sambungan merupakan titik kritis terhadap kegagalan struktural. Presisi geometris silinder sangat mempengaruhi kinerja mekanis drum. Ketidakseimbangan bentuk atau ketidakrataan permukaan dapat menyebabkan ketidakseimbangan massa saat rotasi, yang berujung pada getaran berlebih. Getaran ini tidak hanya mengurangi kenyamanan operasi, tetapi juga mempercepat keausan bantalan dan poros. Oleh karena itu, proses fabrikasi harus disertai dengan pengendalian mutu yang ketat. Bagian dalam drum biasanya dilengkapi dengan sirip atau bilah pengaduk yang berfungsi meningkatkan efektivitas pencampuran kulit dan larutan penyamak. Dari sudut pandang mekanika fluida dan mekanika padatan, bilah ini dirancang untuk menciptakan pola aliran turbulen yang terkendali, sehingga kontak antara kulit dan bahan kimia berlangsung merata. Desain bilah mempertimbangkan sudut kemiringan, tinggi, serta jarak antarbilah.

Sistem poros merupakan elemen utama yang mentransmisikan daya putar dari motor ke drum. Perancangan poros dilakukan berdasarkan analisis momen puntir maksimum yang dihasilkan selama operasi. Diameter poros ditentukan dengan mempertimbangkan tegangan geser yang diizinkan serta faktor keamanan terhadap kelelahan akibat beban siklik. Material poros umumnya menggunakan baja karbon menengah yang memiliki kombinasi kekuatan dan keuletan yang baik. Poros drum ditopang oleh sistem bantalan yang berfungsi mengurangi gesekan dan menjaga keselarasan rotasi. Bantalan yang digunakan harus mampu menahan beban radial yang besar serta bekerja dalam kondisi lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, bantalan dengan sistem pelumasan tertutup sering dipilih untuk mencegah kontaminasi air dan bahan kimia. Pemilihan jenis bantalan menjadi faktor penting dalam menentukan umur operasional mesin.

Transmisi daya dari motor listrik ke poros drum umumnya menggunakan sistem reduksi kecepatan. Motor listrik memiliki kecepatan putar tinggi, sedangkan drum penyamakan memerlukan kecepatan rendah untuk menjaga kualitas kulit. Gearbox atau sistem pulley dan sabuk digunakan untuk menurunkan putaran sekaligus meningkatkan torsi. Perancangan sistem transmisi ini mempertimbangkan efisiensi mekanis, kehilangan daya, serta kemudahan perawatan. Motor listrik sebagai sumber penggerak dipilih berdasarkan kebutuhan daya total sistem. Daya motor harus mampu mengatasi beban awal saat drum mulai berputar serta beban operasional saat drum penuh muatan. Selain itu, motor harus memiliki ketahanan terhadap operasi kontinu dan fluktuasi beban. Penggunaan motor dengan sistem pengaturan kecepatan variabel dapat meningkatkan fleksibilitas proses penyamakan.

Aspek keselamatan kerja menjadi bagian integral dalam pembuatan drum penyamakan kulit. Sistem pengunci pintu drum, pelindung transmisi, serta mekanisme penghentian darurat harus dirancang sesuai dengan prinsip ergonomi dan keselamatan mesin. Dari perspektif teknik mesin, desain keselamatan bertujuan meminimalkan risiko kecelakaan akibat kegagalan mekanis atau kesalahan operasional. Setelah proses fabrikasi dan perakitan selesai, dilakukan tahap pengujian. Pengujian tanpa beban bertujuan mengevaluasi keselarasan mekanis, kestabilan rotasi, dan tingkat getaran. Selanjutnya, pengujian berbeban dilakukan untuk mensimulasikan kondisi operasi nyata. Data hasil pengujian digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem dan melakukan penyempurnaan desain jika diperlukan.

Proses pembuatan drum penyamakan kulit merupakan penerapan multidisiplin ilmu mesin yang melibatkan mekanika teknik, perancangan elemen mesin, ilmu material, serta proses manufaktur. Drum yang dirancang dengan baik tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga menjamin kualitas hasil penyamakan dan keberlanjutan operasional industri kulit. Dengan pendekatan ilmiah yang sistematis, drum penyamakan kulit dapat dipahami sebagai representasi konkret penerapan ilmu mesin dalam industri berbasis sumber daya alam.

BAB II

OPTIMALISASI SUMBER DAYA ALAM DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



WORLD CLEAN UP DAY (WCDI) SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN MITIGASI BENCANA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN TLANAKAN PAMEKASAN

Dr. Endang Tri Wahyurini, S.Pi., M.Agr.¹²

Universitas Islam Madura

“WCDI berkontribusi signifikan mitigasi bencana lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan”

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah pesisir yang luas dan strategis, namun sekaligus rentan terhadap berbagai permasalahan lingkungan dan bencana alam. Tekanan aktivitas manusia seperti pembuangan sampah sembarangan,

¹² Penulis lahir di Tulungagung, 12 Juli 1976, merupakan Dosen di Program Studi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Islam Madura Pamekasan, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya tahun 1998, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Magister Agribisnis UPN Veteran Surabaya tahun 2013, dan menyelesaikan S3 Prodi Ilmu Pertanian Pascasarjana UNS Surakarta tahun 2022.

lemahnya sistem pengelolaan limbah, serta rendahnya kesadaran lingkungan menyebabkan kawasan pesisir menjadi titik akumulasi pencemaran, terutama sampah plastik. Kondisi ini tidak hanya mengancam ekosistem pesisir, tetapi juga meningkatkan risiko bencana seperti banjir, rob, abrasi pantai, dan degradasi kualitas perairan (KLHK, 2023).

Kecamatan Tlanakan di Kabupaten Pamekasan merupakan wilayah pesisir yang memiliki aktivitas perikanan, pemukiman, dan pariwisata lokal. Namun demikian, pengelolaan sampah pesisir masih menjadi tantangan serius. Sampah rumah tangga dan limbah aktivitas pesisir seringkali bermuara di pantai, memperparah kerentanan lingkungan dan meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan mitigasi bencana yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berbasis sosial dan partisipatif.

World Clean Up Day Indonesia (WCDI) merupakan gerakan global yang diadaptasi di Indonesia sebagai bentuk aksi kolektif masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah. Lebih dari sekadar kegiatan bersih-bersih, WCDI memiliki dimensi edukatif, sosial, dan ekologis yang berpotensi mendukung penguatan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan pesisir. Oleh karena itu, artikel ini menempatkan WCDI sebagai strategi non-struktural dalam pengurangan risiko bencana dan penguatan tata kelola lingkungan di wilayah pesisir Tlanakan.

Kelompok Peduli Mangrove Madura (KPMMD) sebagai core team Pamekasan panitia pelaksana, sebagai kelompok penggiat lingkungan terutama di wilayah pesisir. Kegiatan WCD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 dilaksanakan Hari Minggu, Tanggal : 16 Oktober 2025, Pukul : 06.30 WIB, Tempat : Pantai Tlanakan Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Hasil kegiatan WCDI meliputi telah dilaksanakan bersih - bersih di area pantai Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan, Jumlah peserta hadir sebanyak 500 volunteer. Terdiri dari berbagai unsur masyarakat antara lain :

Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, PUPR, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Universitas Islam Madura, Aparat Desa, Pokmaswas Tlanakan, Komunitas Relawan Pamekasan, SISPALA, GENBI, Pramuka, Siswa SD dan masyarakat setempat. Jumlah total sampah yang dikumpulkan sebanyak 2,5 ton sampah organik, anorganik dan residu yang dibawa langsung keTPA Angsanah Pamekasan. Hasil yang mendominasi adalah sampah plastik dan kayu-kayu yang menumpuk di area mangrove pantai Tlanakan.

Salah satu inisiatif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian pesisir. Di Kabupaten Pamekasan, WCD tidak hanya dilaksanakan sebagai kegiatan pembersihan, tetapi juga sebagai upaya pendampingan bagi masyarakat pesisir untuk menjadi lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pengabdian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendampingan masyarakat pesisir dalam kegiatan WCD dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pantai di Kabupaten Pamekasan Madura.

Konsep World Clean Up Day dan Relevansinya dengan Mitigasi Bencana

World Clean Up Day merupakan gerakan lingkungan global yang menekankan aksi kolektif masyarakat dalam membersihkan lingkungan dari sampah sekaligus membangun kesadaran ekologis. Di Indonesia, WCDI berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan pemerintah daerah, institusi pendidikan, komunitas lokal, organisasi sosial, dan sektor swasta.

Dalam perspektif mitigasi bencana, pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam mengurangi faktor pemicu bencana. Sampah yang menumpuk di pesisir dan aliran air

dapat menghambat drainase alami, mempercepat sedimentasi, serta memperparah dampak banjir dan rob. Oleh karena itu, aksi WCDI berkontribusi langsung pada mitigasi bencana melalui pengurangan tekanan lingkungan (BNPB, 2022). Selain aspek fisik, WCDI juga memperkuat mitigasi bencana dari sisi sosial. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan WCDI meningkatkan kapasitas komunitas dalam memahami risiko lingkungan, membangun kepedulian kolektif, dan mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan

Kondisi Lingkungan dan Kerentanan Pesisir Kecamatan Tlanakan

Wilayah pesisir Kecamatan Tlanakan memiliki karakteristik ekologi yang khas, dengan dominasi pantai berpasir, aktivitas perikanan tradisional, serta pemukiman pesisir. Namun, tingginya aktivitas manusia tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Sampah plastik, limbah rumah tangga, dan sisa aktivitas perikanan sering ditemukan di sepanjang garis pantai.

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan pesisir, terganggunya estetika kawasan, serta meningkatnya risiko bencana lingkungan. Sampah pesisir juga berpotensi merusak habitat biota laut dan mengurangi produktivitas sumber daya perikanan, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Dalam konteks perubahan iklim, wilayah pesisir seperti Tlanakan semakin rentan terhadap kenaikan muka air laut dan intensitas cuaca ekstrem. Akumulasi sampah memperparah kerentanan ini dengan menghambat fungsi alami pantai sebagai penyangga bencana. Oleh karena itu, pengelolaan sampah pesisir menjadi bagian integral dari strategi mitigasi bencana di wilayah ini.

WCDI sebagai Strategi Penguatan Pengelolaan Lingkungan Pesisir

Pelaksanaan WCDI di wilayah pesisir Tlanakan menunjukkan potensi besar dalam memperkuat pengelolaan lingkungan secara partisipatif. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat pesisir, mahasiswa, aparat desa, hingga unsur pemerintah dan TNI/Polri. Kolaborasi multi-pihak ini mencerminkan pendekatan *collaborative governance* dalam pengelolaan lingkungan.

WCDI tidak hanya menghasilkan dampak langsung berupa berkurangnya volume sampah di pesisir, tetapi juga dampak jangka panjang berupa peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Edukasi mengenai pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, dan pentingnya menjaga kebersihan pesisir menjadi bagian penting dari kegiatan WCDI.

Lebih lanjut, WCDI dapat diintegrasikan dengan program pengelolaan lingkungan pesisir lainnya, seperti rehabilitasi mangrove, pengembangan ekowisata, dan program desa tangguh bencana. Integrasi ini akan memperkuat ketahanan lingkungan dan sosial masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Kegiatan WCD di Kabupaten Pamekasan membawa dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat pesisir dalam upaya pelestarian lingkungan. Beberapa dampak yang dapat dilihat dari pelaksanaan WCD antara lain: peningkatan Kesadaran Lingkungan, melalui sosialisasi dan partisipasi langsung dalam kegiatan pembersihan, masyarakat menjadi lebih sadar akan dampak sampah terhadap lingkungan pesisir dan kesehatan mereka. Kegiatan WCD tidak hanya meningkatkan kesadaran individu, tetapi juga membentuk komunitas-komunitas peduli lingkungan di tingkat lokal. Meskipun sampah plastik tetap menjadi tantangan utama, dengan adanya kegiatan WCD,

kebiasaan membuang sampah sembarangan berkurang, dan pantai-pantai di Pamekasan menjadi lebih bersih dan lebih sehat.

Kegiatan bersih-bersih WCD dilakukan di pantai Tlanakan di area mangrove yang penuh dengan sampah seperti pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. *Bersama relawan melakukan bersih sampah di pantai Tlanakan*

Kesimpulan

World Clean Up Day Indonesia (WCDI) memiliki peran strategis dalam penguatan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan pesisir di Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, WCDI mampu mengurangi tekanan lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat kapasitas komunitas pesisir dalam menghadapi risiko bencana. Integrasi WCDI dengan kebijakan dan program lingkungan daerah menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan berketahanan.

Daftar Pustaka

- BNPB. (2022). *Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KLHK. (2023). *Status Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Nisa, N. K., et al. (2023). World Cleanup Day Movement as Environmental Awareness Strategy. *Journal of Environmental Governance*, 5(2), 101–112.
- Satria, A., & Matsuda, Y. (2020). *Community-Based Coastal Resource Management in Indonesia*. *Marine Policy*, 116, 103–110.
- Wahyurini, E. T., et al. (2024). Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui World Clean Up Day di Wilayah Pesisir Pamekasan. *Journal of Human and Education*, 4(1), 45–56.
- UNEP. (2021). *From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution*. Nairobi: United Nations Environment Programme



DAMPAK PROSES PENGASAPAN TERHADAP NILAI GIZI DAN KEAMANAN IKAN CAKALANG (*KATSUWONUS PELAMIS*) DI PT. KCBS KELURAHAN WAILITI, KABUPATEN SIKKA

Sofia Dhengi, S.Pi., M.Si.¹³

Universitas Nusa Nipa

“Ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan biologis oleh enzim atau mikroorganisme pembusuk. Salah satu cara pengawetan ikan adalah pengasapan”

Potensi perikanan di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, 2024 menyebutkan pada hamparan laut Sikka seluas 5.821,33 Km² itu terkandung potensi sumber

¹³ Penulis lahir di Ende Flores, 03 Juli 1978, merupakan Dosen di Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas Teknologi Pangan, Pertanian dan Perikanan Universitas Nusa Nipa, menyelesaikan studi S₁ Jurusan Budidaya Perairan di Universitas Dr. Soetomo Surabaya tahun 2004, menyelesaikan studi S₂ Jurusan Ilmu Perikanan di Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018.

daya kelautan yang cukup besar. Pada tahun 2024 produksi ikan tangkap mencapai 27.625,41 ton, mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2023 sebesar 23.970,48 ton.

PT. Karya Cipta Buana Sentosa (KCBS) terletak di jalan Don Slipi Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka berdiri sejak tanggal 11 Mei 1994 dengan sistem penanaman modal asing. Perusahaan ini menjalankan berbagai tahapan proses, mulai dari penerimaan bahan baku, sortasi, pemisahan daging, pemotongan, pendinginan, pengasapan hingga pembekuan dan pengepakan sebelum produk dipasarkan. Perusahaan ini dilengkapi pula fasilitas dan peralatan seperti mesin pembekuan proton canggih, peralatan ini memungkinkan proses pembekuan ikan tanpa mengurangi rasa dan kualitas kesegarannya. Maka sangatlah wajar PT. Karya Cipta Buana Sentosa memperoleh sertifikat pengendalian mutu dari Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) karena memprioritaskan sanitasi dan hygiene.

Ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*) merupakan sumber daya perikanan pelagis yang tergolong penting dan merupakan salah satu komoditi ekspor (Nugraeni dkk, 2023: 175). Ikan cakalang juga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam beberapa jenis industri pengolahan. Menurut data dari Atsecret Indonesia, 2025, ikan ini memiliki nilai gizi per100 gram-kalori:132kkal; lemak:1,29g; karb:0,0g. Beberapa bentuk produk olahan dari ikan cakalang misalnya cakalang fufu, ikan kaleng, abon cakalang dan masih banyak lagi produk olahan lainnya yang bernilai ekonomis tinggi (Nuh dkk, 2019: 59).

Pengasapan adalah salah satu metode pengolahan ikan tradisional yang populer karena dapat memberikan cita rasa khas, memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan nilai jual. Namun, proses pengasapan juga dapat berdampak pada nilai gizi dan keamanan ikan. Suhu tinggi dan paparan asap dapat menyebabkan perubahan komposisi gizi, seperti penurunan kadar protein dan lemak, serta pembentukan

senyawa-senyawa berbahaya seperti Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dampak proses pengasapan terhadap nilai gizi dan keamanan ikan cakalang asap yang diproduksi di PT. KCBS Kelurahan Wailiti melalui kegiatan Praktek Kerja Lapang bersama Mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya perairan, Universitas Nusa Nipa.

Kegiatan Praktek Kerja Lapang: Metode Pelaksanaan dan Output

Materi dan metode Praktek Kerja Lapang diawali dengan pengadaan bahan baku, pencucian, penyiangan, pengasapan, sanitasi dan keamanan pangan, penerapan HACCP. Berikut adalah persiapan yang biasanya dilakukan dalam penanganan ikan asap industri perikanan PT. Karya Cipta Buana Sentosa (KCBS) sebagai berikut:

1. Penanganan Bahan Baku

Penerimaan bahan baku merupakan titik penting karena potensi bahaya seperti potongan jaring, kayu, kerikil, atau bahan non-ikan lainnya yang mungkin terbawa selama pengangkutan dari pelabuhan ke pabrik. Selain itu, kandungan logam berat yang terakumulasi dalam tubuh ikan dan bakteri patogen seperti *Salmonella* sp. juga menjadi perhatian. Selama kegiatan ikan cakalang langsung diterima dari pemancing pole and line. Penerimaan bahan baku Ikan cakalang segar diterima dari nelayan atau supplier pole and line. Ikan yang diterima harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, seperti segar, tidak busuk, dan tidak cacat, kemudian disimpan di cold storage selama semalam, proses ini biasa disebut dengan chilling.

2. Pencucian atau steril

Pencucian merupakan langkah penting dalam mempersiapkan ikan untuk proses pengolahan lebih lanjut. Selama kegiatan ikan cakalang dicuci dengan air bersih. Proses pencucian ini bertujuan untuk membantu menghilangkan kotoran, lendir, darah, sisik, dan kontaminan lainnya yang mungkin menempel pada permukaan ikan. Selain itu juga dapat mengurangi jumlah bakteri pada permukaan ikan, membantu mencegah timbulnya bau tidak sedap pada ikan, dapat memperlambat pembusukan dan memperpanjang umur simpan ikan.

3. Penyiangan

Tahap selanjutnya adalah penyiangan ikan. Ikan cakalang disiangi dengan cara membuang isi perut, insang, sisik juga sirip. Ikan lalu dimasukkan kedalam konteiner perebusan menggunakan remot control dengan suhu awal 80°C-85°C agar memudahkan ikan cepat matang dan dapat membunuh bakteri secara cepat. Setelah proses perebusan selesai, ikan dikeluarkan dari konteiner dan didinginkan beberapa saat. Kemudian ikan yang telah didinginkan tersebut dicabut tulang-tulangnya menggunakan pisau ukuran kecil. Tahap selanjutnya tulang-tulang tersebut dipisahkan dan disimpan pada konteiner yang sudah disediakan.

4. Pengasapan

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan proses pengasapan ikan cakalang. Dalam proses ini selain mahasiswa di bantu juga oleh beberapa karyawan utama sekaligus memastikan apakah proses pengasapan atau pengovenan berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan tersebut. Ikan yang akan diasap disusun berdasarkan ukuran dan jenis produk. Setelah disusun kemudian dimasukkan kedalam oven pengasapan dengan

suhu 70°C-80°C. Pengasapan ini bertujuan memberikan aroma dan rasa khas atau unik pada ikan. Selain itu mengawetkan ikan asap mengandung senyawa kimia seperti *formaldehida* dan asam asetat yang berfungsi sebagai pengawet alami, menghambat pertumbuhan bakteri dan memperlambat pembusukan. Membentuk warna yang menarik; Asap memberikan warna cokelat keemasan pada permukaan ikan, sehingga membuatnya lebih menarik secara visual. Jenis produksi pengasapan ikan cakalang ada tiga kategori yaitu *yurista*, *haramo* dan *ore*. Dari ketiga produk tersebut siap untuk dipasarkan.

5. Sanitasi dan Keamanan Pangan

Sanitasi dan higiene merupakan dua faktor utama yang menentukan tingkat keamanan pangan dalam seluruh rantai produksi. Sanitasi mengacu pada upaya menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas produksi, sementara higiene merujuk pada praktik menjaga kebersihan diri dan perilaku pekerja untuk mencegah kontaminasi pangan. Produk ikan asap yang diproses dalam kondisi tidak higienis berpotensi terkontaminasi mikroorganisme patogen seperti *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, dan *Listeria monocytogenes* yang dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran cerna, termasuk diare akut dan keracunan makanan (Tina dkk, 2025: 414). Keamanan air dan es yang digunakan, kebersihan permukaan yang bersentuhan langsung dengan pangan, pencegahan kontaminasi silang, fasilitas cuci tangan, sanitasi dan toilet, pelabelan dan penyimpanan bahan kimia, pengendalian hama, dan penanganan limbah adalah bagian penting dari persiapan. Dalam kegiatan praktek kegiatan semua karyawan juga mahasiswa praktek kerja lapang menerapkan prinsip sanitasi.

6. Penerapan HACCP

Penerapan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) meliputi pembentukan tim HACCP, deskripsi produk, identifikasi penggunaan, penyusunan diagram alir proses, pemeriksaan bagan alir proses, analisis bahaya, penetapan Critical Control Point (CCP), penetapan batas kritis, penentuan prosedur monitoring, tindakan koreksi, tindakan verifikasi, dan penetapan dokumentasi dan pencatatan. PT. Karya Cipta Buana Sentosa memperoleh sertifikat pengendalian mutu dari Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP) karena memprioritaskan sanitasi dan hygiene.

Penutup

Berdasarkan hasil praktik kerja lapang menunjukkan Indikator ketercapaian tujuan kerja adalah 80% mahasiswa memahami adanya peningkatan pengetahuan serta pentingnya implementasi sanitasi dan higiene, serta inovasi pengolahan pengasapan ikan agar dapat memiliki pangsa pasar yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, 2024. *Data Hasil Produksi Perikanan Di Wilayahh Kabupaten Sikka*.
- Fatsecret Indonesia. 2025. *Data Base Makanan dan Penghitung Kalori Ikan Cakalang*.

- Nugraeni B.R., Tumulyadia A dan Setyohadia D. 2023. *Analisis Aspek Dinamika Populasi Ikan Cakalang (Katsuwonus Pelamis) yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap Sendangbiru Kabupaten Malang Jawa Timur*. Jurnal Naturalis. Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. 12(2):175-185.
- Tina L., Sudarnika E., Ridwan Y., Mirnawati B., Sudarwanto dan Pisestyani H. 2025. *Penerapan Sanitasi dan Higiene dalam Produksi Ikan Asap: Potensi terhadap Keamanan Pangan dan Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Sain Veteriner. Program Studi Ilmu Biomedis Hewan, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor. Vol. 43. No. 2



OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KELE'I MELALUI AGROINDUSTRI

Septian Aditya Kolompo, S. Agr., M.P.¹⁴

Universitas Kristen Tentena

"Optimalisasi agroindustri keripik ubi kayu berbasis sumber daya lokal meningkatkan nilai tambah, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat Desa Kele'i secara berkelanjutan"

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu agenda strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Desa sebagai unit sosial dan ekonomi terkecil memiliki peran penting dalam menopang ketahanan ekonomi nasional, terutama melalui pemanfaatan sumber daya alam lokal yang melimpah namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Pada banyak wilayah pedesaan di Indonesia, kekayaan sumber daya alam belum

¹⁴ Penulis lahir di Palu, 29 September 1997, merupakan Dosen tetap di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Kristen Tentena, menyelesaikan studi S1 di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako tahun 2019 dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana Universitas Tadulako Prodi Agribisnis tahun 2023.

berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas pengolahan, rendahnya nilai tambah produk primer, serta lemahnya keterkaitan antara sektor produksi dengan pasar.

Sumber daya alam lokal, khususnya komoditas pertanian, masih didominasi oleh aktivitas produksi bahan mentah dengan nilai jual yang relatif rendah. Pola pemanfaatan seperti ini menyebabkan pendapatan petani dan pelaku usaha desa cenderung stagnan serta rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengolahan dan pengembangan nilai tambah melalui kegiatan agroindustri. Agroindustri dipandang sebagai instrumen penting dalam menghubungkan sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara lebih inklusif.

Pengembangan agroindustri berbasis sumber daya alam lokal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Melalui agroindustri, komoditas pertanian yang sebelumnya dijual dalam bentuk bahan mentah dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, agroindustri juga berkontribusi dalam menciptakan diversifikasi usaha di pedesaan, mengurangi ketergantungan pada satu jenis mata pencaharian, dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Desa Kele'i yang terletak di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian yang cukup besar, khususnya komoditas ubi kayu. Ubi kayu telah lama menjadi tanaman pangan dan komoditas ekonomi yang dibudidayakan oleh masyarakat desa, baik sebagai sumber konsumsi rumah

tangga maupun sebagai bahan baku usaha skala kecil. Ketersediaan ubi kayu yang relatif melimpah sepanjang tahun menjadikan komoditas ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan agroindustri. Namun demikian, pemanfaatan ubi kayu di Desa Kele'i hingga saat ini masih didominasi oleh penjualan dalam bentuk segar dengan nilai ekonomi yang relatif rendah. Adapun, pengembangan agroindustri kerupuk ubi kayu telah berkembang secara mandiri oleh masyarakat sebagai usaha rumahan. Namun kegiatan tersebut masih berjalan secara konvensional tanpa analisis rantai nilai yang menyeluruh, belum dilandasi kajian kelayakan ekonomi, serta tidak memiliki strategi roadmap pengembangan jangka panjang. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya nilai tambah yang diterima pelaku usaha dan terbatasnya skala produksi.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kontribusi komoditas ubi kayu terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kele'i. Petani dan pelaku usaha kecil belum sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari komoditas yang mereka hasilkan. Rendahnya nilai tambah produk, keterbatasan teknologi pengolahan, serta minimnya akses pasar menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan usaha berbasis ubi kayu. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan ubi kayu sebagai sumber daya alam lokal melalui pengolahan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk pengembangan agroindustri yang potensial untuk diterapkan di Desa Kele'i adalah pengolahan ubi kayu menjadi produk keripik ubi kayu. Keripik ubi kayu merupakan produk olahan yang memiliki permintaan pasar cukup tinggi, baik di tingkat lokal maupun regional. Produk ini relatif mudah diproduksi dengan teknologi sederhana, memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan ubi kayu

segar, serta memberikan nilai tambah yang signifikan. Selain itu, usaha keripik ubi kayu dapat dijalankan oleh rumah tangga atau kelompok usaha kecil, sehingga sesuai dengan karakteristik ekonomi masyarakat pedesaan.

Pengembangan agroindustri keripik ubi kayu di Desa Kele'i tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penciptaan sistem usaha yang terintegrasi, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga pemasaran. Dengan pendekatan ini, agroindustri keripik ubi kayu diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan usaha juga menjadi kunci penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan agroindustri di tingkat desa.

Kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi lainnya, seperti kesempatan kerja, stabilitas usaha, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Agroindustri keripik ubi kayu berpotensi membuka lapangan kerja baru, terutama bagi perempuan dan pemuda desa, baik dalam proses produksi maupun kegiatan pendukung lainnya seperti pengemasan dan pemasaran. Dengan demikian, pengembangan agroindustri ini dapat berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan urbanisasi, sekaligus memperkuat struktur sosial ekonomi desa.

Selain aspek ekonomi, pengembangan agroindustri berbasis sumber daya alam lokal juga memiliki implikasi terhadap pelestarian dan keberlanjutan sumber daya tersebut. Pemanfaatan ubi kayu secara optimal melalui agroindustri mendorong masyarakat untuk menjaga keberlanjutan produksi bahan baku melalui praktik budidaya yang lebih baik. Dengan adanya kepastian pasar dan peningkatan nilai ekonomi, petani

memiliki insentif yang lebih besar untuk mengelola lahan secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hasil produksi.

Namun demikian, pengembangan agroindustri keripik ubi kayu di Desa Kele'i juga menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan modal usaha, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya dukungan kelembagaan dan kebijakan menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius. Tanpa adanya strategi penguatan yang komprehensif, potensi agroindustri yang dimiliki desa berisiko tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang terencana dan berbasis analisis dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam lokal melalui agroindustri. Dalam konteks tersebut, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam lokal berbasis agroindustri keripik ubi kayu menjadi suatu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kele'i. Optimalisasi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan volume produksi, tetapi juga sebagai upaya peningkatan efisiensi, kualitas produk, daya saing, serta keberlanjutan usaha. Pendekatan ini menuntut adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan agroindustri yang berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal.

Kontribusi utama dari chapter ini terletak pada penyajian studi kasus empiris yang mengintegrasikan konsep pemanfaatan sumber daya alam lokal, agroindustri, dan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pendekatan ini, diharapkan chapter ini dapat memberikan referensi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pengembangan agroindustri berbasis komoditas lokal di wilayah pedesaan lainnya.

Dengan demikian, pengembangan agroindustri keripik ubi kayu di Desa Kele'i tidak hanya menjadi solusi lokal, tetapi juga dapat menjadi model pengembangan ekonomi desa yang aplikatif dan berkelanjutan.



BAHAN PAKAN LOKAL SEBAGAI ALTERNATIF PAKAN TERNAK NON RUMINANSIA

Maria Yohanista, S.Pt., MP.¹⁵

Universitas Nusa Nipa

“Bahan pakan lokal menjadi alternatif pakan ternak non ruminansia yang ekonomis, berkelanjutan, dan mengurangi ketergantungan impor”

Komponen terbesar dalam suatu usaha peternakan adalah biaya pakan yang mencapai 60 – 70 % dari total biaya produksi (Rasyaf, 2011). Salah satu faktor yang menyebabkan harga pakan yang tidak stabil akibat fluktuasi harga dan ketersediaan global adalah ketergantungan yang tinggi terhadap bahan pakan impor, seperti jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan. Oleh karena itu, peternak mencari alternatif dengan memanfaatkan bahan pakan lokal untuk menjamin keberlanjutan sistem produksi ternak non ruminansia.

¹⁵ Penulis lahir di RS.St.Elisabet Lela, 03 Oktober 1989, merupakan Dosen di Program Studi Peternakan, Fakultas Teknologi Pangan, Pertanian dan Perikanan Universitas Nusa Nipa, menyelesaikan studi S1 di FAPET Universitas Brawijaya tahun 2011 dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana FAPET Universitas Brawijaya tahun 2014.

Pemanfaatan bahan pakan lokal sebagai alternatif pakan ternak non ruminansia diharapkan mampu menekan biaya produksi, meningkatkan kemandirian pakan, serta mendukung sistem peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Haryanto, 2014).

Ternak non ruminansia memiliki satu ruang perut untuk mencerna makanan atau disebut monogastric; proses pencernaan sederhana atau tidak. Tidak memiliki proses fermentasi kompleks di lambung depan sehingga membutuhkan pakan dengan kualitas nutrisi tinggi dan mudah dicerna. Nutrien utama yang diperlukan meliputi energi, protein, asam amino esensial, lemak, vitamin, dan mineral (NRC, 2012). Keterbatasan ternak non ruminansia dalam mencerna serat kasar menjadi faktor pembatas dalam pemanfaatan bahan pakan alternatif lokal yang umumnya mengandung serat tinggi dan senyawa anti nutrisi (Tillman *et al.*, 1998).

Potensi bahan pakan lokal sebagai sumber energi dan sumber protein. Bahan pakan lokal sumber energi yang berpotensi misalnya singkong, gaplek, sorgum, dedak padi, daun kelor, kulit sorgum, bungkil kacang mete dan kakao, dan tepung biji asam. Singkong dan produk turunannya memiliki kandungan karbohidrat tinggi sehingga dapat menggantikan sebagian jagung dalam ransum ternak non ruminansia (Tangendjaja, 2015). Sedangkan sumber protein misalnya bungkil kelapa, tepung ikan lokal, tepung daun gamal, serta serangga seperti larva *Black Soldier Fly* (BSF) yang memiliki kandungan protein tinggi dan profil asam amino yang cukup baik untuk ternak unggas dan ikan (Sogari *et al.*, 2019).



Gambar 1. Tepung Ikan Lokal dan Tepung Marungge



Gambar 2. Tepung Biji Lamtoro dan Tepung Biji Asam



Gambar 3. Dedak Jagung dan Bungkil Kacang Mente dan Kakao

Kandungan nutrisi beberapa bahan pakan lokal yang dapat digunakan sebagai pakan nonruminansia, dapat di lihat pada tabel 1.

Tabel 1. *Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Lokal*

No	Bahan Pakan	Kandungan Nutrisi						
		BK	PK (%)	LK (%)	SK (%)	EM (Kkal)	Ca	P
1	Jagung	87,0	8,9	4,0	3,0	3366,0	0,50	0,50
2	Dedak Padi	88,8	12,0	10,8	9,0	2980,0	0,09	1,07
3	Dedak Jagung	87,3	11,1	5,8	10,0	3366,0	0,09	0,50
4	Tepung Ikan	94,0	65,0	8,0	4,0	3080,0	5,50	2,73
5	Ampas Tahu	88,4	17,7	18,0	20,0	2400,0	0,19	0,29
6	Ampas Kelapa	91,0	11,4	30,0	17,0	1540,0	0,24	0,19
7	Daun Kelor	90,0	18,6	4,3	15,0	3000,0	2,00	0,03
8	Bunga Gamal	45,0	25,7	10,0	13,3	3226,0	1,50	0,20
9	Biji Lamtoro	90,0	31,9	8,1	20,5	3200,0	1,31	0,20
10	Kulit Sorgum	90,0	13,0	1,0	6,0	3500,0	28,00	287,00
11	Bungkil Kacang Mete	91,0	23,0	10,0	12,0	2400,0	3,25	1,00
12	Kakao	89,0	16,5	10,0	30,0	2600,0	3,25	0,60
13	Tepung Biji Asam	89,1	13,1	4,0	3,7	2000,0	0,30	0,10
14	Tepung Tapioka	91,0	1,1	0,3	0,4	3400,0	0,23	0,10
15	Minyak	73,7	0,0	98,0	0,0	9800,0	11,00	109,00

Penggunaan bahan pakan lokal masih minim karena beberapa alasan, antara lain adalah:

1. Memiliki kandungan nutrisi yang tidak seimbang misalnya kandungan protein rendah atau kualitas protein buruk dan kekurangan asam amino esensial (misalnya lisin dan metionin);
2. Memiliki nilai pencernaan yang rendah dimana ternak nonruminansia sulit mencerna serat kasar yang tinggi dan banyak bahan pakan lokal (dedak kasar, limbah pertanian) mengandung serat tinggi;
3. Memiliki kandungan zat antinutrisi yang dapat menurunkan performa ternak atau bahkan bersifat toksik misalnya asam fitat, tanin dan Sianida (pada singkong);
4. Memiliki kualitas dan ketersediaan tidak konsisten karena produksi bahan pakan lokal sering bersifat musiman dan variasi kualitas nutrisi tinggi antar daerah dan waktu;
5. Palatabilitas rendah yang dapat menyebabkan konsumsi pakan menurun dan pertumbuhan dan produksi menjadi tidak optimal;
6. Kurangnya standar mutu dan data nutrisi sehingga menyulitkan formulasi ransum yang akurat.

Oleh karena itu, bahan pakan lokal harus diberikan perlakuan terlebih dahulu sebelum diberikan ke ternak, antara lain dengan teknologi pengolahan fermentasi. Fermentasi adalah metode pengolahan bahan pakan organik menggunakan bantuan mikroorganisme (seperti bakteri, ragi, atau jamur) dalam kondisi terkontrol untuk meningkatkan kualitas nutrisi, memperbaiki daya cerna bahan pakan lokal serta menurunkan kandungan faktor anti nutrisi.

Kendala utama dalam pemanfaatan bahan pakan lokal meliputi variasi kualitas nutrisi, ketersediaan yang tidak kontinu, serta keterbatasan teknologi pengolahan di tingkat peternak. Namun, dengan dukungan riset, transfer teknologi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung, bahan pakan lokal memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai komponen utama ransum ternak non ruminansia (Tangendjaja & Wina, 2012).

Daftar Pustaka

- Haryanto, B. 2014. Pengembangan Pakan Berbasis Sumber Daya Lokal. Bogor: IPB Press.
- National Research Council (NRC). 2012. Nutrient Requirements of Swine. Washington DC: National Academy Press.
- Rasyaf, M. 2011. Beternak Ayam Pedaging. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sogari, G., Amato, M., Biasato, I., Chiesa, S., & Gasco, L. 2019. The potential role of insects as feed. *Animals*, 9(12), 119.
- Tangendjaja, B. 2015. Sumber Bahan Pakan Alternatif Unggas di Indonesia. *Wartazoa*, 25(2), 67–76.
- Tangendjaja, B., & Wina, E. 2012. Pemanfaatan Bahan Pakan Lokal Untuk Ternak Unggas. Bogor: Balai Penelitian Ternak



OPTIMALISASI PENANAMAN JAHE UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELOMPOK PETANI WEO BARU WONGA

Murdaningsih, SP., MP.¹⁶

Universitas Flores

“Strategi optimalisasi budidaya jahe dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan teknik budidaya, penguatan manajemen usaha tani, optimalisasi pascapanen, dan perluasan pasar”

Potensi Jahe sebagai Produk Utama Daerah

Jahe (*Zingiber officinale* Rosc.) merupakan tanaman rempah bernilai ekonomi tinggi dengan potensi pengembangan yang besar. Sebagai komoditas unggulan daerah, jahe dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bumbu masak, obat tradisional, minuman herbal, kosmetik, serta bahan baku industri kesehatan. Meningkatnya permintaan jahe di pasar lokal dan internasional menjadikan komoditas ini penting untuk

¹⁶ Penulis lahir di Magetan, 11 Pebruari 1972, merupakan Dosen di Program Studi Agroteknologi, Universitas Flores, menyelesaikan studi S1 di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang tahun 1997, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang tahun 2002 dan sekarang sebagai Dosen Tetap di Universitas Flores.

dikembangkan oleh petani (Dramawan et al., 2022; Nana et al., 2021). Dari aspek agroekologi, jahe memiliki daya adaptasi yang luas dan tumbuh optimal di wilayah tropis dengan curah hujan sedang serta tanah gembur kaya bahan organik. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik Desa Nduaria, sehingga budidaya jahe oleh Kelompok Tani Weo Baru Wonga memiliki prospek yang baik dan berpotensi menjadi sumber pendapatan utama maupun tambahan bagi petani.

Nilai tambah jahe dapat ditingkatkan melalui diversifikasi produk olahan seperti jahe instan, serbuk jahe, minuman herbal, jahe latte, dan permen jahe. Diversifikasi ini tidak hanya memperpanjang daya simpan, tetapi juga meningkatkan nilai jual, membuka peluang usaha rumah tangga, serta memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pada tahun 2023, luas tanam jahe di Kabupaten Ende mencapai 9.792 m² dengan produksi 3.625 kg (BPS NTT, 2023). Desa Nduaria di Kecamatan Kelimutu, dengan luas wilayah 21,53 km² dan jumlah penduduk 1.467 jiwa, membudidayakan jahe gajah, jahe merah, dan jahe emprit. Didukung lingkungan yang subur serta potensi agrowisata dan budaya, produk jahe Desa Nduaria berpotensi dikembangkan sebagai oleh-oleh khas daerah (Lisa, 2024).

Profil Kelompok Tani Weo Baru Wonga

Desa Nduaria merupakan salah satu sentra produksi jahe di Kabupaten Ende. Kelompok Tani Weo Baru Wonga secara aktif mengembangkan budidaya jahe dengan jumlah anggota 16 orang, terdiri atas 10 pria dan 6 wanita. Struktur organisasi kelompok meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, dengan pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan, administrasi, keuangan, serta pelaksanaan kegiatan pertanian.

Secara fungsional, Kelompok Tani Weo Baru Wonga berperan penting dalam pengembangan usaha jahe melalui penerapan teknologi budidaya yang lebih baik, pengelolaan produksi secara terorganisir, serta penguatan kerja sama dan kelembagaan ekonomi. Peran tersebut meningkatkan posisi tawar petani dalam pemasaran jahe, baik melalui penjualan kolektif maupun kemitraan dengan pelaku usaha dan industri pengolahan.

Kemampuan dan Kesempatan untuk Mengembangkan Budidaya Jahe

Tanaman jahe tumbuh optimal pada ketinggian 0–1.500 mdpl, dengan kondisi ideal di Indonesia pada 200–600 mdpl, curah hujan 2.500–3.000 mm per tahun, kelembapan sekitar 80%, serta pH tanah 5,5–7,0 (Yanti et al., 2021). Kondisi tanah Desa Nduaria yang subur, kaya bahan organik, dan beriklim sesuai sangat mendukung pertumbuhan jahe secara optimal.

Pengembangan jahe didukung oleh nilai ekonomi yang tinggi dan permintaan pasar yang relatif stabil. Pemanfaatan jahe sebagai rempah, bahan jamu, minuman herbal, farmasi, dan pangan olahan membuka peluang peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi produk, seperti jahe instan, minuman kesehatan, permen jahe, dan jahe latte, yang dapat meningkatkan nilai jual, memperpanjang daya simpan, serta menekan risiko fluktuasi harga jahe segar.

Keberadaan kelompok tani berperan penting dalam pengembangan budidaya jahe melalui penguatan kerja sama, akses terhadap sarana produksi, teknologi, pelatihan, dan jaringan pemasaran, serta membuka peluang dukungan dari pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait guna mendukung inovasi dan keberlanjutan usaha jahe.

Tantangan dalam Penanaman Jahe

Meskipun memiliki potensi besar, budidaya jahe di tingkat petani masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada rendahnya produksi dan pendapatan. Permasalahan utama terletak pada penerapan teknik budidaya yang masih bersifat tradisional, seperti penggunaan bibit yang kurang bermutu, pemupukan yang tidak seimbang atau tidak dilakukan, pengelolaan lahan yang kurang optimal, serta lemahnya pengendalian hama dan penyakit, sehingga hasil panen belum mencapai potensi maksimal (Zulfita et al., 2023). Selain itu, keterampilan petani dalam pengolahan jahe masih terbatas, sehingga produk umumnya dijual dalam bentuk segar dengan nilai jual rendah akibat minimnya inovasi, pemahaman standar mutu, dan keamanan pangan. Kendala pemasaran juga terjadi karena keterbatasan akses pasar, ketergantungan pada tengkulak, fluktuasi harga, serta belum terbangunnya kemitraan usaha yang berkelanjutan, sehingga nilai tambah jahe belum dimanfaatkan secara optimal.

Strategi Peningkatan Produksi Budidaya Jahe

Strategi optimalisasi budidaya jahe dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan teknik budidaya, penguatan manajemen usaha tani, optimalisasi pascapanen, dan perluasan pasar. Peningkatan teknik budidaya meliputi penggunaan bibit bermutu, pengolahan lahan yang baik, pengaturan jarak tanam, pemupukan organik seimbang, pengendalian hama terpadu, serta penerapan tumpang sari jahe–sorgum untuk efisiensi lahan dan peningkatan hasil.

Penguatan manajemen dilakukan melalui perencanaan usaha, pencatatan biaya dan hasil, serta penguatan peran kelompok tani sebagai wadah pembelajaran dan kerja sama. Optimalisasi pascapanen mencakup penanganan panen yang tepat dan pengembangan produk olahan bernilai tambah,

sedangkan strategi pemasaran diarahkan pada pemasaran kolektif, kemitraan usaha, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jaringan pasar.



Gambar 1. *Pengolahan Lahan, Pengolahan jahe dan Penguatan Kelompok*

Pengaruh Optimalisasi Penanaman Jahe terhadap Kesejahteraan Petani

Optimalisasi budidaya jahe berdampak positif terhadap kesejahteraan petani secara ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Penerapan teknologi pertanian meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil, sehingga mendorong peningkatan pendapatan, sementara diversifikasi produk olahan membuka peluang usaha dan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

Dari aspek sosial dan kelembagaan, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan memperkuat kemandirian, kepercayaan diri, serta posisi tawar petani, sekaligus memudahkan akses terhadap modal, kemitraan, dan penguatan peran kelompok tani dalam pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Ende. (2023). Kecamatan Kelimutu Dalam Angka 2023. <https://web-api.bps.go.id/download.php?>
- BPS NTT. (2023). Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten_Kota, 2022-2023. <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table?subject=557>
- Dramawan, A., Rusmini, R., & Ningsih, M. U. (2022). Pendampingan Pemanfaatan Jahe Merah Sebagai Bahan Pengobatan Non-Farmakologi Pada Masyarakat Desa Karang Bayan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.6622>
- Lisa. (2024). Potensi Jahe di Nduaria Menjadi Fokus Perhatian Bupati Ende. <https://ansorkroya.com/potensi-jahe-di-desa-nduaria-menjadi-fokus-perhatian-penjabat-bupati-ende/>
- Nana, N., Makiyah, Y. S., Susanti, E., Ramadhan, I. R., Bhinekas, R. Y., & Kanti, L. (2021). Budidaya dan Pengolahan Jahe Merah (*Zingiber officinale* var. *rubrum*) Menggunakan Teknologi Bag Culture Pada Masa New Normal di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v4i1.1038>
- Yanti, Y., Umami, I. M., Triana, L., & Hermeria, N. (2021). Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Jahe Di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*.
- Zulfitra, D., Nurmainah, N., & Asnawati, A. (2023). Budidaya Dan Pengolahan Jahe Merah Sebagai Produk Kesehatan Di Desa Tebang Kacang Kabupaten Kubu Raya. *MINDA BAHARU*. <https://doi.org/10.33373/jmb.v7i2.2695>

BAB III

PERAN PENDIDIKAN DAN PROGRAM SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



MENGAPA ADMINISTRASI PENDIDIKAN MENENTUKAN MUTU SEKOLAH

Dr. Sjakir Lobud, S.Ag. M.Pd.¹⁷

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

*“Administrasi pendidikan merupakan fondasi strategis
dan sistem penggerak utama dalam menentukan pencapaian
mutu sekolah secara berkelanjutan”*

Dalam diskursus pendidikan, mengapa mutu sekolah kerap dipersempit pada kualitas guru, kecanggihan kurikulum, atau kelengkapan sarana prasarana. Perspektif ini tidak sepenuhnya keliru, namun cenderung mengabaikan satu aspek mendasar yang justru menentukan keberlangsungan dan efektivitas seluruh komponen tersebut, yaitu keberadaan administrasi pendidikan. Administrasi sering dipahami secara

¹⁷ Penulis lahir di Kopandakan Kabupaten Bolaang Mongondouw Sulawesi Utara, tanggal 13 Maret 1969, penulis juga merupakan dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokrama Palu, penulis menyelesaikan gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam di IAIN Alauddin Makassar tahun 1995, kemudian gelar Magister Pendidikan diselesaikan di Universitas Negeri Makassar (UNM) tahun 2004, dan gelar Doktor Prodi Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Tadulako Palu tahun 2025.

sempit sebagai aktivitas teknis seperti pencatatan, pengarsipan, atau penyusunan laporan rutin. Padahal, dalam kerangka yang lebih substansial, administrasi pendidikan merupakan sistem penggerak yang menghubungkan visi, kebijakan, dan praktik pendidikan dalam satu alur kerja yang terarah dan berkelanjutan. Tanpa sistem administrasi yang kuat, berbagai sumber daya pendidikan tidak akan terkelola secara optimal, bahkan berpotensi kehilangan arah.

Sekolah sebagai organisasi formal tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip manajemen modern yang menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks ini, administrasi pendidikan berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan setiap proses berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Mutu sekolah pada hakikatnya merupakan hasil dari kinerja sistemik, bukan sekadar akumulasi kualitas individu. Oleh karena itu, kualitas administrasi menjadi faktor penentu yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta keberlanjutan peningkatan mutu secara keseluruhan.

Secara konseptual, mutu pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik peserta didik, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan manajemen mutu menempatkan kepuasan pengguna layanan pendidikan peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan. Dalam kerangka ini, mutu tidak bersifat statis, melainkan proses yang terus berkembang melalui perbaikan berkelanjutan. Dalam perspektif organisasi pendidikan juga menegaskan bahwa sekolah merupakan sistem sosial yang kompleks, di mana keberhasilan sangat ditentukan oleh keterpaduan antara struktur organisasi, kepemimpinan, budaya kerja, dan sistem administrasi.

Dengan demikian, administrasi pendidikan bukan sekadar objek pelengkap, melainkan fondasi yang menopang seluruh proses pencapaian mutu.

Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup berbagai aspek strategis yang saling berkaitan, mulai dari pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, hingga sarana, keuangan, dan hubungan dengan masyarakat. Setiap komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam satu sistem yang utuh. Kelemahan pada salah satu aspek akan berdampak pada keseluruhan kinerja sekolah. Misalnya, perencanaan pembelajaran yang tidak terintegrasi dengan kebijakan kurikulum akan mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan dan implementasi. Demikian pula, pengelolaan sumber daya manusia yang tidak profesional dapat menurunkan motivasi kerja dan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, administrasi pendidikan harus dipahami sebagai proses strategis yang mengelola keterkaitan antar-komponen secara sinergis.

Dalam perspektif efektivitas sekolah, administrasi memiliki peran penting dalam memastikan proses pembelajaran berlangsung secara optimal. Sekolah yang efektif tidak hanya ditandai oleh kualitas guru, tetapi juga oleh sistem yang mendukung kinerja mereka. Administrasi pendidikan berfungsi menerjemahkan kurikulum ke dalam rencana operasional yang jelas, mengatur beban kerja guru secara proporsional, serta memastikan evaluasi pembelajaran berjalan secara sistematis. Tanpa dukungan administrasi yang baik, proses pembelajaran cenderung berlangsung tanpa arah yang jelas, sulit diukur keberhasilannya, dan tidak memiliki kesinambungan. Dengan kata lain, administrasi menjadi instrumen yang mengubah potensi menjadi kinerja nyata.

Selain itu, administrasi pendidikan juga berkaitan erat dengan tata kelola sekolah yang baik. Dalam perspektif tata kelola modern, sekolah dituntut untuk mengedepankan prinsip

akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas. Administrasi yang baik memungkinkan pengelolaan sumber daya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan anggaran yang transparan, pengukuran kinerja berbasis indikator yang jelas, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan wujud dari administrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola ini, dan kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran sentral dalam menentukan kualitas administrasi pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai administrator yang bertanggung jawab mengelola seluruh sistem sekolah. Kepemimpinan yang efektif mampu menyelaraskan visi dengan praktik administratif, menggerakkan sumber daya manusia, serta membangun budaya organisasi yang kondusif. Dalam perspektif kepemimpinan transformasional, kepala sekolah dituntut tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menjadikan administrasi sebagai instrumen perubahan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan dalam ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab dan akuntabilitas, sebagaimana dinyatakan bahwa “setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya”. Nilai ini menegaskan bahwa administrasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga amanah moral yang harus dijalankan dengan integritas.

Lebih jauh, administrasi pendidikan berperan dalam membentuk budaya mutu di lingkungan sekolah. Budaya organisasi tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui proses yang panjang dan konsisten. Praktik administrasi yang tertib, sistematis, dan berorientasi pada perbaikan akan

menumbuhkan disiplin kerja, kejelasan peran, serta komitmen terhadap kualitas. Ketika administrasi dijalankan secara profesional, ia tidak lagi dipandang sebagai beban birokratis, tetapi sebagai bagian dari budaya kerja yang mendukung pencapaian tujuan bersama. Sebaliknya, administrasi yang lemah akan melahirkan budaya kerja yang tidak terarah, rendahnya akuntabilitas, serta minimnya inovasi. Namun demikian, implementasi administrasi pendidikan di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah kecenderungan mereduksi administrasi menjadi aktivitas rutin yang bersifat teknis dan administratif semata, tanpa memahami makna strategis dibaliknya. Selain itu, kompetensi manajerial tenaga kependidikan masih belum merata, sehingga pengelolaan administrasi belum sepenuhnya profesional. Beban kerja administratif yang tidak proporsional juga sering menjadi kendala, terutama bagi guru yang harus membagi waktu antara tugas mengajar dan administrasi. Di sisi lain, perkembangan teknologi menuntut adanya digitalisasi sistem administrasi, namun tidak semua sekolah siap menghadapi perubahan tersebut. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi pendidikan merupakan kebutuhan yang mendesak.

Dalam menghadapi berbagai dinamika tersebut, diperlukan perubahan cara pandang terhadap administrasi pendidikan. Administrasi harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan mutu sekolah, bukan sekadar kewajiban formal yang harus dipenuhi. Penguatan kapasitas manajerial, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyederhanaan prosedur administratif menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem administrasi yang efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan administrasi sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pada akhirnya, dapat ditegaskan bahwa administrasi pendidikan merupakan determinan utama dalam menentukan mutu sekolah. Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi sebagai kerangka sistemik yang mengatur seluruh proses pendidikan. Mutu sekolah tidak akan tercapai tanpa administrasi yang terencana, terorganisasi, dan berorientasi pada pelayanan. Sekolah yang unggul bukan hanya ditandai oleh prestasi akademik, tetapi juga oleh kemampuan mengelola sumber daya secara efektif, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari penguatan administrasi sebagai jantung pengelolaan sekolah. Dalam konteks ini, administrasi bukan lagi sekadar aktivitas birokratis, melainkan strategi utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

- Daryanto. (2013). *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta. Engkoswara, & Komariah, A. (2012). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Mulyasa, E. (2013). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara. Nawawi, H. (2015). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Purwanto, M. N. (2014). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sagalah, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, S. P. (2012). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bush, T. (2008). *Leadership and Management Development in Education*. London: Sage Publications.

- Bush, T., & Glover, D. (2014). *School Leadership Models: What Do We Know? School Leadership & Management*, 34(5), 553–571.
- Drucker, P. F. (2007). *The Essential Drucker*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Edmonds, R. (1979). Effective Schools for the Urban Poor. *Educational Leadership*, 37(1), 15– 24.
- Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Press.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2013). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education* (3rd ed.). London: Routledge.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). San Francisco: Jossey- Bass.
- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr. Muslim, I. H. (2003). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr



PENGOLAHAN LIMBAH PADAT WAFER DI PT X

Ir. Noneng Nurhayani, M.M.Pd.¹⁸

Universitas Islam Nusantara

“Limbah wafer adalah limbah yang termasuk kedalam limbah padat yang bersifat organik atau an organik dan masih bisa di kelola atau di manfaatkan dengan baik supaya tidak terbuang begitu saja”

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang dimaksud dengan Limbah adalah sisa usaha dan/atau kegiatan. Menurut PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Definisi ini mencakup limbah secara umum, termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang didefinisikan lebih lanjut

¹⁸ Penulis lahir di Ciparay Boyolali, 31 Januari 1964, merupakan Dosen di Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (PJKR), Fakultas Keolahragaan (FKOR) UNS Surakarta, menyelesaikan studi S1 di POK FKIP UNS tahun 1988, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Pendidikan Olahraga IKIP Jakarta tahun 1997, dan menyelesaikan S3 Prodi Ilmu Pendidikan Pascasarjana UNS Surakarta tahun 2018.

sebagai limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup serta membahayakan makhluk hidup.

Limbah organik merupakan limbah yang memiliki unsur hidrokarbon (hidrogen dan karbon) yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Contoh: Jasad Makhluk hidup, sisa makanan, kertas, kotoran hewan. Limbah anorganik merupakan limbah yang tidak memiliki unsur hidrokarbon (hydrogen dan karbon) dan sulit diuraikan oleh mikroorganisme, seperti: plastik, karet, besi, kaleng bekas, pecahan kaca. Limbah padat merupakan salah satu limbah yang paling banyak terdapat dilingkungan biasanya limbah padat disebut sampah.

Limbah wafer adalah limbah yang termasuk kedalam limbah padat yang bersifat organik atau an organik dan masih bisa di kelola atau di dimanfaatkan dengan baik supaya tidak terbuang begitu saja, dan salah satunya dengan memanfaatkan limbah hasil output produksi dan kembali mengolahnya sebaik mungkin agar bisa berguna, baik bagi masyarakat luas atau untuk perusahaan.

Limbah padat di klasifikasikan menjadi 6 kelompok:

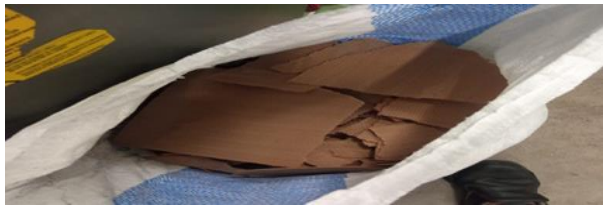
1. Sampah organik mudah busuk (garbage), yaitu limbah padat semi basah, berupa bahan-bahan organik yang mudah membusuk atau terurai mikroorganisme. Contoh: sisa dapur, sisa makanan, sampah sayuran, kulit buah-buahan.
2. Sampah anorganik dn organik tak membusuk (Rubbish), yaitu limbah padat anorganik atau organik cukup kering yang sulit terurai oleh mikroorganisme, sehingga sulit membusuk. Contoh: Selulosa, kertas, plastik, kaca, logam.

3. Sampah Abu (ashes), yaitu limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil pembakaran. Sampah ini mudah terbawa angin karena ringan dan tidak mudah membusuk.
4. Sampah bangkai binatang (dead animal), yaitu semua limbah yang berupa bangkai binatang, seperti tikus, ikan dan binatang ternak yang mati.
5. Sampah sapuan (street sweeping), yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang tersebar di jalanan, seperti dedaunan, kertas dan plastik.
6. Sampah Industri (Industrial waste), yaitu semua limbah padat yang bersal dari buangan industri. Komposisi sampah ini tergantung dari jenis industrinya.

Jenis limbah padat wafer di PT X yang dapat diolah ada 5 macam yaitu:

1. Bubuk sheet wafer

Gambar 1.
Bubuk sheet wafer

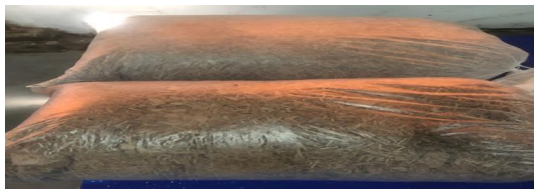


2. Buble sisa sheet wafer



Gambar 2.
Buble sisa sheet wafer

3. Bubuk sisa side cut



Gambar 3. *Bubuk sisa side cut*

4. Kemasan wafer



Gambar 4. *Kemasan wafer*

5. BS kue wafer



Gambar 5. *BS kue wafer nabati*

Metode

1. Limbah serbuk sheet dihancurkan dengan dibungkus terlebih dahulu menggunakan karung atau plastic kemudian setelah itu di giling/di haluskan menggunakan mesin penggiling, lalu ditimbang dan siap di edarkan kepada konsumen yang membutuhkan.

2. Proses selanjutnya yaitu pengolahan limbah bubble sheet,dengan cara BS bubble dipisahkan dan dibungkus menggunakan plastic, kemudian di timbang sesuai dengan kebutuhan konsumen. BS bubble ini biasa digunakan untuk keperluan makanan hewan seperti sapi/kambing
3. Lalu lanjut ke proses pengolahan bubble sisa side cut,dilakukan dengan cara di pisahkan lalu dibungkus menggunakan plastic/karung, kemudian ditimbang menggunakan alat timbangan sesuai kebutuhan dan BS side cut pun siap di ambil oleh konsumen yang membutuhkan, karena BS side cut ini masih sangat layak untuk di konsumsi selama dbelum kadaluwarsa (expired)
4. Kemasan wafer. Proses pengolahan BS ini dilakukan dengan cara di pisahkan terlebih dahulu, kedalam plastic,lalu kemudin di bakarr atau di hancurkan karena BS kemasan plastic tidak dapat di gunakan lagi.tetapi untuk BS karton/Inner masih bisa di gunakan apabila ada salah coding atau lagi ada trouble pada mesin Ultra
5. Proses yang terakhir yaitu proses pengolahan wafer kue yang tidak lolos sesuai standard QC. Proses ini dilakukan dengan cara memisahkan terlebih dahulu BS kue/ wafer yang tidak sesuai standard QC kemudian di timbang,lalu di pisahkan dan di simpan diatas Hand valet, setelah itu BS kue/wafer siap di jual ke konsumen yang membutuhkan karena BS kue yang satu ini masih sangat layak juga untuk di konsumsi, namun tidak memiliki bentuk yang sempurna seperti kue yang biasa nya.

Pemanfaatan Limbah Wafer PT X

Pengolahan Limbah wafer ini menjadikannya lebih berguna atau bermanfaat tentunya memberikan keuntungan :

1. Tidak merugikan Perusahaan
2. Produk masih layak untuk di Produksi oleh konsumen
3. Masih bisa saling menguntungkan antara konsumen&perusahaan meskipun produk yang di jual berupa BS.

Sebenarnya tidak begitu banyak dampak negative yang di hasilkan dari pengolahan limbah wafer di PT X ini, akan tetapi untuk hasil pembakaran limbah kemasan wafer tentu pihak perusahaan juga sudah memikirkan hal ini secara bijaksana supaya tidak tercemar ke lingkungan. Produksi yang harus selalu menerapkan standard GMP di dalamnya. Kemudian perusahaan juga sudah meng antisipasi dengan sangat cermat supaya asap darisisa pembakaran limbah kemasan tidak menyebar ke lingkungan masyarakat setempat.

Limbah Wafer ini rata-rata masih sangat layak untuk di gunakan atau di konsumsi untuk masyarakat luas ,meskipun bentuknya tidak begitu sempurna seperti hal layaknya produk yang bagus. Oleh karena itu pihak perusahaan berusaha memanfaatkan limbah-limbah atau BS ini sebaik mungkin supaya tidak terbuang begitu saja.

Dafta Pustaka

Anonim, P. P. (2021). Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<https://pendidikan.co.id/pengertian-limbah-menurut-ahli-jenis-karakteristik-dan-dampaknya/>

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-limbah/26/06/201912.46>

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



DINAMIKA PENDIDIKAN PASCA-BENCANA: DARI TEORI KE PRAKTIK

Annisa Sri Sugiarti, S.Si.,M.Si.¹⁹

Universitas Muhammadiyah Aceh

“Gerakan yang terstruktur dalam pencak silat dapat melatih anak untuk belajar kelincahan, keseimbangan dan koordinasi yang merupakan keterampilan motorik dasar”

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia karena terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif. Kondisi ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap bencana geologis maupun bencana hidrometeorologis. Dalam dua dekade terakhir telah terjadi berbagai bencana besar yang terjadi di Indonesia. Bencana tersebut seperti gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 sampai bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh siklon Senyar yang terjadi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Akibat dari

¹⁹ Penulis lahir di Banda Aceh, 22 April 1991, merupakan Dosen di Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di Prodi Fisika FMIPA USK tahun 2014, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Ilmu Kebencanaan tahun 2019.

bencana tersebut ribuan anak sekolah mengalami gangguan serius dalam proses pendidikan. Sekolah rusak, guru terdampak dan proses belajar mengajar terhenti untuk waktu yang tidak singkat akibat dari lumpuhnya infrastruktur pendidikan. Sehingga pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap bencana.

Provinsi Aceh merupakan salah satu contoh kuat bagaimana suatu bencana dapat mengguncang sekaligus mentransformasikan sistem pendidikan. Bagi anak-anak penyintas bencana, sekolah tidak lagi menjadi suatu tempat untuk belajar, akan tetapi juga menjadi ruang untuk memproses kehilangan dan trauma. Sehingga dalam kondisi ini, pendidikan pasca-bencana menjadi sarana penting untuk memulihkan stabilitas sosial dan psikologis sekaligus mengembalikan harapan masyarakat terhadap masa depan.

Secara teori, pendidikan pasca-bencana dipahami sebagai bagian dari proses pemulihan dan pembangunan kembali yang lebih baik. Pendidikan tidak hanya bertugas mengembalikan kegiatan belajar seperti sebelum terjadinya bencana, tetapi juga membangun sistem yang lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa depan. Sekolah yang terletak di wilayah rawan bencana sebaiknya dirancang sebagai ruang amans e cara fisik sekaligus sebagai ruang pembelajaran tentang risiko, kesiapsiagaan dan adaptasi terhadap bencana. Sehingga pendidikan pasca-bencana memiliki fungsi sebagai tempat untuk membangun ketangguhan masyarakat.

Jika dilihat dari konteks pendidikan pasca-bencana di Aceh, proses pendidikan berkembang melalui proses adaptasi di lapangan. Pada masa darurat pasca-bencana gempa dan tsunami, proses belajar mengajar dilakukan di tenda-tenda dan ruangan sementara yang dibangun oleh pemerintah dan lembaga kemanusiaan. Meskipun dengan sarana yang terbatas, sekolah tetap dijalankan karena keberadaan rutinitas belajar terbukti membantu anak-anak memulihkan rasa aman dan

kestabilan emosi. Guru dan para relawan menggunakan pendekatan yang lebih empatik, kreatif dan fleksibel untuk menyesuaikan pembelejaran dengan kondisi psikologis para siswa.

Seiring berjalannya waktu pendidikan pasca-bencana pada akhirnya tidak hanya dipahami sebagai respons jangka pendek terhadap situasi darurat, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang di wilayah rawan bencana seperti di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. Sehingga dari perspektif teori hingga praktik di lapangan, pendidikan telah terbukti menjadi sarana utama dalam memulihkan tatanan sosial, membangun kembali kepercayaan diri anak-anak serta menanamkan kembali nilai-nilai kesiapsiagaan. Sekolah yang semula menjadi tempat terdampak pada saat terjadinya bencana, kini bertransformasi menjadi pusat pembelajaran risiko dan ketangguhan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman dari banyaknya wilayah yang terkena bencana, pendidikan sebaiknya dirancang secara kontekstual dan adaptif terhadap risiko bencana. Maka proses belajar tidak hanya menghasilkan pengetahuan akademik tetapi juga kemampuan bertahan dan beradaptasi. Integrasi pendidikan kebencanaan ke dalam kehidupan sekolah, keterlibatan guru dan komunitas, serta penggunaan pengalaman bencana sebagai sumber pembelajaran telah mengubah cara anak-anak memahami lingkungan dan keselamatan diri. Inilah wujud nyata dari peralihan dari teori pemulihan menuju praktik pendidikan yang membangun ketangguhan. Sehingga dinamika pendidikan pasca-bencana di Indonesia mencerminkan pentingnya menjadikan sekolah sebagai pondasi pengurangan risiko bencana. Pendidikan tidak hanya berperan dalam membantu anak-anak untuk bangkit dari trauma terhadap kejadian bencana, tetapi juga dalam menyiapkan generasi yang lebih siap dalam menghadapi risiko

bencana di masa depan. Ketika teori pendidikan dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan maka pendidikan akan menjadi kekuatan transformatif dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan berdaya dalam menghadapi bencana.



PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM OBE (OUTCOME- ORIENTED EDUCATION) BAGI GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

Aqodiah, M.Pd.I.²⁰

Universitas Muhammadiyah Mataram

*"Pendampingan kurikulum Outcome-Oriented Education
meningkatkan kompetensi pedagogik guru Madrasah Ibtidaiyah
dan kualitas pembelajaran berbasis capaian"*

Transformasi pendidikan dasar pada era abad ke-21 menuntut adanya perubahan paradigma pembelajaran yang lebih menekankan pada capaian hasil belajar peserta didik secara komprehensif. Pendidikan tidak lagi cukup berorientasi pada penguasaan materi dan ketercapaian target

²⁰ Penulis lahir di Sumbawa, NTB, pada 15 Februari 1974. Saya saat ini menjabat sebagai Dosen di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di IAIN Mataram pada tahun 1996, dengan fokus studi di bidang Agama Islam. Kemudian, saya melanjutkan studi Magister (S2) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan meraih gelar Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) pada tahun 2012.

administratif, melainkan harus memastikan bahwa setiap proses pembelajaran menghasilkan kompetensi nyata yang dapat diukur, diamati, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan *Outcome-Oriented Education* (OBE) hadir sebagai model kurikulum yang menempatkan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) sebagai pusat dari seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran (Spady, 2022).

Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai lembaga pendidikan dasar berciri khas keislaman memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi intelektual, spiritual, dan karakter peserta didik. Namun, berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum di MI masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam mengaitkan tujuan pembelajaran dengan capaian hasil belajar yang terukur dan bermakna. Pembelajaran masih cenderung berorientasi pada penyelesaian materi, penggunaan metode konvensional, serta penilaian yang dominan berbasis tes tertulis, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan capaian kompetensi peserta didik secara holistik (Kementerian Agama RI, 2023).

Kurikulum berbasis Outcome-Oriented Education menawarkan pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. OBE menuntut guru untuk merumuskan capaian pembelajaran secara jelas, spesifik, dan kontekstual, kemudian merancang strategi pembelajaran serta asesmen yang selaras dengan capaian tersebut. Dalam konteks MI, OBE tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan sikap religius, keterampilan sosial, dan karakter Islami peserta didik. Dengan demikian, OBE sejalan dengan tujuan pendidikan madrasah yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan akhlak mulia (Tilaar, 2022).

Konsep dan Prinsip Pendampingan Implementasi Kurikulum OBE bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah

Pendampingan implementasi kurikulum *Outcome-Oriented Education* (OBE) bagi guru Madrasah Ibtidaiyah harus didasarkan pada prinsip-prinsip pedagogik yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendampingan tidak dapat dipahami sekadar sebagai kegiatan pelatihan sesaat, melainkan sebagai proses pembelajaran orang dewasa (*adult learning*) yang menempatkan guru sebagai subjek aktif dalam pengembangan kompetensi profesionalnya. Dalam konteks ini, pendampingan menjadi medium transformasi paradigma pembelajaran dari berorientasi proses menuju berorientasi capaian hasil belajar.

Prinsip utama pendampingan OBE adalah *constructive alignment*, yaitu keselarasan antara capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, dan asesmen. Guru MI perlu didampingi agar mampu memahami keterkaitan ketiga komponen tersebut secara utuh dan aplikatif. Tanpa pendampingan yang sistematis, konsep OBE berpotensi dipahami secara parsial dan berhenti pada tataran dokumen perencanaan, tanpa berdampak nyata pada praktik pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, pendampingan harus dirancang sebagai proses yang berkesinambungan, reflektif, dan berbasis kebutuhan nyata guru.

Model Pendampingan Implementasi Kurikulum OBE

Model pendampingan implementasi kurikulum OBE dirancang dalam beberapa tahapan yang saling terkait dan membentuk satu siklus berkelanjutan. Setiap tahapan memiliki tujuan spesifik, namun keseluruhannya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah.

Bagan Alir Model Pendampingan Implementasi Kurikulum OBE



Tahapan Pendampingan dan Implementasinya

Tahap pertama dalam model pendampingan adalah identifikasi kebutuhan guru. Pada tahap ini, pendamping melakukan pemetaan awal terhadap pemahaman guru mengenai kurikulum OBE. Tahap kedua adalah penguatan konsep kurikulum OBE. Guru diberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip OBE, perbedaan antara tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, serta pentingnya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Tahap selanjutnya adalah pendampingan perumusan capaian pembelajaran dan penyusunan perangkat pembelajaran berbasis OBE. Implementasi pembelajaran di kelas merupakan tahap krusial dalam pendampingan OBE. Tahap akhir adalah refleksi dan evaluasi pembelajaran. Guru diajak untuk merefleksikan praktik pembelajaran yang telah dilakukan, mengidentifikasi keberhasilan dan kendala, serta merumuskan perbaikan yang diperlukan. Refleksi ini menjadi dasar bagi siklus pendampingan berikutnya, sehingga implementasi OBE terus mengalami penguatan dan penyempurnaan.

Hasil dan Dampak Pendampingan Implementasi Kurikulum OBE bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah

Pelaksanaan pendampingan implementasi kurikulum *Outcome-Oriented Education* (OBE) bagi guru Madrasah Ibtidaiyah memberikan berbagai hasil dan dampak positif yang signifikan, baik pada aspek kompetensi guru maupun pada kualitas pembelajaran di kelas. Hasil pendampingan ini tidak hanya terlihat pada perubahan dokumen perencanaan pembelajaran, tetapi juga pada transformasi paradigma guru dalam memaknai proses dan tujuan pembelajaran. Guru tidak lagi sekadar berorientasi pada penyampaian materi, melainkan pada ketercapaian hasil belajar peserta didik secara utuh dan berkelanjutan.

Salah satu hasil utama pendampingan adalah meningkatnya pemahaman guru MI terhadap konsep OBE dan prinsip *constructive alignment*. Guru mulai mampu membedakan antara tujuan pembelajaran yang bersifat umum dengan capaian pembelajaran yang spesifik dan terukur. Hal ini berdampak pada perencanaan pembelajaran yang lebih terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan setelah pendampingan menunjukkan keselarasan yang lebih kuat antara capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen.

Dari sisi praktik pembelajaran, pendampingan OBE mendorong guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada peserta didik. Guru mulai memanfaatkan berbagai metode pembelajaran partisipatif, seperti diskusi kelompok, penugasan berbasis proyek sederhana, dan refleksi pembelajaran.

Perubahan ini berdampak pada meningkatnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, suasana kelas yang lebih interaktif, serta munculnya kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif sejak jenjang pendidikan dasar.

Daftar Pustaka

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Kurikulum Merdeka pada Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Rahman, A., & Yusof, R. M. (2023). Outcome-based education and teacher professional development: Evidence from primary education. *Journal of Education and Learning*, 12(4), 512–524.
- Spady, W. G. (2022). *Outcome-Based Education: Critical Issues and Answers*. New Jersey: Pearson Education.
- Suryani, T., & Huda, N. (2024). Pendampingan guru dalam implementasi kurikulum berbasis capaian pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), 33–48.
- Tilaar, H. A. R. (2022). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widodo, H., & Nurhadi, M. (2023). Authentic assessment in outcome-oriented learning at primary schools. *International Journal of Instruction*, 16(2), 145–160.

Yamin, M., & Syahrir. (2022). *Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Capaian Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin, Z., & Perera, C. J. (2024). Teacher mentoring models for outcome-oriented curriculum implementation. *Teaching and Teacher Education*, 132, 104214



INTERNALISASI NILAI EMPATI DAN TOLERANSI DALAM PENDIDIKAN IPS MELALUI WORKSHOP ANTI-BULLYING PADA SISWA MTSN 1 LAMPUNG TIMUR

Anita Lisdiana, M.Pd.²¹

Universitas Jurai Siwo Lampung

“Pendidikan IPS berperan strategis dalam menanamkan nilai empati dan toleransi sebagai upaya membangun budaya sekolah yang bebas dari bullying”

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman sosial, budaya, dan latar belakang individu. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan karakter peserta didik sebagai warga masyarakat yang beradab (Kemendikbud, 2020). Maraknya perilaku perundungan, juga dikenal sebagai *bullying*, di lingkungan

²¹ Penulis lahir di Lampung, 21 Agustus 1993, merupakan Dosen di Program Studi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Pendidikan IPS Universitas Lampung (Unila) Tahun 2017.

sekolah, baik secara fisik, verbal, maupun sosial, adalah salah satu masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. *Bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan lebih terhadap individu atau kelompok lain yang lebih lemah. Perilaku ini menimbulkan dampak negatif pada korban secara psikologis, sosial, dan akademik (Olweus, 1993). Ini juga mempengaruhi lingkungan sekolah secara keseluruhan, seperti menurunkan rasa aman, kenyamanan belajar, dan kualitas interaksi sosial antar siswa di sekolah (Coloroso, 2007).

Perilaku *bullying* seringkali dipicu oleh rendahnya kemampuan empati dan sikap toleransi di kalangan peserta didik. Kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan kondisi emosional orang lain disebut empati. Di sisi lain, toleransi adalah sikap yang menghargai perbedaan dan menerima keberagaman dalam kehidupan sosial (Goleman, 2006). Jika siswa tidak menginternalisasi prinsip empati dan toleransi, mereka dapat menjadi kurang peka terhadap perasaan orang lain dan lebih cenderung melakukan tindakan yang merugikan sesama.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai sosial, seperti empati, toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan IPS bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial agar mampu memahami realitas sosial serta berperan aktif sebagai warga masyarakat yang demokratis dan berkeadaban (Sapriya, 2017). Oleh karena itu, pendidikan IPS berfungsi sebagai cara yang strategis untuk menumbuhkan karakter sosial siswa dan sekaligus mencegah perilaku menyimpang, seperti pelecehan. Untuk internalisasi nilai empati dan toleransi, siswa memerlukan pengalaman langsung, pembiasaan, dan refleksi. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual

diperlukan. Workshop anti-bullying yang dirancang secara partisipatif dan edukatif adalah salah satu contohnya.

Melalui diskusi, simulasi, dan studi kasus, kelas anti-*bullying* memberi siswa kesempatan untuk mengenali berbagai jenis *bullying* dan efeknya. Metode ini sejalan dengan pendidikan karakter, yang menekankan bahwa siswa harus berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran nilai (Koesoema, 2010). Sebagai institusi pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, MTsN 1 Lampung Timur memiliki peran penting dalam membangun siswa yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai persaudaraan, dan mampu menghargai perbedaan sesama manusia. Nilai empati dan toleransi sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, workshop anti-*bullying* digabungkan dengan pendidikan IPS adalah langkah strategis untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berkarakter.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menanamkan nilai empati dan toleransi dalam pendidikan IPS dengan mengadakan workshop anti-*bullying* untuk siswa MTsN 1 Lampung Timur. Diharapkan bahwa kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap peserta didik tentang cara mencegah dan menanggulangi perilaku *bullying*. Ini juga akan memperkuat peran IPS dalam membangun karakter sosial dan moral peserta didik.

Tujuan Pengabdian

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menanamkan nilai empati dan toleransi dalam pendidikan IPS melalui workshop anti-*bullying*. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan sikap dan perilaku peserta didik yang saling menghargai dan mencegah perilaku perundungan

terjadi di lingkungan MTsN 1 Lampung Timur. Secara khusus, inisiatif pengabdian ini adalah untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang definisi, jenis, dan efek perilaku *bullying* dalam kehidupan sekolah.
2. Siswa harus dididik tentang pentingnya karakter sosial seperti empati dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Pendidikan IPS membantu siswa menginternalisasi prinsip empati dan toleransi, yang dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari di lingkungan sekolah.
4. Pendidikan sikap sosial dan keterampilan siswa dalam menghargai perbedaan, mengelola konflik, dan menangkal dan menanggapi *bullying* secara positif.
5. Mempromosikan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berkeadaban yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan prinsip keislaman.
6. Memperkuat fungsi pendidikan IPS sebagai tempat untuk membangun karakter dan mencegah siswa berperilaku menyimpang.

Metode yang Digunakan dalam Pengabdian

Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif. Workshop anti-*bullying* adalah contohnya. Teknik yang diterapkan termasuk:

1. Ceramah interaktif bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang definisi, jenis, dan efek *bullying* serta pentingnya prinsip toleransi dan empati dalam pendidikan IPS.

2. Diskusi dan studi kasus untuk melibatkan siswa dalam mempelajari masalah perundungan dan menanamkan empati dan toleransi.
3. Simulasi/*role play* dan refleksi, untuk melatih keterampilan sosial siswa dalam menghadapi situasi perundungan dan memperkuat pemahaman mereka tentang nilai toleransi dan empati dalam kehidupan sehari-hari melalui simulasi dan refleksi. Metode ini digunakan untuk memastikan siswa tidak hanya memahami konsep anti-*bullying* tetapi juga mampu menerapkan prinsip empati dan toleransi di lingkungan sekolah.

Hasil dan Diskusi

Siswa di MTsN 1 Lampung Timur mengikuti workshop anti-*bullying* sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ini menunjukkan hasil yang positif. Siswa sangat terlibat dalam kegiatan ini, seperti yang ditunjukkan oleh partisipasi mereka dalam ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan simulasi yang diberikan. Siswa dapat memahami arti *bullying*, jenisnya, dan efek negatif perilaku *bullying* terhadap korban, lingkungan sekolah, dan siswa. Siswa lebih memahami pentingnya nilai toleransi dan empati dalam interaksi sosial, menurut temuan diskusi dan studi kasus. Siswa sudah belajar menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan IPS yang dikombinasikan dengan kelas anti-*bullying* efektif dalam menanamkan nilai-nilai sosial pada siswa.

Melalui aktivitas simulasi dan *role play*, siswa dapat mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap perilaku *bullying*. Kegiatan ini mengajarkan mereka tidak hanya bahwa *bullying* adalah perilaku yang harus dihindari, tetapi mereka

juga siap untuk bertindak sebagai pihak yang peduli dan membantu ketika mereka melihat bullying terjadi. Siswa telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip toleransi dan empati dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, seperti yang ditunjukkan oleh refleksi yang dilakukan di akhir kegiatan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mendukung kesimpulan bahwa pendidikan IPS dapat membantu mengurangi perilaku pelecehan dengan mengajarkan nilai empati dan toleransi. Workshop anti-*bullying* telah terbukti berguna untuk membangun karakter sosial siswa dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Coloroso, B. (2007). *The bully, the bullied, and the bystander*. New York, NY: HarperCollins.
- Goleman, D. (2006). *Emotional intelligence*. New York, NY: Bantam Books.
- Kemendikbud. (2020). *Penguatan pendidikan karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Koesoema, D. (2010). *Pendidikan karakter: Strategi mendidik anak di zaman global*. Jakarta: Grasindo.
- Lickona, T. (2012). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York, NY: Bantam Books.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford, UK: Blackwell.
- Sapriya. (2017). *Pendidikan IPS: Konsep dan pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI INDONESIA, FOKUS PADA TANTANGAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI (SLHS)

Neneng Fauziah, S.Sos., MM.²²

Universitas Islam 45 Bekasi

*“Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk SPPG dan Dapur MBG:
Jaminan Mutu dan Keamanan Makanan Olahan”*

Program pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah telah dilaksanakan di sejumlah negara, di Indonesia program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada tanggal 6 Januari 2025, Implementasinya akan dilakukan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang Pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan SMA/Sebagai yang berada di wilayah kabupaten/kota.

²² Penulis lahir di Bekasi, 29 Mei 1969, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi, menyelesaikan studi S1 di IAN FISIP UNISMA Bekasi tahun 1994, menyelesaikan S2 di STIE Ganesha Jakarta tahun 2003.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto yang mulai disosialisasikan secara nasional sejak awal masa pemerintahan mereka pada tahun 2024.

Hasil peninjauan lapangan dan pemberitaan dari beberapa media lokal seperti Radar Bekasi (2025), GoBekasi (2025), RMOL (2025), dan Pikiran Rakyat (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar dapur penyedia makanan belum mengantongi SLHS, sebuah sertifikat wajib yang menjamin bahwa fasilitas pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga, yang menegaskan bahwa setiap tempat pengolahan makanan wajib memenuhi standar tertentu meliputi kondisi fisik bangunan, pengelolaan bahan pangan, peralatan, personal hygiene pekerja, serta sistem pengawasan mutu makanan. Dengan demikian, ketiadaan SLHS berarti dapur penyedia makanan belum secara resmi diakui aman dan layak dalam aspek kesehatan lingkungan.

Dalam konteks Program MBG di Kabupaten Bekasi, temuan bahwa sebagian besar dapur belum memiliki SLHS menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan kesiapan daerah dalam implementasi teknis. Berdasarkan laporan Radar Bekasi (10 Oktober 2025), hanya sekitar lima dapur MBG di wilayah tersebut yang sudah mengantongi rekomendasi SLHS, sementara sisanya — diperkirakan lebih dari 50 dapur — masih dalam proses pembinaan atau belum memenuhi standar sama sekali. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, karena tanpa jaminan kebersihan dan kelayakan sanitasi, potensi kontaminasi makanan dapat meningkat, yang pada gilirannya berisiko terhadap kesehatan anak-anak penerima manfaat. Di sisi lain, pemerintah daerah berdalih bahwa keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan

anggaran menjadi faktor utama yang menyebabkan keterlambatan pemenuhan sertifikat tersebut.

Di sisi lain, penting juga untuk meninjau program MBG dalam kerangka pembangunan nasional yang lebih luas. Dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*, pemerintah menetapkan target penurunan angka stunting hingga di bawah 10% dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang ditopang oleh gizi anak yang baik. MBG merupakan strategi intervensi langsung yang diharapkan mampu memperbaiki asupan gizi harian anak-anak sekolah, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerentanan pangan tinggi.

Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada dasarnya merupakan tolak ukur utama yang memastikan bahwa fasilitas pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan lingkungan, sanitasi peralatan, dan kesehatan pekerja. Proses untuk memperoleh SLHS tidak sekadar administratif, tetapi juga teknis dan evaluatif. Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan lapangan (inspeksi sanitasi) untuk menilai beberapa aspek, antara lain:

1. Kelayakan bangunan dapur dan ventilasi,
2. Kualitas air yang digunakan dalam pengolahan makanan,
3. Sistem pembuangan limbah cair dan padat,
4. Kebersihan alat masak dan penyimpanan bahan pangan,
5. Personal hygiene tenaga pengolah makanan, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala,
6. Pengendalian hama dan serangga, serta
7. Manajemen distribusi makanan untuk menjaga suhu dan keamanan pangan.

Dari perspektif kebijakan publik, persoalan ini menunjukkan adanya gap antara perencanaan makro dan kapasitas mikro di lapangan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan target ambisius agar program MBG dapat menjangkau seluruh sekolah di Indonesia dalam waktu singkat.

Selain itu, terdapat pula dimensi ekonomi dan sosial yang memperumit situasi. Banyak dapur penyedia MBG berasal dari usaha katering rumahan yang baru pertama kali terlibat dalam proyek pemerintah berskala besar. Sebagian di antara mereka tidak memiliki fasilitas pengolahan makanan yang memadai atau pengetahuan tentang standar SLHS. Ketika pemerintah daerah mewajibkan sertifikasi, mereka dihadapkan pada biaya tambahan untuk memperbaiki dapur, membeli peralatan baru, atau melakukan renovasi agar sesuai dengan standar kesehatan.

Beberapa penyedia katering bahkan menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui secara rinci prosedur pengajuan SLHS. Dalam wawancara media lokal, sejumlah pengelola dapur mengaku belum mendapat sosialisasi menyeluruh tentang tahapan inspeksi atau persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dari pemerintah daerah ke pelaku lapangan belum berjalan optimal.

Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan program. Beberapa laporan media menyebutkan bahwa data mengenai dapur yang telah atau belum memiliki SLHS tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat sulit melakukan pengawasan. Padahal, keterbukaan informasi merupakan prinsip penting dalam kebijakan sosial berbasis pelayanan publik.

Dengan transparansi, masyarakat dapat ikut serta memantau mutu makanan dan mendorong pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas layanan mereka.

Fenomena keterlambatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) di Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural, administratif, sosial, dan teknis. Meskipun pada tingkat makro kebijakan ini memiliki visi yang sangat positif — yakni menjamin hak anak atas gizi seimbang dan sehat — implementasi di tingkat mikro memperlihatkan adanya hambatan serius yang berakar pada sistem birokrasi, sumber daya manusia, hingga persepsi sosial terhadap pentingnya standar higienis dalam pengolahan makanan publik.

Dampak Kesehatan dan Sosial terhadap Anak-anak

Keterlambatan pemenuhan SLHS bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kesehatan penerima manfaat program, yaitu anak-anak sekolah dasar. Anak-anak merupakan kelompok rentan yang memiliki sistem imun belum sempurna. Jika mereka mengonsumsi makanan yang diolah di lingkungan yang tidak higienis, risiko terkena penyakit akibat makanan (foodborne disease) meningkat signifikan. Berdasarkan data WHO, sekitar 70% kasus diare pada anak di negara berkembang disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi.

Evaluasi Kebijakan dan Tata Kelola Program MBG

Dari perspektif evaluasi kebijakan publik, pelaksanaan MBG di Kabupaten Bekasi memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan (policy design) dan implementasi (policy implementation). Menurut teori Van

Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh enam variabel: (1) standar dan tujuan kebijakan yang jelas, (2) sumber daya yang memadai, (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) komunikasi antarorganisasi, (5) kondisi sosial-ekonomi, dan (6) disposisi pelaksana. Dalam konteks MBG, setidaknya empat dari enam variabel tersebut mengalami hambatan serius.

Pertama, standar kebijakan mengenai keamanan pangan memang sudah jelas, tetapi tidak disertai mekanisme implementatif yang realistis di tingkat daerah. Kedua, sumber daya finansial dan teknis di tingkat lokal belum memadai untuk menegakkan seluruh standar tersebut secara serentak. Ketiga, komunikasi antarinstansi masih lemah, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak terkoordinasi dengan baik. Keempat, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang heterogen membuat penerapan standar formal seperti SLHS tidak mudah diterima oleh semua pelaku usaha. Dengan demikian, kegagalan pemenuhan SLHS di Bekasi dapat dikategorikan sebagai bentuk implementation gap, di mana kebijakan yang baik di atas kertas tidak diikuti kesiapan sistem di lapangan.

Daftar Pustaka

- Ade Risna Sari, 2025, Analisis Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Perumusan Kebijakan Program Makanan Bergizi Gratis Di Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Internasional ilmu sosial dan Pendidikan (INJOSEDU), Vol 2 no 9, 2587-2606, eISSN; 3047-6151
- Alfi Sophian, 2025, Pengelolaan higienitas dan sanitasi sekolah untuk mendukung mutu MBG, Policy Brief.
- Badan Pangan Nasional (Bapanas). (2024). Strategi Nasional Ketahanan Pangan Berbasis Gizi. Jakarta: Bapanas.

Denis Arfian, 2025, Baru 41 dari 103 SPPG di Kota Bekasi Lolos Sertifikasi SLHS, Radar Bekasi, 21 nopember 2025.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (2021). Pedoman pengembangan peta jalan penelitian dan pengabdian masyarakat di pendidikan tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diambil dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2023). Pedoman Program Makanan Bergizi untuk Siswa.

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Novianti Nurullah, 2025, SPPG Bersertifikat SLSH Hanya 5 Persen se-Indonesia, BGN Targetkan Tahun 2026 Tuntas, Pikiran Rakyat, 17 Desember 2025



KAMPUS MENGAJAR SEBAGAI MOTOR PENGGERAK LITERASI NUMERASI DI SEKOLAH

Isna Nurul Inayati, M.Pd.I.²³

Universitas Islam Raden Rahmat

“Kampus Mengajar menyadarkan bahwa peningkatan budaya literasi dan numerasi di sekolah merupakan tanggung jawab bersama”

Program Kampus Mengajar merupakan salah satu skema program yang ditawarkan kemendikbud untuk mengatasi kondisi *learning loss* yang terjadi akibat pandemi covid-19 yang terjadi beberapa tahun silam. Kondisi siswa hampir di seluruh Indonesia paska pandemi mengalami penurunan semangat belajar dan penurunan kompetensi dalam literasi dan numerasi yang notabene merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa dalam pengembangan keilmuannya. Untuk itu peningkatan budaya literasi dan numerasi di sekolah

²³ Penulis lahir di Blitar, 13 April 1989, merupakan Dosen di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang, menyelesaikan studi S1 di Jurusan PAI UIN Maliki Malang tahun 2011, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi PGMI UIN Maliki Malang tahun 2013, dan saat ini sedang proses menyelesaikan S3 Prodi PAI di UNISMA Malang

merupakan PR bersama seluruh pemangku kebijakan untuk turut serta dalam pemulihan pembelajaran paska terjadinya pandemi tersebut.

Program kampus mengajar yang dilaksanakan kemdikbud sendiri telah sampai pada angkatan ke-7 pada Februari 2024, hal ini berarti bahwa pada saat itu program ini telah berjalan kurang lebih 3,5 tahun. Kerjasama seluruh pemangku kebijakan dalam kurun waktu tersebut secara kontinyu terus dilaksanakan guna terciptanya pendidikan yang lebih berkualitas. Dalam pelaksanaan program kampus mengajar sendiri kemdikbud mengajak seluruh elemen untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program tersebut. Pelibatan mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), guru dan seluruh pemangku kepentingan dilaksanakan demi suksesnya program kampus mengajar ini. Proses seleksi dilakukan untuk menentukan Mahasiswa dan Dosen yang dirasa layak dijadikan patner dalam rangka peningkatan budaya literasi dan numerasi di sekolah.

Setelah dinyatakan lolos seleksi maka baik DPL maupun mahasiswa akan diberikan pembekalan secara daring selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu baru dilakukan pelepasan dan penugasan. Selama menjalan tugas, kewajiban DPL sendiri salah satunya adalah membimbing dan mendampingi mahasiswa untuk melakukan koordinasi/komunikasi awal dengan dinas pendidikan. Karena kebetulan penulis ditempatkan di Kabupaten Blitar dengan sekolah dampingan SDN Kalimanis 01 dan SMPI Hasanuddin Kesamben maka dinas terkait yang pertama harus diajak koordinasi adalah dinas pendidikan kabupaten Blitar. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam rangka Penyerahan Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 7, dilaksanakan secara luring pada Hari Senin, 12 Februari 2024. Acara dihadiri oleh Kepala Dinas Kabupaten Blitar, DPL KM 7 Kabupaten Blitar, Kepala sekolah yang ditempati KM7, dan mahasiswa KM7.



Gambar 1. *Pelepasan Mahasiswa KM7*

Selanjutnya tugas DPL adalah melakukan koordinasi/komunikasi awal dengan sekolah bersama dengan mahasiswa. Penerjunan mahasiswa di SMP Hasanudiin Kesamben dilaksanakan Sabtu, 17 Februari 2024, dihadiri oleh semua mahasiswa. Tim diterima oleh Kepala Sekolah Bapak Drs. Farid, S.Pd. Penerjunan mahasiswa SDN Kalimanis 01 Doko dilaksanakan Senin, 19 Februari 2024, dihadiri oleh semua mahasiswa. Tim diterima oleh Kepala Sekolah Ibu Ajeng S,Pd dan perwakilan guru yang kemudian menjadi guru pamong. Mahasiswa KM7 diterima dengan baik oleh masing-masing sekolah penugasan.



Gambar 2. *Penyerahan Mahasiswa ke Sekolah Penugasan*

Langkah selanjutnya setelah DPL melakukan koordinasi/komunikasi awal dengan sekolah, maka DPL wajib membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam melakukan observasi awal penugasan; Koordinasi pertama dengan mahasiswa dilakukan setelah diterbitkan surat pemberitahuan daftar peserta Kampus Mengajar Angkatan 7 oleh Kemdikbudristek, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 dibuat grup WhatsApp untuk mempermudah koordinasi. Koordinasi dilanjutkan secara daring melalui *zoom meeting* setelah diterbitkan surat tugas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Februari 2024. Setelah penjuruan ke sekolah, satu minggu pertama mahasiswa melakukan observasi dan melaporkan hasil observasi kepada DPL pada akhir minggu pertama yaitu tanggal 25 Februari 2024. Hasil yang dilaporkan antara lain meliputi aspek KBM, administrasi sekolah dan guru, dan adaptasi teknologi. Mahasiswa juga melaporkan keadaan lingkungan sekolah meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, UKS, gudang, perpustakaan, kantin, mushola dan ruang kelas.

Hasil observasi awal ini yang selanjutnya ditindak lanjuti dalam penyusunan Rencana Aksi Kolaborasi (RAK) yang disusun mahasiswa bersama dengan DPL dan pihak sekolah. Dalam penyusunan RAK, DPL berkewajiban untuk membimbing dan mendampingi implementasi Rencana Aksi Kolaborasi (RAK) mahasiswa bersama sekolah selama penugasan. Mahasiswa menyusun RAK yang akan dilaksanakan selama 16 minggu. Beberapa program ditujukan untuk mendampingi sekolah dengan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, membantu guru, siswa serta orang tua dalam adaptasi teknologi dan membantu guru dalam hal administrasi sekolah maupun hal lainnya. Beberapa program yang dirancang meliputi menghidupkan mading sekolah, menata dan menghias perpustakaan, calistung, membuat pojok baca, AKM kelas, menghidupkan kembali senam sekolah, Gerakan Literasi Sekolah, Asistensi

Mengajar, Administrasi sekolah. RAK terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DPL sebelum dipresentasikan ke sekolah.

Hasil penyusunan RAK ini nantinya dikomunikasikan dalam FKKS (forum komunikasi dan koordinasi sekolah) yang dihadiri kepala sekolah, guru pamong, DPL serta mahasiswa tentunya. Program-program yang ditawarkan kemudian dipersentasikan dan diberikan masukan dari berbagai pihak, terutama pihak sekolah agar nantinya program tersebut dapat dijalankan secara maksimal.



Gambar 3. FKKS 1 di Sekolah Penugasan

Untuk memastikan keterlaksanaan program maka DPL selalu mengagendakan *sharing session* dengan mahasiswa dampingan secara berkala. *Sharing session* ini dilakukan secara rutin dengan mahasiswa minimal dua minggu sekali, melalui daring maupun tatap muka. Konsultasi juga dapat dilaksanakan kapan saja melalui grup *whatsapp*. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan program yang telah disusun. Masukan-masukan dari DPL tentunya sangat dibutuhkan dalam hal ini agar program terlaksana dan kendala yang ada dapat ditemukan solusinya.

Beberapa kendala yang dialami mahasiswa selama pelaksanaan program antara lain terkait banyaknya hari libur pada semester genap ini, mulai dari libur awal puasa, libur hari raya, libur hari besar nasional dan agenda sekolah yang sedang mempersiapkan ujian serta kelulusan siswa. Sehingga program tidak dapat terlaksana secara maksimal. Belum lagi animo siswa terkait program peningkatan literasi dan numerasi ini cenderung vareatif, sehingga berdampak pada minat mereka dalam berpartisipasi dalam program-program yang dilaksanakan. Namun program adaptasi teknologi dalam pembelajaran, asistensi mengajar dan pembuatan game literasi numerasi cukup mendapat sambutan baik dari siswa. Mereka antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang paling penting AKM siswa pasca kegiatan dapat disimpulkan meningkat.

Segala proses pelaksanaan RAK yang dipaparkan di atas dituliskan mahasiswa dalam laporan bulanan yang kemudian diberikan review, umpan balik, dan persetujuan laporan bulanan mahasiswa oleh DPL melalui platform Merdeka Belajar. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dan tepat waktu. Hasil dari *sharing session* dan riview laporan mahasiswa dituliskan DPL dalam laporan bulanan DPL serta disampaikan sebagai bahan diskusi bersama saat dilangsungkannya Forum Komunikasi dan Koordinasi DPL (FKKD) bersama Tim Program Kampus Mengajar.



Gambar 4. Forum Komunikasi dan Koordinasi DPL (FKKD)

Dari seluruh rangkaian program yang penulis sampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa program dapat berjalan dengan baik. Namun memang perlu ditindaklanjuti dalam program sejenis paska KM7 ini selesai. Dukungan dari seluruh pihak juga diharapkan karena meningkatkan budaya literasi dan numerasi bukanlah hal yang mudah, dan tentunya tidak dapat dilaksanakan secara instan. Dan terakhir penulis sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program dalam KM7 7 ini mulai dari Tim Kampus Mengajar 7, BPPMP Jawa Timur, Dinas pendidikan Kabupaten Blitar, SMP Islam Hasanuddin, dan SDN 01 Kalimanis. Dan terakhir penulis berharap semoga program yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat bagi lembaga dan dapat menumbuhkan semangat-semangat baru untuk mengembangkan budaya literasi dan numerasi di sekolah.



REDEFINISI MASKULINITAS DAN FEMINITAS DALAM OLAHRAGA DI SEKOLAH: STUDI KASUS PERSEPSI SISWA TERHADAP CABANG OLAHRAGA NON-TRADISIONAL

Prof. Dr. Nurkadri, S.Pd., M.Pd.²⁴

Universitas Negeri Medan

*"Redefinisi maskulinitas, feminitas, olahraga non-tradisional,
persepsi siswa, pendidikan jasmani, konstruksi gender,
sosiologi olahraga sekolah"*

²⁴ Penulis lahir di Air Batu, 16 September 1975, penulis merupakan Dosen FIK Universitas Negeri Medan Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, penulis menyelesaikan gelar Sarjana Pendidikan Kepelatihan di IKIP Negeri Medan (1999), gelar Magister Pendidikan Olahraga diselesaikan di Universitas Negeri Jakarta (2012), dan gelar Doktor Pendidikan diselesaikan di Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Olahraga (2017). Menjadi Petugas Jaga Malam di Bank BNI dari tahun 2003-2009, dan diangkat menjadi ASN dengan TMT 01 Januari 2007.

Pendahuluan: Lapangan sebagai Arena Kontestasi Identitas

Selama berdekade-dekade, institusi pendidikan jasmani di sekolah tidak sekadar menjadi ruang untuk mengolah fisik, melainkan juga 'pabrik' yang memproduksi norma gender secara masif. Di lapangan sekolah, tubuh siswa tidak hanya dilatih untuk berlari atau melompat, tetapi juga didisiplinkan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosiokultural tentang apa artinya menjadi 'laki-laki' dan 'perempuan'. Pandangan tradisional menempatkan olahraga sebagai domain maskulin yang menekankan agresi, kekuatan, dan kompetisi, sementara perempuan sering kali diposisikan dalam cabang olahraga yang lebih menekankan estetika, kelenturan, dan minim kontak fisik. Dikotomi ini menciptakan garis demarkasi yang tegas, di mana pelanggaran terhadap batas tersebut sering kali berujung pada marginalisasi sosial atau pelabelan identitas yang tidak diinginkan.

Namun, di era kontemporer ini, batas-batas biner tersebut mulai retak. Munculnya cabang olahraga non-tradisional di lingkungan sekolah—seperti *cheerleading* bagi laki-laki, *mixed martial arts* (MMA) bagi siswi, hingga inklusi *e-sports* yang melampaui hambatan biologis—telah memicu redefinisi identitas yang fundamental. Fenomena ini bukan sekadar tren hobi atau peralihan minat sesaat, melainkan sebuah pernyataan sosiologis mendalam tentang bagaimana generasi muda hari ini memandang tubuh, agensi, dan eksistensi mereka di tengah arus globalisasi. Mereka mulai menantang narasi bahwa performa fisik harus selalu selaras dengan jenis kelamin biologis.

Lebih jauh, pergeseran ini mencerminkan dinamika kekuasaan yang sedang berubah di ruang kelas dan gelanggang olahraga. Ketika siswa memilih cabang olahraga yang dianggap 'anomali' oleh norma konservatif, mereka sesungguhnya sedang melakukan negosiasi terhadap identitas diri di hadapan

teman sebaya dan otoritas sekolah. Artikel ini bertujuan untuk membedah bagaimana persepsi siswa terhadap olahraga non-tradisional mampu mengguncang struktur maskulinitas hegemonik dan feminitas konvensional, serta mengeksplorasi implikasi sosiologisnya terhadap inklusivitas di ruang lingkup sekolah masa kini.

Hegemoni dan Performa: Kerangka Sosiologis Gender

Memahami dinamika gender dalam olahraga memerlukan pembedahan terhadap teori Maskulinitas Hegemonik dari Raewyn Connell. Dalam konteks sekolah, maskulinitas hegemonik sering kali termanifestasi melalui dominasi laki-laki dalam cabang olahraga "keras" seperti sepak bola atau basket. Siswa yang tidak terlibat atau tidak kompeten dalam olahraga ini sering kali dianggap "kurang laki-laki" atau terpinggirkan secara sosial. Di sisi lain, perempuan yang terjun ke olahraga serupa sering kali terjebak dalam dilema *female apologetic*—sebuah kondisi di mana mereka merasa harus menunjukkan sisi feminin yang berlebihan di luar lapangan untuk "menebus" ketangguhan mereka di dalam lapangan.

Namun, jika kita meminjam perspektif Judith Butler mengenai *gender performativity*, gender bukanlah identitas yang tetap sejak lahir, melainkan "pertunjukan" yang dilakukan berulang kali. Ketika seorang siswa laki-laki dengan bangga melakukan koreografi senam irama, atau seorang siswi melakukan *takedown* dalam latihan gulat, mereka sedang melakukan dekonstruksi terhadap narasi gender yang kaku. Olahraga non-tradisional menjadi celah bagi siswa untuk menegosiasikan identitas mereka tanpa harus sepenuhnya tunduk pada dikotomi kuno.

Menembus Barikade: Studi Kasus dan Persepsi Siswa

1. Narasi Perlawanan: Siswa Laki-Laki di Olahraga Estetik

Dalam banyak wawancara kualitatif, siswa laki-laki yang memilih cabang olahraga seperti tari modern atau *cheerleading* sering kali menghadapi resistensi awal berupa stigmatisasi tajam dari lingkungan sebaya. Labelisasi 'feminin' kerap menjadi penghalang utama yang mengancam kredibilitas maskulinitas mereka di mata publik sekolah. Namun, seiring berjalannya waktu, persepsi ini mulai bergeser secara signifikan. Para siswa ini kini mampu membuktikan bahwa disiplin fisik, kekuatan inti (*core strength*), dan keberanian performatif yang dibutuhkan dalam olahraga estetik sering kali jauh melampaui tuntutan fisik olahraga tradisional yang berbasis kekuatan kasar.

Di titik inilah, definisi maskulinitas mengalami dekonstruksi; ia tidak lagi diukur oleh 'seberapa keras Anda memukul bola' atau dominasi fisik dalam kontak langsung, melainkan oleh 'seberapa disiplin Anda menguasai tubuh' serta estetika gerak yang presisi. Ini adalah manifestasi dari bentuk maskulinitas inklusif yang mulai tumbuh subur di sekolah-sekolah urban. Siswa laki-laki mulai memandang bahwa fleksibilitas dan keanggunan bukanlah antitesis dari kejantanan, melainkan komponen pelengkap dari atletisitas modern yang lebih kompleks. Fenomena ini menunjukkan bahwa lapangan olahraga kini menjadi ruang negosiasi di mana siswa laki-laki berani melampaui ekspektasi patriarkal demi mencapai keunggulan fisik yang lebih autentik dan beragam.

2. Kekuatan dan Otoritas: Siswi dalam Olahraga Kontak Fisik

Sebaliknya, siswi yang terlibat dalam olahraga non-tradisional seperti *Rugby* atau bela diri campuran menunjukkan pergeseran radikal terhadap persepsi tubuh perempuan. Tubuh mereka tidak lagi dipandang sebagai "objek estetis" yang rapuh atau hiasan ruang publik, melainkan bertransformasi menjadi instrumen kekuatan yang tangguh. Siswi-siswi ini melaporkan adanya peningkatan *self-efficacy* dan otoritas diri yang berdampak positif pada kehidupan akademik dan relasi sosial mereka. Mereka kini merasa memiliki kontrol penuh atas ruang personal dan performa fisiknya. Secara sosiologis, keterlibatan mereka merupakan bentuk perlawanan nyata terhadap struktur patriarki yang selama ini membatasi ruang gerak serta memposisikan perempuan sebagai subjek sekunder. Kini, lapangan olahraga menjadi arena emansipasi bagi siswi untuk mendekonstruksi narasi kerentanan dan menegaskan agensi mereka sebagai individu yang berdaya.

Analisis Sosiologis: Sekolah sebagai Agen Perubahan atau Penguat Stereotip?

Penting untuk menyoroti peran strategis guru Pendidikan Jasmani (Penjas) sebagai pemegang otoritas pedagogis di lapangan. Sering kali, kurikulum yang diterapkan masih terjebak dalam sikap *gender-blind* atau bahkan secara tidak sadar memperkuat stereotip melalui pemisahan aktivitas yang kaku. Namun, ketika sekolah mulai berani memfasilitasi cabang olahraga non-tradisional, institusi tersebut sesungguhnya sedang membuka ruang dialog sosiologis yang sangat krusial bagi perkembangan karakter siswa.

Tentu saja, redefinisi ini tidak terjadi di ruang hampa tanpa konflik. Gesekan sosial, ejekan di ruang ganti, hingga skeptisisme orang tua masih menjadi bagian dari realitas pahit yang harus dihadapi para siswa progresif. Namun, justru di dalam ketegangan inilah proses belajar sosiologis yang paling autentik terjadi. Siswa dipaksa keluar dari zona nyaman untuk mempertanyakan kembali dogma yang selama ini mereka telan mentah-mentah: "Mengapa saya menganggap laki-laki yang menari itu aneh?" atau "Mengapa saya terkejut melihat perempuan yang begitu kuat?"

Pertanyaan-pertanyaan reflektif inilah yang menjadi katalisator perubahan. Ketika norma yang dianggap alami mulai dipertanyakan, tembok-tembok gender yang selama ini mengekang potensi individu perlahan-lahan runtuh. Sekolah bukan lagi sekadar tempat melatih otot, melainkan laboratorium sosial di mana kesadaran baru tentang kesetaraan dan inklusivitas ditempa, memungkinkan siswa untuk tumbuh menjadi individu yang menghargai keberagaman identitas tanpa lagi dibatasi oleh sekat-sekat biner masa lalu.

Daftar Pustaka

- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (2nd ed.). Berkeley, CA: University of California Press.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York, NY: Routledge.
- Anderson, E. (2009). *Inclusive Masculinity: The Changing Nature of Masculinities*. London: Routledge.
- Shilling, C. (2012). *The Body and Social Theory* (3rd ed.). London: SAGE Publications

BAB IV

PERSPEKTIF MULTIDISIPLINER DAN DEDIKASI UNTUK MASYARAKAT



PENGAWASAN PEMBANGUNAN MENARA DAN RENOVASI GEREJA ST. MARTINUS BOLA

Dr. Ir. Firnimus Konstantinus Bhara, ST., MT.²⁵

Universitas Nusa Nipa

“Tingkat kinerja tim dalam pengawasan dan pengendalian mutu sangat baik khususnya dari segi pengawasan dan pengendalian material dan metode kerja”

Keadaan fisik gedung gereja juga sangat memprihatinkan. Ada beberapa bagian tembok yang keropos dimakan usia, bagian atap yang bocor pada saat hujan. Hal ini dapat dipahami karena Gereja St. Martinus Bola merupakan salah satu gereja tertua di Kabupaten Sikka, NTT yang menyongsong usia 1 (satu) abad pada tahun 2027. Bila keadaan ini tidak segera

²⁵ Penulis lahir di Ende-Nusa Tenggara Timur, 27 Maret 1976, merupakan Dosen di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik (FT) Universitas Nusa Nipa, menyelesaikan studi S1 di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Warmadewa-Denpasar tahun 2004, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Magister Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014, menyelesaikan S3 pada Program Studi Doktor Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada tahun 2023, memperoleh gelar insinyur pada Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta tahun 2024.

ditangani dapat membahayakan umat, oleh karenanya umat Katolik Paroki Bola menginginkan agar memiliki gereja yang lebih tertata dan kokoh, sehingga dapat mendukung proses bersama dalam pengembangan rohani. Dengan demikian perencanaan dan perancangan bangunan Gereja Santo Martinus Bola sangat diperlukan. Berdasarkan keadaan tersebut, Dewan Paroki memutuskan membentuk panitia pembangunan gedung Gereja St. Martinus.

Keterlibatan pengawas sangat penting dalam suatu pelaksanaan pembangunan proyek gedung. Hal tersebut bertujuan agar dapat mengontrol, pelaksanaan pekerjaan, dapat menjalin hubungan komunikasi antara tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah, sehingga setiap pelaksanaan pekerjaan dapat menghasilkan produktifitas yang baik dan bermutu. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kinerja konsultan pengawas yang mampu menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan pekerjaan.

Pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek (owner) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Pengawas dapat berupa badan usaha atau perorangan. Perlu sumber daya manusia yang ahli dibidangnya masing-masing seperti teknik sipil, arsitektur, mekanikal elektrikal, listrik dan lain-lain sehingga sebuah bangunan dapat dibangun dengan baik dalam waktu cepat dan efisien.

Faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur kinerja pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Menara dan Renovasi Gereja St. Martinus Bola Adalah sebagai berikut:

Faktor Sumber Daya Manusia:

Setiap individu yang terlibat sebagai tim pengawas adalah ahli pada bidangnya, memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan, mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi, melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung terbangun sesuai dengan IMB, kooperatif dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, membantu meningkatkan kinerja manajemen anggota tim.

Faktor Peralatan:

Menyediakan fasilitas perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran pembuatan administrasi, mengawasi pemakaian peralatan dan metode pelaksanaan, peralatan yang diperlukan tidak sesuai kebutuhan di lapangan, peralatan di lapangan tidak sesuai jumlah yang diperlukan.

Faktor Materi/Bahan:

Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang diusulkan oleh pelaksana agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya, mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik, mengawasi pemakaian bahan pada pekerjaan konstruksi, mengawasi material yang diperlukan tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan proyek, mengawasi material supaya tidak mengalami keterlambatan.

Faktor Biaya:

Mengendalikan proyek tepat biaya sesuai dengan rencana, menyusun laporan dan berita acara dalam kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pada pelaksanaan proyek, melakukan pengawasan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana.

Faktor Waktu:

Mengendalikan dan memastikan proyek tepat waktu sesuai dengan rencana, menyusun target progress kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran pekerjaan, menerangkan batasan kerja, ruang lingkup pekerjaan & spesifikasi dengan baik pada semua personil proyek, membantu meminimalkan waktu yang diperlukan untuk merespon kebutuhan pembangunan.

Faktor Mutu:

Melakukan pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan agar mutu sesuai dengan spesifikasi, melakukan pemeriksaan terhadap kualitas hasil pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi, mendeteksi dan memberikan koreksi terhadap cacat pada hasil pekerjaan.

Faktor keselamatan dan Kesehatan Kerja

Membuat peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bersifat formal atau informal, memberikan teguran terhadap pelaksana supaya tenaga kerja selalu melengkapi (K3) pada saat bekerja di lapangan, melakukan pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pekerja, mengawasi kesehatan tenaga kerja supaya tidak mempekerjakan tenaga kerja yang kurang sehat.

Dari tujuh faktor diatas, faktor mutu menjadi salah satu kriteria kinerja pengawasan dan pengendalian proyek yang sangat baik dilakukan tim pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai Tim Pengawas memiliki kinerja yang sangat baik terhadap pengawasan dan pengendalian mutu material dan metode pelaksana pada kegiatan Pembangunan dan Renovasi gereja St. Martinus Bola. Tingkat kinerja tim pengawas dalam pengawasan dan pengendalian mutu sangat baik khususnya dari segi pengawasan dan pengendalian material dan metode kerja. Dari segi pengawasan dan pengendalian material, tim pengawas melakukan pengecekan mutu material sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, dan dari segi metode pelaksanaan pekerjaan tim pengawas melakukan pemeriksaan terhadap *shop drawing*/gambar kerja serta pelaksanaan di lapangan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis yang diterapkan.

Daftar Pustaka

- Astawa Diputra I Gede, 2009. Sistem Penilaian Kinerja Konsultan Perencana Dalam Menangani Proyek Perencanaan Bangunan Gedung. Jurnal ilmiah Teknik Sipil Vol. 13, No. 2, Juli 2009.
- Femmy K. Paerah, M. Yusuf Tuloli, 2016. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Mutu Proyek Konstruksi di Kota Gorontalo. Jurnal Teknik Volume 14, Nomer 1, Juni 2016 Hal. 77
- Isato, 2015. Time Schedule, (<https://id.scribd.com/user/332364937/Isato>, diakses 05/01/2026 jam 13:49).
- Kamaludin Syarifudin, T A M. Tilaar, Fahira F, 2017. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengawas Lapangan Pada Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan di Kabupaten Morowali Utara.

- Manlian Ronald. A. Simanjuntak, Andreas. K. Djukardi, Leonard, 2013. Peran Sistem Pengawasan Kinerja Konstruksi Pada Proyek Apartemen di Jakarta Selatan (Studi kasus pada Proyek Apartemen The Kencana). Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7) Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013 Mudjisantosa, 2018.
- Mycele Wala, 2013. Penilaian Kinerja Konsultan Perencana Bangunan Dengan Metode Analytic Hierarchy Process (Studi pada Perencanaan Bangunan di Manado).
- Peter F. Kaming, Andrio G. Riano, 2013. Faktor Penentu Kinerja Efektif Bagi Konsultan Manajemen Proyek. Jurnal Teknik Staf Edukasi. Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sediyanto, Aris Hidayat, 2017. Analisis Kinerja Biaya dan Waktu Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi Dengan Metode Earned Value (Studi Kasus Proyek Konstruksi Mall dan Hotel X di Pekanbaru).
- Soeharto, Imam. 1997. Manajemen Proyek (Dari Konseptual sampai Operasional). Jakarta. Erlangga.
- Syihabul Umam Muhammad, Dhani Syafitri, Arif Hidayat, Frida Kistiani, 2017. Pengukuran Kinerja Konsultan Manajemen Konstruksi Pada Tahapan Implementasi Proyek Konstruksi.
- Tomigolung Fergita, 2013. Analisis Kinerja Konsultan Pengawas Pada Proyek Jalan dan Jembatan di Sulawesi Utara. Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol. 3, No. 2, Juli 2013 ISSN 2087-9334 (-83)
- Wulfram Ervianto, 2005. Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta: Andi Offset.



DINAMIKA PELATIHAN KULINER KREATIF DALAM PERSPEKTIF WISATA KULINER DAN GASTRONOMI ANAK USIA DINI

Aneke Rahmawati, S.Pd., M.Sc.²⁶

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

“Menghias donat adalah media belajar menyenangkan yang melatih aspek kognitif, motorik, dan kreativitas anak usia dini”

Dalam kajian pariwisata, wisata kuliner dan gastronomi tidak semata dipahami sebagai aktivitas berkunjung dan konsumsi, tetapi sebagai pengalaman budaya yang dibentuk melalui interaksi, proses, dan keterlibatan inderawi. Pengalaman terhadap makanan dapat diperkenalkan sejak usia dini melalui aktivitas kuliner kreatif yang bersifat edukatif dan partisipatif. Dalam konteks ini, pelatihan kuliner pada anak usia dini menjadi ruang awal untuk mengenalkan makna makanan sebagai pengalaman, bukan sekadar produk jadi. Dinamika yang muncul selama proses pelatihan—mulai dari

²⁶ Penulis lahir di Sragen, 3 Juni 1992, merupakan Dosen di Program Studi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (Stipram), menyelesaikan studi S1 di Pendidikan Teknik Boga UNY tahun 2013, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Magister Kajian Pariwisata tahun 2022.

interaksi anak dengan bahan, alat, pendamping, hingga teman sebaya—menjadi bagian penting dari pembelajaran yang relevan dengan pengembangan literasi gastronomi dan pemahaman awal tentang wisata kuliner.

Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam perkembangan individu, baik secara kognitif, motorik, sosial, maupun emosional. Pada masa emas pertumbuhan ini, anak-anak belajar secara optimal melalui pengalaman langsung, permainan, dan kegiatan yang menyenangkan. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang interaktif dan berbasis praktik menjadi sangat relevan untuk diterapkan di lingkungan PAUD. Salah satu strategi yang potensial adalah melalui pelatihan kuliner kreatif. Tidak sekadar mengenalkan makanan, kegiatan kuliner dapat menjadi media pembelajaran lintas bidang yang menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak. Kegiatan menghias donat, misalnya, tidak hanya menarik dan menyenangkan, tetapi juga memfasilitasi pengembangan keterampilan motorik halus, pemahaman warna dan bentuk, serta meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri anak.

Tulisan ini membahas dinamika dan keunggulan pelatihan kuliner kreatif berdasarkan pengalaman pengabdian masyarakat di TK Bakti Islam Sukoharjo melalui kegiatan *Pesta Donat Warna-Warni*, serta memperkuatnya dengan refleksi dan kutipan dari pengalaman serupa lainnya.

Pelatihan Pesta Donat: Dinamika dan Respons Anak

Kegiatan *Pesta Donat Warna-Warni* dilaksanakan di TK Bakti Islam Sukoharjo pada 3 Juni 2025. Anak-anak diperkenalkan dengan berbagai jenis bahan menghias donat, seperti glasir warna-warni dan topping meses atau sprinkle. Setelah demonstrasi singkat oleh narasumber, siswa diberi kesempatan untuk menghias donat mereka sendiri, dengan

pendampingan dari guru dan fasilitator. Dinamika kegiatan berlangsung sangat hidup. Anak-anak menunjukkan antusiasme tinggi. Suasana menjadi riuh namun penuh semangat ketika mereka mulai mengekspresikan ide dan kreativitas pada permukaan donat masing-masing. Perbedaan karakter dan kemampuan juga terlihat: ada yang cepat dan percaya diri, ada pula yang ragu dan memerlukan arahan. Namun seluruh siswa berhasil menyelesaikan tugasnya, menunjukkan rasa bangga terhadap hasil karya sendiri.

Aktivitas ini secara nyata mengasah motorik halus, koordinasi tangan-mata, dan kemampuan fokus pada tugas. Anak-anak juga belajar berbagi, bekerja sama, dan mengenal warna serta bentuk secara aplikatif—semua terjadi dalam suasana yang menyenangkan dan tidak menekan.

Keunggulan Pembelajaran Kuliner Kreatif

Pelatihan kuliner kreatif memiliki beberapa keunggulan utama dalam konteks pendidikan anak usia dini:

1. Stimulasi Motorik Halus

Aktivitas seperti menyendok topping, memegang donat, dan mengatur posisi dekorasi menstimulasi koordinasi tangan dan jari secara alami. Keterampilan ini penting sebagai prasyarat untuk kegiatan menulis dan menggambar (Hapidah, 2024).

2. Penguatan Kognitif Sederhana

Dengan mengamati bentuk, mengenali warna, serta memilih bahan dan urutan kerja, anak secara tidak langsung melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Hal ini sejalan dengan prinsip *experiential learning*, di mana anak belajar paling efektif melalui praktik langsung (Budiarti, 2021).

3. Perkembangan Sosial-Emosional

Anak-anak diajak untuk bekerja sama, menunggu giliran, dan saling menghargai hasil karya teman. Proses ini memperkuat empati dan kontrol diri. Menurut Amaros & Rohita (2018), kegiatan *fun cooking* secara signifikan mendorong keterampilan sosial-emosional anak.

4. Kreativitas dan Imajinasi

Diberikan kebebasan berkreasi, anak menunjukkan berbagai kombinasi warna dan gaya hiasan yang unik. Mereka merasa memiliki kendali atas karya mereka dan belajar menghargai hasil eksplorasi diri. Ini sejalan dengan temuan Octaviani & Alimudin (2023) bahwa *cooking class* meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas.

Pengalaman Serupa dan Pembelajaran Berbasis Praktik

Dalam tulisan saya sebelumnya berjudul *Ekspedisi Seru ke Dunia Hewan* (Rahmawati, 2025), saya mengangkat pentingnya kunjungan edukatif ke lokasi seperti Cepogo Cheese-Park sebagai media pembelajaran langsung. Anak-anak tidak hanya belajar tentang hewan dan peternakan, tetapi juga mengalami interaksi nyata dengan lingkungan sekitar. Begitu pula dalam kegiatan *Mengenalkan Wisata Alam Sejak Dini* di Panorama Boyolali (Rahmawati, 2025), terbukti bahwa keterlibatan aktif anak dalam kegiatan berbasis praktik mampu memperkuat pemahaman dan ketertarikan mereka terhadap materi pembelajaran. Pelatihan menghias donat mengusung semangat yang sama: anak belajar melalui pengalaman. Mereka tidak hanya “mendengar” atau “melihat” konsep, tetapi mengalami langsung proses menciptakan, menghias, dan menikmati hasil karyanya. Di sinilah keunggulan pendekatan kuliner kreatif sebagai bentuk *experiential learning* yang membumi dan menyenangkan.

Jika dilihat dari sudut pandang pariwisata, pelatihan kuliner kreatif pada anak usia dini mencerminkan dinamika awal bagaimana pengalaman terhadap makanan dibentuk. Anak-anak tidak hanya berinteraksi dengan bahan makanan, tetapi juga dengan proses, aturan, dan nilai yang menyertainya. Pengalaman ini sejalan dengan prinsip wisata kuliner dan gastronomi yang menekankan keterlibatan aktif, pengalaman inderawi, serta makna sosial dan budaya makanan. Dengan demikian, aktivitas kuliner kreatif di lingkungan PAUD dapat dipahami sebagai bentuk pengenalan awal terhadap pengalaman gastronomi dalam konteks edukatif.

Penutup

Pelatihan kuliner kreatif menunjukkan dinamika pembelajaran yang kaya dan multidimensional bagi anak usia dini. Melalui aktivitas yang melibatkan pengalaman langsung, anak tidak hanya mengembangkan kemampuan motorik, kognitif, dan sosial-emosional, tetapi juga membangun hubungan awal dengan makanan sebagai bagian dari pengalaman sehari-hari yang bermakna. Dalam perspektif pariwisata, dinamika tersebut relevan dengan konsep wisata kuliner dan gastronomi yang menempatkan makanan sebagai medium pengalaman, interaksi, dan pemaknaan budaya. Oleh karena itu, pelatihan kuliner kreatif di lingkungan PAUD tidak hanya bernilai pedagogis, tetapi juga memiliki relevansi konseptual dalam memperkenalkan pengalaman gastronomi secara dini melalui pendekatan edukatif dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- Amaros, Y., & Rohita, R. (2018). Peran Kegiatan Fun Cooking dalam Kemampuan Sosial-Emosional dan Bahasa Anak. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(4), 256–264.
- Budiarti, E. (2021). Fun Cooking to Increase Early Childhood Learning Motivation During Covid-19 Pandemic. *ICECE 2020, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 538, 10–13.
- Hapidah, S. (2024). Melatih Motorik Halus pada Anak Usia Dini melalui Kegiatan Cooking Class. *Sewagati: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 1–5.
- Octaviani, I., & Alimudin, A. (2023). Upaya Guru dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Cooking Class di PAUD Melati. *Journal of Early Childhood Studies*, 1(1), 1–8.
- Rahmawati, A. (2025). Ekspedisi seru ke dunia hewan: Meningkatkan pemahaman anak usia dini melalui kunjungan ke Cepogo Cheese-Park. *Jurnal Pitutur Abdi Masyarakat*, 2(1), 1–7.
- Rahmawati, A., & Sumbawati, S., (2025). Mengenalkan wisata alam sejak dini: Pengabdian di Panorama Boyolali bersama TK Bakti Islam Sukoharjo. *Jurnal Pamasa*.



PERKEMBANGAN TARI KREASI BARU DI INDONESIA TAHUN 1945-AN

Wisnu Dermawan, M.Sn.²⁷

Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta

*“Manusia dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman.
Begitupun dengan tari, tak layak mati hanya karena
dalil-dalil tari tradisi yang mengikat”*

Memahami perkembangan tari kreasi baru di Indonesia diperlukan penelusuran sejarah yang cukup panjang karena tidak muncul begitu saja. Lahirnya tari kreasi baru didorong oleh banyak faktor, salah satunya adalah dinamika politik. Di Indonesia, kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penting lahirnya karya tari baru atau sekarang dikenal dengan karya tari kreasi baru. Kusumastuti (2016) dalam disertasinya menjelaskan:

²⁷ Penulis lahir di Temanggung, 18 September 1996. Penulis merupakan Dosen di Program Studi Seni Tari Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Menyelesaikan studi S1 di Jurusan Seni Tari Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 2018, dan menyelesaikan S2 Program Studi Program Magister dengan minat studi Penciptaan Seni di Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 2022.

Dalam hal kebaruan para seniman tari Indonesia sudah termotivasi melakukan di era kebijakan kebudayaan Presiden Soekarno (1945-1966) yang menggariskan keindonesiaan berpedoman pada falsafah Pancasila. Ini juga berlaku pada kesenian. Bagi Soekarno, kekayaan seni pertunjukan tradisional dan daerah Indonesia harus dirawat, dibina selain juga dikembangkan sesuai dengan kepribadian Indonesia. Di era tersebut berbagai kegiatan kesenian diadakan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan persatuan...Soekarno juga mendorong terjadinya pembaharuan dalam karya tari menjadi lebih singkat, padat, dinamis, dan busana tarinya menjadi lebih cerah. Ini dimaksudkan agar karya tari yang dikirim keluar negeri sebagai diplomasi budaya ataupun yang dipertunjukkan di Istana Negara setiap perayaan 17 Agustus (juga dalam acara kenegaraan lainnya) bisa lebih menarik dan tidak membosankan dalam menampilkan keindonesiaan dengan kekayaan dan keberagaman keseniannya.

Di era presiden Soekarno, muncul beberapa karya tari kreasi baru yang menjadi gerbang pembuka lahirnya tari kreasi baru di Indonesia. Karya-karya tersebut menjadi barometer kualitas daya cipta seniman tari di Indonesia (Kusumastuti, 2016). Hadi (2023) dalam bukunya menjelaskan juga bahwa munculnya tari kreasi baru seiring dengan mulai populernya istilah koreografi di kalangan seniman tari di Indonesia dimulai sekitar tahun 1925-an.

Tari kreasi baru dapat didefinisikan sebagai bentuk tari baru yang berkembang melalui pengolahan kreatif terhadap gerak-gerak tari tradisi baik klasik maupun kerakyatan dengan menghadirkan unsur-unsur koreografi yang inovatif. Sejalan dengan definisi tari kreasi baru tersebut, Miroto (2022) dalam bukunya menjelaskan bahwa aktivitas mengubah dalam proses penciptaan karya tari, jika masih dekat dengan sumbernya merupakan materi gerak tari kreasi baru. Tari kreasi baru lahir bukan untuk merusak tatanan tari tradisi

yang sudah ada. Bahkan disadari atau tidak, tari kreasi baru menjadi perpanjangan tangan pelestarian tari tradisi baik klasik maupun kerakyatan. Tari tradisi tetap bertahan hingga kini karena pendukungnya masih merasakan manfaat dan menyukainya, dan meski terdapat perubahan, inovasi, ataupun reka cipta, namun pada intinya tetap berpegang pada pola-pola serta aturan-aturan tradisi (Kusumastuti, 2016). Kehadiran tari kreasi baru merepresentasikan upaya seniman dalam merespon perkembangan zaman tanpa melepaskan akar tradisi yang menjadi pijakannya.

Perkembangan tari kreasi baru di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran para seniman tari seperti I Nyoman Mario, I Nyoman Kaler, Bagong Kussudiarja, Wisnuwardhana, Guru Sauti, Raden Tjetje Somantri dll. I Nyoman Mario dan I Nyoman Kaler, secara berturut-turut pada tahun 1925 dan 1933 menciptakan tari kreasi baru berjudul tari Kebyar Duduk dan Panji Sumirang (Hadi, 2023). Bagong Kussudiardja bersama Kuswadi Kawindrasusanto pada tahun 1953 menciptakan tari Kuda-Kuda (Admadipurwa, 2007). Guru Sauti menciptakan tari Serampang Dua Belas pada tahun 1940-an (Gusmail, 2017). Raden Tjetje Somantri menciptakan tari Merak pada tahun 1955 (Kartiyani, 2018). Wisnuwardhana pada tahun 1956 menciptakan tari Pekan Olah Raga (Soedarsono, 1992). Karya-karya tari kreasi baru yang lahir dari tangan para seniman tersebut menjadi penanda penting dinamika seni tari di Indonesia khususnya tari kreasi baru.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tari kreasi baru di Indonesia lahir melalui proses historis yang panjang, dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan kebijakan kebudayaan negara, serta kreativitas para seniman tari dalam merespon perkembangan zaman. Tari kreasi baru tidak hadir sebagai bentuk pemutusan dari tradisi, melainkan sebagai wujud transformasi dan pengembangan nilai-nilai tradisi melalui pendekatan koreografis yang lebih kontekstual

dan inovatif. Kehadirannya menjadi bukti bahwa seni tari Indonesia memiliki daya lenting yang kuat, mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan identitas budaya yang menjadi landasan penciptaannya. Dengan demikian, tari kreasi baru tidak hanya memperkaya khazanah seni tari Indonesia, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesinambungan tradisi dengan zamannya.

Daftar Pustaka

- Admadipurwa, P. (2007). *Joget mBagong di sebalik tarian Bagong Kussudiardja*. Yogyakarta: Yayasan Bagong Kussudiardja.
- Gusmail, S. (2017). *Tari Serampang Dua Belas di Sumatera Utara kajian Estetika Melalui Pendekatan Multikulturalisme*. *Bercad*. 4 (1). 95-104.
- Hadi, Y. Sumandiyo. (2023). *Konsep-Konsep Garap Koreografi*. Yogyakarta: AKNSBYogyakarta Press.
- Kartiyani, M. (2018). *Studi Komparatif Pada Kostum Tari Merak Karya Raden Tjetje Somantri dan Karya Irawati Durban Ardjo Melalui Pendekatan Estetika*. *Artic*. 1 (2). 59-66.
- Kusumastuti, R. A. J. S. N. (2016). *Perkembangan Koreografi di Indonesia: Suatu Kajian Karya Tari Kontemporer di Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki 1968-1987*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miroto, M. (2022). *Dramaturgi Tari*. Yogyakarta: Badan Penerbitan ISI Yogyakarta.
- Soedarsono, (ed). 1992. *Pengantar Apresiasi Seni*. Jakarta: Balai Pustaka



ACCOUNTING FOR MANAGER

Daniel Manek S.Fil., SE., M.Si.²⁸

STIE Karya Ruteng

*"Strategi Adaptif Menavigasi Dinamika Keputusan Bisnis Global:
Mengoptimalkan Inovasi Teknologi, Keberlanjutan Lingkungan,
Ketangguhan Operasional demi Pertumbuhan Strategis"*

Memasuki tahun 2026, lanskap bisnis global mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Integrasi teknologi digital, pergeseran paradigma ekonomi hijau, dan dinamika pasar yang sangat fluktuatif menuntut para pemimpin organisasi untuk memiliki kompetensi di luar keahlian fungsional mereka. Salah satu kompetensi yang menjadi tulang punggung keberhasilan organisasi adalah literasi akuntansi bagi para manajer non-keuangan. Tantangan di tahun 2026 mencakup pengelolaan biaya operasional yang

²⁸ Daniel Manek, lahir di Ponu TTU - NTT, 10 September, 1978. Menyelesaikan S1 Filsafat pada STFK Ledalero (2004) dan Studi Teologi pada STFK Ledalero (2005-2007). Tahun 2008 hingga 2011 bekerja sebagai Kepala Sekolah SMPK St. Aloysius Lengko Ajang, Maggarai. Thn 2015, Daniel menyelesaikan S1 Akuntansi pada STIE YKPN Yogyakarta dan S2 Akuntansi juga pada STIE YKPN Yogyakarta (2017) juga Profesi Akuntansi pada STIE YKPN Yogyakarta (2018). Daniel pernah terlibat sebagai staf pengajar di Universitas Atmajaya Yogyakarta (2017-2018). Sejak 2018 hingga saat ini Daniel menjadi staf pengajar pada STIE.

dipengaruhi oleh inflasi digital serta tuntutan transparansi atas dampak lingkungan perusahaan. Padahal, setiap keputusan operasional yang mereka ambil memiliki dampak langsung terhadap arus kas dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan.

Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui pendekatan "Accounting for Manager", peserta akan diajak untuk memahami bahwa laporan keuangan adalah cermin dari efektivitas kepemimpinan mereka. Fokus utama dari program ini adalah membekali para manajer dengan kemampuan navigasi bisnis yang tangguh, di mana setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada analisis data keuangan yang akurat dan relevan dengan kondisi ekonomi tahun 2026.

Akuntansi manajerial merupakan bidang akuntansi yang secara khusus berfokus pada penyediaan informasi bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi. Hal ini ditegaskan dalam pendapat yang menyatakan bahwa akuntansi manajerial adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengumpulkan, menganalisis, menyiapkan, menafsirkan, dan mengomunikasikan informasi keuangan untuk membantu manajer mencapai tujuan organisasi (Garrison *et al.*, 2024:22). Di tahun 2026, proses ini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan terintegrasi dengan sistem kecerdasan buatan yang mampu memberikan analisis prediktif.

Tahun 2026 menuntut kecepatan dalam pengambilan keputusan. Penggunaan data akuntansi secara real-time menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. Para ahli menekankan bahwa integrasi antara manajemen strategis dan informasi keuangan merupakan kunci untuk memenangkan persaingan di era transformasi digital (Kaplan dan Norton, 2023:18). Manajer dituntut untuk mampu melakukan analisis biaya berbasis aktivitas (Activity-Based Costing) guna mengidentifikasi bagian mana dari operasional yang benar-

benar memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Selain itu, pertimbangan mengenai faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) kini telah terintegrasi ke dalam sistem pelaporan manajerial. Keputusan manajer di tahun 2026 harus mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan, karena investor dan konsumen saat ini lebih menghargai transparansi dalam aspek tersebut (IFRS Foundation, 2025:52).

Berdasarkan observasi pada beberapa organisasi mitra, ditemukan bahwa sebagian besar manajer tingkat menengah masih mengandalkan intuisi daripada data keuangan dalam mengambil keputusan harian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama: 1) Kurangnya Literasi Laporan Keuangan: Banyak manajer menganggap laporan keuangan adalah dokumen teknis yang hanya dipahami oleh akuntan, sehingga mereka sering mengabaikan informasi penting seperti rasio likuiditas dan margin kontribusi. 2) Silo Organisasi: Terjadi hambatan komunikasi antara departemen keuangan dan departemen operasional, yang mengakibatkan anggaran sering kali dianggap sebagai beban administratif alih-alih alat perencanaan. 3) Ketidaksiapan Menghadapi Tahun 2026: Belum adanya kerangka kerja yang jelas bagi para manajer untuk mengantisipasi perubahan struktur biaya akibat adopsi teknologi AI dan pajak karbon yang mulai diimplementasikan secara luas.

Permasalahan ini jika dibiarkan akan menyebabkan ketidakefisienan penggunaan modal dan penurunan daya saing perusahaan di pasar global yang makin ketat. Untuk mengatasi permasalahan di atas, program pengabdian ini menggunakan metode pelatihan dan pendampingan yang terstruktur selama enam bulan. Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Tahap Diagnosis dan Pre-Test Sebelum materi diberikan, dilakukan asesmen untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal para manajer mengenai akuntansi. Hal ini dilakukan melalui kuesioner dan wawancara mendalam mengenai cara mereka mengambil keputusan bisnis selama ini.
2. Workshop "The Language of Business" Pada tahap ini, manajer diberikan materi mengenai konsep dasar akuntansi yang relevan bagi mereka, seperti: Menganalisis Laporan Laba Rugi dari perspektif operasional, Memahami Neraca untuk mengevaluasi kesehatan aset Perusahaan, Manajemen Arus Kas (Cash Flow) sebagai urat nadi bisnis di tahun 2026.
3. Simulasi Kasus Keputusan Bisnis 2026 Peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan kasus nyata. Misalnya, kelompok diminta memutuskan apakah perusahaan harus berinvestasi pada mesin otomatis atau tetap menggunakan tenaga kerja manual dengan mempertimbangkan biaya jangka panjang, depresiasi, dan dampak sosialnya. Pengambilan keputusan harus didukung oleh perhitungan Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR) yang sederhana namun akurat (Horngren *et al.*, 2025:782).
4. Pendampingan Implementasi Tim pengabdian mendampingi manajer dalam menyusun anggaran departemen yang lebih realistis dan berbasis data untuk periode fiskal mendatang. Pendampingan ini memastikan bahwa teori yang dipelajari dapat diterapkan langsung pada pekerjaan mereka.

Salah satu alat paling ampuh bagi manajer di tahun 2026 adalah analisis CVP. Dengan memahami titik impas (break-even point), manajer dapat menentukan berapa banyak unit yang harus dijual atau berapa harga minimum yang harus ditetapkan untuk menutupi biaya operasional yang meningkat. Analisis ini sangat krusial ketika perusahaan menghadapi ketidakpastian permintaan pasar (Garrison et al., 2024:194).

Penganggaran Fleksibel (*Flexible Budgeting*), Di tahun 2026, penganggaran statis dianggap sudah usang. Manajer harus mampu menyusun anggaran fleksibel yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tingkat aktivitas bisnis. Hal ini memungkinkan manajer untuk memberikan evaluasi kinerja yang lebih adil bagi bawahannya, karena varians biaya dianalisis berdasarkan volume aktivitas yang sebenarnya terjadi. Pengukuran Kinerja di Era ESG Navigasi bisnis tidak lagi hanya tentang profit. Manajer harus mampu mengintegrasikan metrik keberlanjutan ke dalam laporan kinerja mereka. Di tahun 2026, keberhasilan seorang manajer diukur dari kemampuannya menghasilkan laba sekaligus menekan jejak karbon operasionalnya (IFRS Foundation, 2025:). Hal ini menuntut manajer untuk memahami "Green Accounting" sebagai bagian integral dari tanggung jawab manajerial mereka.

Evaluasi program dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, indikator keberhasilan jangka panjang adalah adanya perbaikan dalam akurasi anggaran departemen dan kecepatan pengambilan keputusan strategis di tingkat manajerial. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut melalui pembentukan komunitas praktisi akuntansi manajerial di internal perusahaan, di mana para manajer dapat saling berbagi pengalaman mengenai tantangan navigasi bisnis yang mereka hadapi. Program pengabdian "Accounting for Manager" merupakan langkah krusial untuk mempersiapkan pemimpin bisnis menghadapi tantangan tahun 2026. Dengan

menguasai kemampuan literasi keuangan, manajer tidak lagi hanya bertindak berdasarkan intuisi, melainkan berdasarkan fakta data yang kuat. Sinergi antara pemahaman akuntansi dan strategi bisnis akan menciptakan organisasi yang lebih tangguh, efisien, dan berkelanjutan di masa depan. Akuntansi bagi manajer adalah instrumen navigasi yang memastikan bahwa setiap langkah bisnis yang diambil menuju pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Daftar Pustaka

- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2024). *Managerial Accounting*. 18th Edition. New York: McGraw-Hill Education.
- IFRS Foundation. (2025). *Global Standards for Sustainability Reporting and Managerial Implications*. London: IFRS Press.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2023). *Strategic Management and Financial Integration in the Digital Age*. Boston: Harvard Business Review Press.
- World Economic Forum. (2025). *The Future of Jobs and Skills in Finance 2026*. Geneva: WEF Publishing



INOVASI TEKNOLOGI DAUR ULANG: PENDAMPINGAN BANK SAMPAH DENGAN ANALISIS MATEMATIKA UNTUK EFISIENSI DAN EKONOMI Sirkular

Agustina Purnami Setiawi, M.Pd.²⁹

Universitas Stella Maris Sumba

"Pendampingan bank sampah dengan inovasi teknologi daur ulang dan analisis matematika meningkatkan efisiensi, kualitas material, transparansi data, sirkularitas"

Bank sampah sebagai simpul pengelolaan sampah berbasis partisipasi masih sering berjalan pada pola "kumpul-jual", sehingga dampaknya terbatas pada pengalihan sampah bernilai ekonomi tanpa penguatan sistem operasi dan mutu material. Padahal, dalam kerangka ekonomi sirkular, bank

²⁹ Penulis lahir di Desnpasar, 20 Agustus 1986, merupakan Dosen di Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Stella Maris Sumba, menyelesaikan studi S1 Pendidikan Matematika di UPMI Bali (Universitas PGRI Mahadewa Indonesia) tahun 2009, menyelesaikan S2 Pendidikan Matematika di UNDIKSHA (Universitas Pendidikan Ganesha) tahun 2020, dan sedang menempuh pendidikan S3 Prodi Ilmu Pendidikan di UNDIKSHA (Universitas Pendidikan Ganesha) sejak tahun 2024.

sampah perlu bergerak menuju tata kelola yang lebih efisien, terukur, dan sirkular, sehingga tidak hanya memindahkan material, tetapi juga meningkatkan kualitas pemilahan, menekan residu, dan memperkuat akuntabilitas.

Secara kebijakan, Indonesia menempatkan ekonomi sirkular sebagai agenda strategis jangka panjang. *Circular Economy Indonesia 2025–2045 Roadmap and National Action Plan* menegaskan target melalui tiga indikator utama—tingkat input material sirkular, tingkat ketahanan produk, dan tingkat daur ulang—serta *enabling conditions* untuk mendukung implementasi lintas sektor (UN PAGE Indonesia, 2025; LCDI, 2025). Artinya, penguatan bank sampah perlu menautkan praktik lapangan dengan indikator terukur yang relevan terhadap tujuan sirkularitas, bukan sekadar aktivitas insidental.

Untuk mencapai tujuan tersebut, inovasi teknologi daur ulang pada skala bank sampah menjadi penting. Pada level operasional, inovasi dapat berupa peningkatan pemilahan (sorting), pencucian/pengeringan sederhana, pemadatan (press/baling), pencacahan (shredder), serta standarisasi kualitas material untuk menekan kontaminasi dan meningkatkan nilai jual. Literatur internasional menegaskan bahwa perbaikan proses mekanik dan penanganan material dapat memperluas peluang pemanfaatan dalam ekonomi sirkular, tetapi kendala kontaminasi dan kualitas bahan baku tetap menjadi tantangan utama (Okoya et al., 2024; Wang et al., 2024; *Frontiers in Marine Science*, 2025).

Namun teknologi saja tidak cukup. Efisiensi bank sampah dipengaruhi desain proses dan keputusan operasional berbasis data. Kajian optimasi sistem pengelolaan sampah menekankan peran pemodelan/optimasi untuk meningkatkan efisiensi jaringan pemulihan material agar sistem lebih efektif dan berorientasi pemulihan sumber daya (Büyüktaşkın et al., 2023; Bunse et al., 2024). Karena itu, analisis matematika

menjadi pengungkit: pencatatan kg, konversi nilai (Rp/kg), komposisi (%), tren setoran, produktivitas alat (kg/jam), biaya/kg, hingga indikator efisiensi seperti waktu layanan dan *error rate*. Di Indonesia, penguatan tata kelola berbasis data juga didorong melalui platform nasional SIMBA yang mengintegrasikan basis data bank sampah (Kementerian Lingkungan Hidup, n.d.). Selain itu, penguatan standar pengelolaan sampah berbasis kawasan menegaskan pemilahan dari sumber dan akuntabilitas penanggung jawab, sehingga menuntut sistem pencatatan/monitoring yang rapi dan dapat diaudit (Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, 2025).

Dalam konteks lokal, Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Stella Maris Sumba diposisikan sebagai “laboratorium sosial” pendampingan bank sampah berbasis teknologi dan analitik. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan pendampingan teknologi daur ulang skala bank sampah dengan analisis matematika (efisiensi, kualitas data, indikator sirkular) dalam satu desain program pembelajaran dan pengabdian. Tujuannya ialah: (1) mendeskripsikan desain pendampingan; (2) mengukur perubahan efisiensi dan kualitas tata kelola (data/pelaporan); serta (3) menjelaskan kontribusi terhadap indikator ekonomi sirkular mikro (pengalihan residu → daur ulang, peningkatan nilai material).

Penelitian menggunakan desain *action research/program evaluation* dengan *mixed-method* ringan. Secara kuantitatif, penelitian mengukur perubahan indikator sebelum–sesudah pendampingan (throughput kg/jam, waktu layanan, biaya/kg, nilai ekonomi Rp, residu, dan *error data*). Secara kualitatif, digunakan observasi, refleksi mahasiswa, dan wawancara/FGD singkat.

Subjek penelitian adalah mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Stella Maris Sumba semester 1 dan 3, terdiri dari 6 kelas dengan ± 28 mahasiswa/kelas (± 168). Pendampingan dilakukan di unit bank sampah kampus dan/atau mitra sekitar kampus (jika tersedia).

Setelah pendampingan, indikator efisiensi menunjukkan perbaikan: throughput cenderung meningkat, waktu layanan menurun, dan biaya operasional per kg lebih terkendali. Peningkatan ini dapat dijelaskan karena teknologi sederhana (pemadatan/pencacahan) menurunkan waktu penanganan, sedangkan analisis matematika membantu mengidentifikasi bottleneck dan menetapkan target kinerja (Büyüktaktakın et al., 2023; Bunse et al., 2024). Kualitas material juga membaik—kontaminasi turun, pemilahan lebih konsisten, dan nilai jual (Rp/kg) cenderung meningkat—selaras dengan literatur yang menekankan pentingnya tahap pemilahan–pembersihan–pemrosesan awal terhadap mutu hasil daur ulang (Okoya et al., 2024; Wang et al., 2024).

Program menghasilkan laporan periodik (volume, komposisi, nilai ekonomi, residu, tren) yang memperkuat akuntabilitas dan komunikasi. Hal ini relevan dengan dorongan integrasi data melalui SIMBA dan penguatan standar akuntabilitas pengelolaan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup, n.d.; Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, 2025). Selain itu, pengalihan residu ke material daur ulang meningkat sehingga indikator sirkularitas level mikro lebih jelas, sejalan dengan arah roadmap nasional yang menempatkan peningkatan tingkat daur ulang sebagai indikator utama serta menekankan *enabling conditions* (UN PAGE Indonesia, 2025; LCDI, 2025).

Secara konseptual, kombinasi teknologi dan analisis matematika bekerja sebagai paket perbaikan sistem. Teknologi memperkuat kapasitas proses (pemilahan, pencacahan, pemadatan), sedangkan analitik memastikan program terukur

melalui indikator efisiensi, kualitas, dan dampak. Analitik juga membangun *feedback loop* perbaikan berkelanjutan: data audit → keputusan perbaikan → peningkatan kinerja → data baru (Büyüktaktın et al., 2023).

Implikasinya, model pendampingan dapat dijadikan modul praktikum/MBKM (audit-intervensi-evaluasi) dengan SOP minimal: standar pemilahan, QC material, pencatatan baku, dan pelaporan bulanan berbasis indikator (kg, %, Rp, residu, tren). Bila program berkembang, integrasi dapat diarahkan ke SIMBA untuk mendukung standarisasi dan skalabilitas pelaporan (Kementerian Lingkungan Hidup, n.d.). Keterbatasan utama ialah durasi program relatif singkat dan efektivitas teknologi bergantung pada perawatan alat, pasokan material, serta konsistensi pemilahan. Karena itu, monitoring berkala dan penguatan tata kelola operasional diperlukan.

Kesimpulannya, pendampingan bank sampah berbasis inovasi teknologi daur ulang yang dikombinasikan dengan analisis matematika berpotensi meningkatkan efisiensi operasi, kualitas material, transparansi data, dan memperkuat ekonomi sirkular mikro pada konteks Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Stella Maris Sumba. Temuan ini relevan dengan kebijakan ekonomi sirkular nasional yang menekankan indikator (khususnya tingkat daur ulang) dan kebutuhan *enabling conditions* untuk implementasi lintas sektor (UN PAGE Indonesia, 2025; LCDI, 2025). Rekomendasi lanjutan mencakup standarisasi audit-indikator, pelaporan rutin berbasis data, serta replikasi pendampingan ke mitra masyarakat, dengan integrasi ke SIMBA bila memungkinkan.

Daftar Pustaka

- Bunse, K., et al. (2024). Optimization techniques in municipal solid waste management: A systematic review. *Sustainability*, 16(15), 6585.
- Büyüktaktın, İ. E., et al. (2023). Mathematical optimization of waste management systems: Methodological approaches and research needs. *Journal of Cleaner Production*.
- Frontiers in Marine Science. (2025). Mechanical recycling and upcycling of marine macro- and microplastics: Advances and challenges. *Frontiers in Marine Science*.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (n.d.). *SIMBA: Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah*.
- Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH. (2025). *Kawasan bersih, ekonomi berputar: KLH/BPLH terapkan standar pengelolaan sampah kawasan, dorong ekonomi sirkular dan kolaborasi*.
- LCDI. (2025). *Peta jalan & rencana aksi nasional ekonomi sirkular Indonesia 2025–2045*.
- Okoya, S., et al. (2024). Technological advances in mechanical recycling innovations and applications. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(3), 38.
- UN PAGE Indonesia. (2025). *Circular economy Indonesia 2025–2045 roadmap and national action plan*.
- Wang, X., et al. (2024). Advancements and future directions in waste plastics recycling: From mechanical to chemical approaches. *Chemical Engineering Journal*.



WAKTU TEMPUH KENDARAAN AKIBAT U-TURN PADA RUAS JALAN MT. HARYONO DI KOTA LUWUK

Mohammad Rizal.³⁰

Universitas Muhammadiyah Luwuk

“Salah satu pengaruh jalan U-turn yaitu terhadap kecepatan kendaraan, dimana kendaraan secara normal dari lajur cepat akan melambat atau berhenti”

Transportasi mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern dimana teknologi berkembang semakin pesat, juga laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi sehingga mengakibatkan peningkatan kebutuhan masyarakat akan transportasi (H. Saodang, 2010). Hal ini sangat berkaitan dengan jaringan dan permasalahan lalu lintas. Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan darat, mempunyai fungsi dasar yakni memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas seperti, aman dan nyaman kepada pemakai jalan.

³⁰ Penulis lahir di desa Lumpoknyo, 21 Mei 1999 merupakan mahasiswa di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Luwuk, menyelesaikan studi S1 di TS FT UML tahun 2024.

Pada jalan kota dengan median, dibutuhkan untuk kendaraan melakukan gerakan U-Turn pada bukaan median yang dibuat sebagai kebutuhan khusus (Morlok, 1991).

Salah satu pengaruh ketika melakukan U-turn yaitu terhadap kecepatan kendaraan, dimana kendaraan akan melakukan pendekatan secara normal dari lajur cepat, dan melambat atau berhenti (Dirjen Bina Marga, 2023). Perlambatan ini akan mengganggu arus lalu lintas pada arah yang sama. (M Kasan, M Mashuri, H Listiawati, 2005) Ruas jalan MT. Haryono adalah jalan arteri sekunder dengan tipe jalan 4/2 D (dua jalur dua arah dengan median), jalan ini merupakan akses menuju salah satu daerah perdagangan di kota luwuk sehingga volume lalu lintas pada jam-jam tertentu sangat tinggi menyebabkan kendaraan yang melakukan putar balik tidak berjalan dengan lancar dan juga terhambatnya pergerakan kendaraan lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan harapan dapat memberikan gambaran kemungkinan solusi serta saran yang bermanfaat untuk dapat mengenai waktu tempuh kendaraan akibat pengaruh u-turn dan memperlancar arus lalu lintas yang berada didaerah tersebut.

Metode

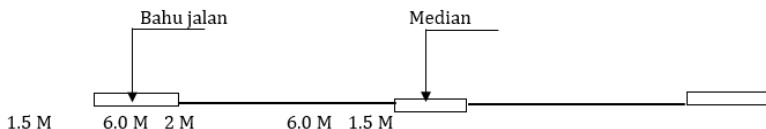
Tahap pertama, kendaraan yang melakukan gerak balik arah akan mengurangi kecepatan dan akan berada pada jalur paling kanan. Perlambatan arus lalu lintas yang terjadi sesuai teori car following mengakibatkan terjadinya antrian yang ditandai dengan panjang antrian, waktu tundaan dan gelombang kejut. Tahap kedua, saat kendaraan melakukan gerakan putar balik arah menuju kejalur berlawanan, dipengaruhi oleh jenis kendaraan (kemampuan maneuver, dan radius putar) (Hobbs, 1995). Lebar jalur berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas jalan untuk kedua arah. Tahap ketiga,

adalah gerakan balik arah kendaraan, sehingga perlu diperhatikan kondisi arus lalu lintas arah berlawanan. Terjadi interaksi antara kendaraan balik arah dan kendaraan gerak lurus pada arah yang berlawan

Pada tahap pertama dan tahap ketiga, para meter analisis adalah sepanjang waktu antar kendaraan pada suatu arus lalu lintas, senjang jarak, gap dan time + space gap. Untuk itu perlu diperhitungkan frekuensi kedatangan dan critical gap. Pada tahap pertama, karena ada gerakan kendaraan membelok, arus utama akan terpengaruh oleh perlambatan arus dan ini mempengaruhi kapasitas jalan. Dengan demikian perlu diperhitungkan kecepatan arus bebas dan kapasitas aktualnya. Panjang antrian dan waktu yang ditimbulkan harus diminimumkan, dihitung dengan Delay total = fungsi (flowrate lalu-lintas searah, flowrate lalu-lintas berlawanan, jumlah jalur searah, jumlah lajur berlawanan dan komposisi kendaraan) (Tamin, 1997).

Hasil dan Pembahasan

Adapun data geometrik lokasi penelitian adalah tipe lingkungan komersial karena merupakan pusat perdagangan dan perkantoran lahan. Lebar masing-masing lajur 3 meter, lebar median 2 meter dan termasuk dalam hambatan samping kelas rendah (Low/L) dimana besar arus lalu lintas pada tempat masuk dan keluar tidak berkurang oleh hambatan samping (Sukirman, 2010). Adapun penampang melintang jalan dapat dilihat seperti pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Penampang Melintang Jalan

Berdasarkan gambar diatas maka diperoleh data rekapitulasi arus lalu lintas dalam table 1 berikut.

No	Waktu		LV		Total	Hv		Total	MC		Total
			L.kanan	L.kiri		L.kanan	L.kiri		L.kanan	L.kiri	
1	06.30-07.30	00-15	58	61	119	1	2	3	182	77	259
		15-30	53	58	111	2	1	3	179	75	254
		30-45	58	71	129	2	2	4	177	69	246
		45-60	52	56	108	1	2	3	169	63	232
2	07.30-08.30	00-15	59	75	134	0	2	2	179	58	237
		15-30	53	62	115	0	2	2	175	52	227
		30-45	51	58	109	1	0	1	172	57	229
		45-60	50	70	120	0	0	0	171	59	230
3	10.30-11.30	00-15	61	67	128	0	1	1	178	57	235
		15-30	65	65	130	1	0	1	175	51	226
		30-45	63	63	126	0	0	0	172	61	233
		45-60	68	60	128	1	2	3	169	63	232
4	11.30-12.30	00-15	69	69	138	1	2	3	179	65	244
		15-30	72	73	145	0	1	1	181	67	248
		30-45	75	75	150	1	0	1	184	68	252
		45-60	73	76	149	0	1	1	187	62	249
5	16.00-17.00	00-15	70	67	137	0	2	2	185	62	247
		15-30	68	71	139	1	2	3	182	60	242
		30-45	63	74	137	1	1	2	187	58	245
		45-60	62	78	140	0	1	1	183	55	238
6	17.00-18.00	00-15	67	77	144	0	2	2	186	51	237
		15-30	69	77	146	0	0	0	184	53	237
		30-45	65	73	138	1	2	3	179	57	236
		45-60	61	68	129	0	1	1	174	51	225
7	19.00-20.00	00-15	72	79	151	1	2	3	167	48	215
		15-30	79	82	161	0	0	0	162	45	207
		30-45	77	81	158	0	1	1	165	41	206
		45-60	71	76	147	1	2	3	169	42	211
8	20.00-21.00	00-15	69	70	139	0	2	2	161	40	201
		15-30	67	68	135	0	1	1	157	42	199
		30-45	63	64	127	0	0	0	154	45	199
		45-60	60	61	121	0	2	2	152	43	195

Penyajian data yang menunjukkan banyaknya kendaraan di setiap lokasi pengamatan dengan jarak sesuai lokasi pengamatan, waktu tempuh rata-rata diperoleh dari total masing-masing waktu tempuh kendaraan dibagi banyaknya kendaraan selama 15 menit dibagi jarak tempuh dari lokasi

pengamatan. Lokasi jalan MT.Haryono, jarak pengendaraan yang akan melakukan u-turn dari batas masuk pengamatan sampai masuk bukaan median sepanjang 40 m, berada dijalur dalam. Untuk jarak pengendara yang tidak akan melakukan u-trun dari batas masuk pengamatan sampai batas keluar pengamatan di lokasi u-turn sepanjang 80 m, pengendara tersebut menggunakan lajur kanan,dan lajur kiri, contoh perhitungan data kendaraan yang akan melakukan u-turn pada jam 06.30 – 07.30 pada interval waktu 15 menit pertama sebagai berikut (Kassan, 2005):

$$\text{Waktu tempuh rata-rata} = \frac{\text{waktu tempuh}}{\text{total kendaraan}}$$

$$= \frac{356}{31}$$

$$= 11,48 \text{ menit}$$

$$\text{Kecepatan rata-rata} = \frac{\text{jarak}}{\text{waktu}}$$

$$= \frac{40}{11,48} = \frac{40}{\left(\frac{11,48}{3600}\right)} \times 1000$$

$$= \frac{40}{3,1888}$$

$$= 12,54 \text{ km/jam}$$

Kesimpulan

Waktu tempuh rata-rata kendaraan yang melakukan u-turn diruas jalan MT. Haryono sebesar 12.77 detik, kendaraan tidak akan melakukan u-turn pada kondisi terganggu sebesar 35.34 detik, dan pada posisi tidak terganggu 26.42 detik. Pada sepeda motor waktu tempuh rata-rata yang akan melakukan u-turn sebesar 8.96 detik, sepeda motor tidak akan melakukan u-turn pada kondisi terganggu sebesar 17.53 detik, dan pada posisi tidak terganggu 14.30 detik. Waktu tempuh rata-rata di

ruas jalan 4/2 D untuk kendaraan dan sepeda motor yang dipengaruhi beberapa kondisi seperti akibat jumlah jalur, akibat lebar bukaan median, dan akibat jenis kendaraan. Derajat kejenuhan yang terjadi pada ruas jalan MT. Haryono akibat kendaraan yang melakukan putar balik arah terjadi derajat kejenuhan paling besar antara jam 06.30 – 07.30, pada menit pertama sampai menit ke 15 dengan rasio sebesar 0.31.

Daftar Pustaka

- H. saodang, 2010. Konstruksi Jalan Raya Buku 1 Geometrik Jalan.
- Direktorat jendral bina marga. 2023. Pendoman kapasiitas jalan Indonesia (PKJI). Direktorat jendral bina marga
- M Kasan, M Mashuri, H Listiawati - SMARTek, 2005 - jurnal.untad.ac.id
- Hobbs, 1995. Perencanaan dan Teknik Lalu-Lintas (edisi kedua), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Morlok, Edward K, 1991. Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Erlangga, Jakarta.
- Oglesby, Clarkson H., 1988. Teknik Jalan Raya. Erlangga, Jakarta
- Sukirman. Silvia. 2010. Perkerasan Lentur Jalan Raya. Nova. Bandung.
- Tamin, Ofyar Z. (1997). Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, Teknik Sipil ITB, Bandung.
- Warpani, S. 1990. Merencanakan Sistem Perangkutan. ITB, Bandung
- Kassan muhammad, mashuri, dan listiawati hilda, (2005). Prngaruh U-turn Terhadap Karakteristik Arus Lalu Lintas di Ruas Jalan Kota Palu. Universitas Tadulako, Palu.

Rohani, (2010). Pengaruh Volume Lalu Lintas Lurus Terhadap Waktu U-Turn pada Ruas Jalan dengan Fasilitas Putar Balik Arah (U-turn). Spektrum Sipil Universitas Mataram, Mataram



PENDIDIKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN MODERN

Nur Kholis, S.Pd.I.³¹

MAS AL AQIDAH

“Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan modern penting untuk membentuk generasi berkarakter, toleran, dan cinta tanah air”

Pendidikan nilai-nilai Pancasila merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan secara sistematis melalui proses pendidikan. Dalam konteks pendidikan modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang sangat cepat, pendidikan nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia.

³¹ Nur Kholis, S.Pd.I. Lahir di Boyolali, 8 Juni 1977. Telah menyelesaikan pendidikan S.1 di STAIN Ponorogo tahun 2003 pada Jurusan Tarbiyah. Saat ini bekerja sebagai Guru PPKn di MAS Al Aqidah yang terletak di Desa Kutapandan, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Di era globalisasi, peserta didik dihadapkan pada berbagai pengaruh budaya dari berbagai negara melalui internet, media sosial, dan berbagai bentuk komunikasi digital lainnya. Perkembangan ini membawa dampak positif sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan akses yang luas terhadap ilmu pengetahuan dan informasi. Namun di sisi lain, arus informasi yang tidak terbatas juga dapat memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku generasi muda yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting sebagai landasan moral dan etika bagi peserta didik dalam menghadapi perkembangan zaman.

Pendidikan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi di dalam kelas, tetapi juga melalui pembiasaan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Seperti:

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, dapat diwujudkan melalui sikap religius, toleransi antar umat beragama, serta penghormatan terhadap keyakinan orang lain.
2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, empati, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta kepedulian terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.
3. Nilai Persatuan Indonesia dapat ditanamkan melalui semangat kebersamaan, gotong royong, rasa cinta tanah air, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya, bahasa, dan suku bangsa yang ada di Indonesia.

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat diwujudkan melalui sikap menghargai pendapat orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta menerima hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab.
5. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diwujudkan melalui sikap berlaku adil, menghormati hak dan kewajiban setiap orang, bekerja keras, serta berusaha menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dalam pendidikan modern, proses pembelajaran juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai sumber utama informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. Metode pembelajaran yang partisipatif seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, serta pemanfaatan media digital dapat digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran.

Sebagai contoh, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), guru dapat mengajak peserta didik untuk menganalisis berbagai peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat kemudian mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu melihat relevansinya dalam kehidupan nyata. Pendekatan seperti ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual bagi peserta didik.

Selain itu, lingkungan sekolah juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Sekolah harus menjadi tempat yang mencerminkan praktik nilai-nilai

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Budaya sekolah yang menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, dan kerja sama akan membantu peserta didik memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila secara langsung. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, kegiatan sosial, serta kegiatan keagamaan juga dapat menjadi sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang sejalan dengan Pancasila.

Peran guru dalam pendidikan nilai-nilai Pancasila sangatlah penting. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan bagi peserta didik. Sikap, perilaku, dan cara guru dalam berinteraksi dengan siswa akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter mereka. Oleh karena itu, guru harus mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pendidikan modern, pemanfaatan teknologi juga dapat digunakan untuk memperkuat pendidikan nilai-nilai Pancasila. Media pembelajaran digital seperti video edukatif, platform pembelajaran daring, serta berbagai aplikasi pendidikan dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi secara lebih menarik dan interaktif. Dengan pendekatan yang kreatif dan inovatif, nilai-nilai Pancasila dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh generasi muda.

Tantangan lain dalam pendidikan nilai-nilai Pancasila adalah munculnya berbagai fenomena sosial seperti intoleransi, individualisme, serta menurunnya rasa kepedulian sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter masih perlu diperkuat dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila harus terus dikembangkan agar mampu menjawab berbagai tantangan zaman sekaligus memperkuat identitas bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, pendidikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan modern memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dengan pendidikan yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral, diharapkan generasi muda Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



EVALUASI DAN PENGUATAN GERAKAN CUCI TANGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT DI SEKOLAH

dr. Yustiana Arie Suwanto, M.Biomed., Sp.MK.³²

Universitas Wahid Hasyim Semarang

*"Evaluasi dan penguatan gerakan cuci tangan
dilakukan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih
dan mencegah penyakit di sekolah"*

Kebiasaan cuci tangan tidak hanya penting pada masa COVID-19, cuci tangan tetap efektif menurunkan risiko penularan kuman melalui tangan dalam kehidupan sehari-hari (WHO, 2022).

³²Yustiana Arie Suwanto lahir di Semarang, 14 September 1981, merupakan Dosen di Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran UNWAHAS Semarang, menyelesaikan studi S1 dan Profesi Dokter di FK UNISSULA Semarang tahun 2005, menyelesaikan S2 Magister Biomedik di FK UNISSULA Semarang tahun 2018, dan menyelesaikan Profesi Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik (Sp.MK) di FK UNDIP tahun 2025.

Tangan merupakan perantara paling sering terjadinya kontaminasi kuman, melalui berjabat tangan kuman dapat berpindah tempat dari satu orang ke orang lain, sehingga sangat penting menjaga kebersihan tangan agar terhindar dari kuman seperti bakteri, virus, atau jamur (CDC, 2024).

Banyak faktor yang meningkatkan risiko penularan infeksi, salah satunya lingkungan sekolah yang dianggap rentan terhadap penularan infeksi. Adanya interaksi fisik yang berdekatan baik di kelas maupun saat bermain, menggunakan benda bersamaan, kurangnya rutinitas pembersihan dan desinfeksi, sanitasi yang buruk serta ventilasi yang kurang memadai dapat meningkatkan penyebaran infeksi (CDC, 2024; UNICEF, 2025). Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan gerakan cuci tangan di sekolah perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitasnya serta menjadi dasar penguatan perilaku sehat pada siswa.

Tujuan Kegiatan

Mengevaluasi pelaksanaan gerakan cuci tangan di sekolah berdasarkan ketersediaan fasilitas dan media edukasi, serta meningkatkan pemahaman siswa dalam pencegahan penyakit menular.

Metode

Lokasi dan waktu kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di kota Semarang di sekolah SDN Pongangan Gunungpati (bulan Agustus 2023), SMAN 12 (bulan Agustus 2025) dan SMKN 10 (bulan September 2025). Kegiatan ini dilaksanakan pada satu kelas yang ditunjuk oleh pihak sekolah, berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan diawali dengan sesi presentasi materi selama kurang lebih 10 menit. Pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Penyampaian materi mengenai pentingnya cuci tangan yang baik dan benar sebagai upaya pencegahan penyakit menular, disertai penjelasan enam langkah cuci tangan yang benar.
2. Praktek langsung cara cuci tangan yang baik dan benar menggunakan cairan antiseptik, dengan pendampingan dan demonstrasi kepada siswa.
3. Ketersediaan fasilitas pendukung cuci tangan seperti tempat cuci tangan, cairan antiseptik berbahan dasar alkohol (*hand sanitizer*) dan media edukasi berupa poster atau panduan tata cara cuci tangan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan diikuti oleh sekitar 20 siswa dalam satu kelas, dengan temuan awal bahwa sebagian besar siswa telah melupakan teknik cuci tangan yang benar sejak berakhirnya pandemi COVID-19. Kegiatan ini mengingatkan kembali pada prinsip cuci tangan enam langkah menurut WHO.



Gambar 1. Flipchart cuci tangan 6 langkah

Tehnik cuci tangan dapat dilakukan menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*hand sanitizer/handrub*) selama 20–30 detik atau menggunakan sabun dan air mengalir (*handwash*) selama 40–60 detik, serta dianjurkan menyelingi lima kali *handrub* dengan satu kali *handwash* (Kemenkes RI, 2020; WHO 2009).

Kegiatan dilanjutkan dengan praktik cuci tangan yang dilakukan secara langsung oleh siswa. Setiap siswa diminta melakukan praktik secara bergiliran guna membiasakan penerapan gerakan cuci tangan yang benar sesuai pedoman.



Gambar 2. *Praktek cuci tangan di SDN Pongangan, Gunungpati Semarang.*



Gambar 3. *Praktek cuci tangan di SMAN 12 Semarang.*



Gambar 4. *Praktik cuci tangan di SMKN 10 Semarang*

Setelah dilakukan penguatan melalui edukasi dan demonstrasi, terjadi peningkatan signifikan pada pengetahuan dan keterampilan siswa dalam melakukan cuci tangan dengan benar. Penguatan gerakan cuci tangan ini berperan penting dalam membentuk kebiasaan hidup bersih dan sehat serta mendukung pencegahan penyakit di lingkungan sekolah.

Diharapkan setiap sekolah menyediakan fasilitas cuci tangan yang layak, guna membiasakan perilaku cuci tangan di lingkungan sekolah dan penyebaran infeksi melalui tangan dapat dicegah dengan cuci tangan.

Kesimpulan

Gerakan cuci tangan di sekolah efektif meningkatkan pengetahuan dan praktik siswa serta berpotensi menjadi strategi pencegahan penyakit yang berkelanjutan dengan dukungan sekolah.

Daftar Pustaka

- Centers for Disease (CDC). 2024. Control and Prevention: *Preventing spread of infections in K-12 schools: Infection prevention and control strategies*.
<https://www.cdc.gov/orr/school-preparedness/infection-prevention/index.html>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). 2020. *Panduan Cuci Tangan Pakai Sabun*.
<https://repository.kemkes.go.id/book/736>.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). 2025. UNICEF WASH: *Resilience through safe water, sanitation and hygiene*. Updated Sept 24, 2025.
<https://www.unicef.org/executiveboard/media/33591/file/UNICEF-NY-WASH-Safe-Water-and-Hygiene.pdf>
- World Health Organization (WHO). 2009. *WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care*. WHO Reference Number: WHO/IER/PSP/2009/01.
ISBN: 9789241597906.
<https://iris.who.int/handle/10665/44102>
- World Health Organization (WHO). 2022. *Hand hygiene for all: Maintaining hygiene practices beyond the COVID-19 pandemic*.
<https://www.who.int/initiatives/hand-hygiene-for-all-global-initiative>



MELAYANI: MENYERUAKKAN IDEALISME PADA PEKERJAAN

Bewa Dangu Wole, S.Kep., Ns., M.A.P.³³

Universitas Stella Maris Sumba

“Memberi diri wujud pelayanan dalam bekerja yang bukan sekedar menyelesaikan tugas, melainkan bertindak dengan upaya menyuarakan idealisme, prinsip, nilai dan tujuan yang luhur ditengah gelombang realitas kerja yang dinamis berbekal komitmen untuk memberikan dampak positif melebihi sekedar imbalan finansial”

Undangan RRI Sumba Menjadi Narasumber

Pada Selasa, 03 Maret 2026, saya telah dihubungi oleh salah satu host yang bekerja di RRI Sumba namanya Prima Maya. Beliau adalah teman lama sewaktu sekolah di SMK Pancasila Tambolaka. Tujuan Maya hubungi saya adalah untuk mengajak ngobrol karena beliau melihat postingan di akun facebook saya terkait ucapan selamat dan sukses atas dilantiknya menjadi wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Perguruan

³³ Penulis lahir di Tarung, 08 Agustus 1994, merupakan dosen program studi administrasi rumah sakit Universitas Stella Maris Sumba, menyelesaikan studi S1 tahun 2018, menyelesaikan profesi ners tahun 2021 di Stikes Bhakti Mulia Pare Kediri, dan S2 tahun 2021 Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

Tinggi Administrasi Rumah Sakit Indonesia (DPD PPT ARSI) Bali, NTT, NTB. Saya dipersilahkan datang ke studio RRI Sumba untuk menjadi narasumber menceritakan perjalanan dan memberikan inspirasi kepada anak muda di sumba tentang kepemimpinan jabatan yang diemban. Tema obrolan tersebut adalah “Anak Muda Sumba Mengemban Amanah Kepemimpinan”.

Pada wawancara awal, saya menceritakan tentang gambaran umum Perkumpulan Perguruan Tinggi Administrasi Rumah Sakit Indonesia (PPT-ARSI). Bahwa pada tahun 2018 dilakukan musyawarah nasional pertama dan menjadi organisasi yang diresmikan. Sebuah komitmen yang memberikan wadah untuk seluruh institusi perguruan tinggi penyelenggara prodi ARS. Melalui musyawarah pertama terbentuk Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Perguruan Tinggi Administrasi Rumah Sakit Indonesia (DPP PPT-ARSI) dan juga Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Perguruan Tinggi Administrasi Rumah Sakit Indonesia (DPD PPT-ARSI). Salah satu DPD yang menjadi fokus yang dekat dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Jatim, Bali, dan NTB. Sebelum musyawarah kedua, Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur masih tergabung menjadi satu DPD dengan istilah JATIBARA.

Substansi dari penjelasan sebagai dosen pemula seperti saya yang baru menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit, mempunyai tanggung jawab besar untuk membawa prodi menjadi lebih baik dan memperkenalkan kehadiran Universitas Stella Maris Sumba di daerah dan secara nasional. Melalui berbagai cara telah saya lakukan, salah satunya adalah melakukan penelusuran akun sosial media sesama prodi Administrasi Rumah Sakit (ARS) untuk terhubung dengan seluruh kaprodi ARS di Indonesia, dan telah memperoleh 24 orang kaprodi untuk berkenalan dan ngobrol soal prodi. Saya juga berbagi cerita terkait letak

kampus UNMARIS Sumba dan satu-satunya prodi ARS yang berada di daerah sumba maupun di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempengaruhi banyaknya peminat prodi ARS.

Mengambil Peran di PPT-ARSI

Tujuan memperkenalkan prodi ARS yaitu memperluas jejaring dan mencari informasi-informasi terbaru terkait perkembangan prodi ARS secara nasional. Setelah memperoleh informasi yang cukup, saya melakukan pemetaan peluang supaya prodi ARS UNMARIS Sumba lebih dikenal di kalangan masyarakat. Bersyukur sekali pada tahun 2025 awal telah memperoleh informasi bahwa organisasi PPT-ARSI merencanakan musyawarah nasional kedua di Bandung. Tentunya peluang ini menjadi momen bersejarah dalam hidup saya saat menjadi kaprodi untuk berkontribusi pada organisasi nasional. Sebelum musyawarah nasional kedua dimulai, saya sudah menghubungi ketua umum PPT-ARSI terkait pengusulan pembentukan DPD PPT-ARSI di wilayah NTT sendiri, dan respon baik dari ketua umum telah mengapresiasi usulan itu dan diperbolehkan untuk disampaikan pada saat musyawarah nasional kedua nantinya.

Pada bulan Agustus 2025, sebagai kaprodi ARS diberangkatkan ke Bandung mewakili Universitas Stella Maris Sumba untuk mengikuti pelaksanaan musyawarah nasional kedua mulai Selasa-Kamis, 26-28 Agustus 2025. Tentunya ketika sampai di Bandung, sangat terharu dengan beberapa perjuangan nyata yang saya lakukan untuk prodi ARS yang baru berjalan satu tahun. Kontribusi nyata itulah yang mengantarkan saya bisa sampai ke Bandung membawa nama baik lembaga. Di Bandung, saya telah bertemu langsung dengan sesama kaprodi ARS serta dosen prodi ARS se-Indonesia serta ketua umum PPT-ARSI yaitu Assoc. Prof. Dr. H. K. Prihartono AH., MM., MOS., CMA., MPM., MBA. Disisi lain saya

mulai paham bagaimana proses berjalannya organisasi besar PPT-ARSI serta kekurangannya yang menjadi titik fokus saya untuk bersuara di musyawarah nasional kedua.



Gambar 1. Ketua Prodi ARS UNMARIS Sumba dan Ketua Umum terpilih DPP PPT-ARSI

Penyampaian saya pada forum musyawarah nasional kedua PPT-ARSI yaitu “awalnya memperkenalkan posisi prodi ARS UNMARIS Sumba yang terletak di pulau sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu prodi dibawah naungan perguruan tinggi yang juga baru melakukan perubahan bentuk dan baru berjalan satu tahun. Kami berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang secara kualitas pendidikan tentunya berbeda dengan di Jawa. Pendidikan di NTT masih merangkak sedangkan di jawa sudah berlari. Kalau bisa, berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh rekan-rekan juang dari luar jawa tadi bahwa roda organisasi yang dijalankan oleh DPP PPT-ARSI kurang melibatkan pengurus yang dari luar jawa. Sehingga, mohon maaf sekali jika saya katakan bahwa organisasi PPT-ARSI masih bersifat jawa sentris. Supaya sama-sama berlari dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kalau bisa rangkul jugalah kami yang ada

diluar jawa untuk kepentingan organisasi yang lebih baik”.

Masukan tersebut adalah salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi prodi ARS UNMARIS Sumba yang menunjukkan komitmen mengembangkan organisasi PPT-ARSI yang lebih baik dan diperhatikan oleh pengurus pusat. Manfaat ikut terlibat musyawarah nasional kedua salah satunya secara resmi Universitas Stella Maris Sumba terdaftar sebagai anggota institusional masa berlaku 26 Agustus 2025 S.D 26 Agustus 2028 yang dibuktikan dengan sertifikat. Dipercayakan juga menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPT-ARSI pada Departemen Kelembagaan dan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri, Periode Masa Bakti Tahun 2025-2030. Serta dipercayakan menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Perguruan Tinggi Administrasi Rumah Sakit Indonesia (DPD PPT-ARSI) Wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, periode 2025-2030.

Berikut pemetaan wilayah dan nama-nama yang telah dilantik masing-masing DPD PPT-ARSI seluruh Indonesia.

1. DPD Jawa Timur (Safari Hasan, S.IP., M.MRS)
2. DPD Kalimantan Selatan & Kalimantan Timur (H. Raziansyah, S.Kp., MPH)
3. DPD Sumatera Barat, Jambi, Riau & Kepulauan Riau (Ns. Muhammad Firdaus, S.Kep., MMR)
4. DPD Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (Ns. Ardiansyah Ahmad, MARS)
5. DPD Daerah Khusus Jakarta & Banten (Agustina, S.KM., M.Kes)
6. DPD Sulawesi Utara, Maluku & Gorontalo (Pricilia Maria Toreh, S.Kep., Ns., MHA)
7. DPD Sumatera Selatan, Bangka Belitung & Lampung (Nidya Aryani, S.E., S.Keb., M.KM)

8. DPD Bali, Nusa Tenggara Timur & Nusa Tenggara Barat (Ns. I Gede Suasnawa, S.Kep., M.M)
9. DPD Sumatera Utara & Aceh (Sri Agustina Meliala, S.KM., M.KM)

Daftar Pustaka

PPT ARSI Official. 2026. (Youtube). Link
akses:<https://www.youtube.com/watch?v=yTykb9SNFQM>



MODEL PENGABDIAN BERBASIS EKOSISTEM HALAL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ahadiyah Agustina, SE.Sy.M.E.³⁴

Universitas Muhammadiyah Mataram

"Model pengabdian berbasis ekosistem halal mendorong pemberdayaan ekonomi, kemandirian usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan"

Pengembangan ekosistem halal merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Ekosistem halal tidak hanya mencakup aspek produk halal semata, tetapi juga melibatkan keseluruhan rantai nilai (value chain) yang terintegrasi mulai dari produksi, distribusi, pembiayaan, hingga konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, pengabdian kepada

³⁴ Penulis, lahir di Praya pada 23 Agustus 1992, merupakan seorang dosen di Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Mataram. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Mataram pada 2015 dan meraih gelar S2 Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2018.

masyarakat berbasis ekosistem halal menjadi pendekatan yang relevan dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat ekosistem halal global, ditopang oleh jumlah penduduk Muslim yang besar, kekayaan sumber daya lokal, serta pertumbuhan UMKM yang signifikan. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya terkelola secara optimal akibat rendahnya literasi halal, keterbatasan akses sertifikasi halal, lemahnya manajemen usaha, serta belum terintegrasinya pelaku usaha kecil dalam ekosistem halal yang utuh (KNEKS, 2023). Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing produk halal lokal dan terbatasnya kontribusi sektor halal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengabdian berbasis ekosistem halal memposisikan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi halal. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, pengabdian ini berupaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami, mengelola, dan mengembangkan aktivitas ekonomi halal yang produktif. Dengan demikian, pengabdian tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Konsep Ekosistem Halal dan Kesejahteraan Masyarakat

Ekosistem halal dapat dipahami sebagai jaringan terintegrasi yang terdiri dari pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, regulator, institusi pendidikan, serta konsumen yang berinteraksi dalam kerangka prinsip halal dan thayyib.

Ekosistem ini mencakup sektor-sektor strategis seperti makanan dan minuman halal, fesyen Muslim, pariwisata halal, farmasi dan kosmetik halal, serta jasa keuangan syariah sebagai penopang utama (Bank Indonesia, 2023).

Model Pengabdian Berbasis Ekosistem Halal

Model pengabdian berbasis ekosistem halal dirancang secara holistik dengan mengintegrasikan aspek edukasi, pendampingan, dan penguatan kelembagaan. Model ini menempatkan masyarakat sebagai pusat kegiatan, dengan dukungan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Gambar 1. *Model Pengabdian Berbasis Ekosistem Halal*



Tahap pertama adalah edukasi dan literasi halal, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep halal, sertifikasi halal, dan peluang ekonomi halal. Tahap kedua adalah pendampingan usaha, yang meliputi peningkatan kapasitas produksi, manajemen usaha, pengemasan, dan pemasaran produk halal. Tahap ketiga adalah integrasi ke dalam ekosistem halal melalui akses pembiayaan syariah, sertifikasi halal, serta jejaring pemasaran.

Tahap akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, dan kualitas hidup.

Implementasi Model: Studi Kasus Pengabdian

Implementasi model pengabdian berbasis ekosistem halal dapat dilihat pada kegiatan pendampingan UMKM halal di tingkat desa dan kelurahan. Dalam sebuah program pengabdian di wilayah sentra kuliner lokal, tim pengabdian melakukan edukasi halal kepada pelaku UMKM terkait bahan baku, proses produksi, dan standar halal. Selanjutnya, pelaku usaha didampingi dalam proses pengurusan sertifikasi halal dan peningkatan kualitas produk. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang terintegrasi dalam ekosistem halal mengalami peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan pasar, dan peningkatan omzet usaha.

Tabel 1. *Dampak Pengabdian Berbasis Ekosistem Halal*

Aspek	Sebelum Pengabdian	Setelah Pengabdian
Literasi halal	Rendah	Meningkat
Akses sertifikasi	Terbatas	Lebih mudah
Omzet UMKM	Stagnan	Meningkat
Keberlanjutan usaha	Rentan	Lebih stabil

Tantangan dan Strategi Penguatan

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi pengabdian berbasis ekosistem halal masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kesadaran halal, keterbatasan sumber daya pendamping, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Selain itu, sebagian masyarakat masih memandang sertifikasi halal

sebagai beban administratif, bukan sebagai peluang peningkatan nilai tambah produk.

Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan Ekosistem Halal Berbasis Pengabdian

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai *knowledge hub* dan *agent of change* dalam penguatan ekosistem halal berbasis pengabdian kepada masyarakat. Melalui tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, institusi akademik berperan dalam mentransformasikan pengetahuan ilmiah menjadi praktik pemberdayaan yang aplikatif dan berdampak langsung. Dalam konteks ekosistem halal, peran ini mencakup transfer pengetahuan mengenai standar halal, manajemen usaha halal, inovasi produk, serta integrasi UMKM ke dalam rantai nilai halal yang lebih luas.

Integrasi Sertifikasi Halal dalam Model Pengabdian

Sertifikasi halal merupakan elemen krusial dalam penguatan ekosistem halal, khususnya bagi UMKM. Namun dalam praktiknya, sertifikasi halal sering dipersepsikan sebagai proses yang rumit, mahal, dan administratif. Model pengabdian berbasis ekosistem halal perlu mengintegrasikan pendampingan sertifikasi halal sebagai bagian inti dari program, bukan sebagai kegiatan tambahan. Integrasi sertifikasi halal juga memperkuat aspek keberlanjutan pengabdian. Ketika pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal dan memahami standar produksinya, mereka cenderung mampu mempertahankan praktik usaha halal secara mandiri. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dimensi Digital dalam Ekosistem Halal Berbasis Pengabdian

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar dalam memperkuat ekosistem halal berbasis pengabdian. Digitalisasi memungkinkan perluasan jangkauan edukasi halal, efisiensi pendampingan, serta akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha halal. Oleh karena itu, model pengabdian berbasis ekosistem halal perlu mengintegrasikan dimensi digital sebagai bagian dari strategi implementasi.

Pemanfaatan platform digital dapat dilakukan melalui pelatihan pemasaran digital produk halal, penggunaan marketplace halal, serta pengenalan sistem pembayaran syariah berbasis digital. Bagi masyarakat dan UMKM, digitalisasi tidak hanya meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dengan pelaku usaha lain dalam ekosistem halal. Dalam jangka panjang, digitalisasi memperkuat daya saing UMKM halal dan mempercepat integrasi mereka ke dalam ekonomi halal nasional.

Implikasi Kebijakan dan Keberlanjutan Program Pengabdian

Pengabdian berbasis ekosistem halal memiliki implikasi kebijakan yang penting, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Model ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam merancang program pemberdayaan UMKM halal yang terintegrasi dengan kebijakan industri halal dan ekonomi syariah. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program pengabdian.

Keberlanjutan pengabdian juga ditentukan oleh kemampuan komunitas untuk melanjutkan inisiatif secara mandiri. Oleh karena itu, pengabdian berbasis ekosistem halal harus diarahkan pada penguatan kapasitas lokal, bukan ketergantungan pada pendamping. Pembentukan kader halal,

penguatan kelembagaan komunitas, dan penciptaan jejaring usaha menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan dampak pengabdian.

Daftar Pustaka

- Ascarya. (2023). *Ekosistem Halal dan Penguatan Ekonomi Syariah Berkelanjutan*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Blueprint Pengembangan Ekosistem Halal Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2023). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. London: Islamic Foundation.
- Fauzi, A., & Nursyamsiah, S. (2022). Penguatan UMKM halal melalui pendekatan berbasis komunitas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(3), 245–259.
- Hassan, M. K., & Ali, A. (2023). Halal industry and sustainable development: The role of Islamic social finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2), 210–228.
- Suryani, T., Huda, N., & Rini, N. (2024). Model pengabdian masyarakat berbasis ekosistem halal pada UMKM. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1), 129–146.
- Yusof, R. M., Rahman, A., & Hamzah, N. (2023). Digital halal ecosystem and MSME development. *Journal of Islamic Finance*, 12(2), 41–58.

Telaah Holistik **ILMU SOSIAL DAN ILMU ALAM** dalam Dunia Pendidikan serta Kemasyarakatan

Buku ini lahir dari sebuah kesadaran bersama bahwa fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dan dunia pendidikan saat ini tidak lagi dapat dipandang dari satu sudut pandang yang sempit. Kompleksitas tantangan zaman menuntut kita untuk menjembatani jurang antara ilmu sosial yang mengkaji dinamika kemanusiaan dan ilmu alam yang menelaah hukum-hukum semesta. Integrasi keduanya menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang komprehensif, berkelanjutan, dan tepat guna. Dalam setiap babnya, para penulis mencoba membedah bagaimana sinergi antara logika saintifik dan empati sosial dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan, kebijakan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Kami percaya bahwa pendidikan bukan sekadar transfer informasi, melainkan upaya membentuk manusia yang mampu memahami ekosistem alam sekaligus menjaga harmoni sosial.

Akademia Pustaka

Jl. Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung

🌐 <https://akademiapustaka.com/>

✉ redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

📘 [@redaksi.akademia.pustaka](https://www.facebook.com/redaksi.akademia.pustaka)

📱 [@akademiapustaka](https://www.instagram.com/akademiapustaka)

☎ 081216178398

